



**DAMPAK SUBSIDI PENDIDIKAN TERHADAP
TINGKAT PENDIDIKAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
RUMAH TANGGA DI INDONESIA**
(Social Accounting Matrix Indonesia 2006)

OLEH

DENDI ROMADHON
6605012045

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Sains Ekonomi
pada Program Studi Ilmu Ekonomi
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia**

DEPOK, 2008

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Dendi Romadhon
NPM : 6605012045
Kekhususan : Ekonomi Finansial
Judul Tesis : DAMPAK SUBSIDI PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT
PENDIDIKAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
RUMAH TANGGA DI INDONESIA
(*Social Accounting Matrix* Indonesia 2006)

Depok, 23 Juli 2008

Pembimbing tesis,



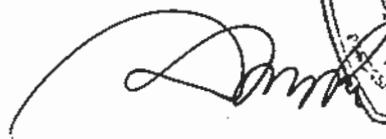
Dr. Jossy P. Moeis

Penguji tesis,



Dr. Sugiharso Sapuan

Ketua Program Ilmu Ekonomi
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi



Dr. Arindra A. Zainal



ABSTRAK TESIS

DAMPAK SUBSIDI PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT PENDIDIKAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI INDONESIA (*Social Accounting Matrix Indonesia 2006*)

DENDI ROMADHON
6605012045

Program Studi Ilmu Ekonomi
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia

Klasifikasi JEL : C69, D33, E25, H24

Kata Kunci : 1. Subsidi
2. Tingkat pendidikan
3. Distribusi pendapatan rumah tangga
4. *Social Accounting Matrix* (SAM)
5. *Structural Path Analysis* (SPA)

Perkembangan ekonomi dan teknologi menuntut ketersediaan tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang memadai. Data Produk Domestik Bruto (PDB) serta Sakernas tahun 2003 dan 2006 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi membutuhkan pekerja berpendidikan S1 ke atas sebesar 2,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan semakin banyak ketersediaan tenaga kerja berpendidikan S1 ke atas. Karena untuk menghasilkan pekerja berpendidikan tinggi memerlukan pembiayaan yang cukup besar,

maka subsidi pendidikan menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di masa akan datang.

Pemerintah Indonesia telah lama mencanangkan subsidi pendidikan guna menyiapkan sumber daya manusia yang handal. Perubahan sasaran subsidi pendidikan terus berlangsung sesuai dengan proses berjalannya waktu. Indonesia pernah mencanangkan wajib belajar 6 tahun, kemudian bergeser menjadi wajib belajar 9 tahun, bahkan saat ini masyarakat sudah menuntut supaya dana pendidikan mencapai 20 persen dari APBN/APBD. Di beberapa daerah kaya, 20 persen anggaran untuk pendidikan telah terealisasi.

Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia tahun 2006 digunakan untuk mentransformasi perubahan alokasi anggaran subsidi pendidikan yang diluncurkan oleh pemerintah, guna meningkatkan pendapatan rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong rumah tangga mengalokasikan dananya untuk biaya pendidikan tinggi. Sedangkan alur subsidi pendidikan dirunut dengan menggunakan *Structural Path Analysis* (SPA).

Analisis dampak dari tabel SAM tahun 2006 menunjukkan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen akan menyediakan kesempatan kerja berpendidikan S1 ke atas sebanyak 241 ribu ekivalen tenaga kerja (ETK). Apabila dilihat pertumbuhannya, maka setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan meminta pekerja berpendidikan S1 ke atas sebesar 4,12 persen.

Apabila golongan rumah tangga diklasifikasikan secara desil berdasarkan jumlah penduduk, maka 10 persen rumah tangga golongan paling bawah hanya menikmati pendapatan rumah tangga secara keseluruhan sebesar Rp 35,1 triliun. Untuk 10 persen golongan rumah tangga paling kaya menikmati pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1.075,2 triliun. Ini menunjukkan bahwa gap pendapatan antara rumah tangga 10 persen termiskin dengan rumah tangga 10 persen terkaya sebesar 1 banding 31.

Hasil simulasi subsidi pendidikan menunjukkan bahwa apabila subsidi pendidikan diberikan secara merata ke seluruh rumah tangga, melalui fasilitas pendidikan, maka pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan meningkat sebesar 14 persen. Jika subsidi pendidikan hanya diberikan untuk rumah tangga golongan bawah, maka pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan meningkat sebesar 13 persen.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul **“Dampak Subsidi Pendidikan Terhadap Tingkat Pendidikan Dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Di Indonesia (Social Accounting Matirx Indonesia 2006)”**. Penulisan tesis ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghormatan kepada Bapak Dr. Jossy P. Moeis selaku pembimbing yang telah memberikan koreksi, arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Dr. Rusman Heriawan selaku Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah memberikan Izin Belajar di Program Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Indonesia.
2. Dr. Arindra A. Zainal selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Indonesia merangkap sebagai Ketua Penguji atas saran dan koreksinya.
3. Dr. Sugiharso Safuan selaku dosen penguji atas masukan-masukannya yang memperkaya pembahasan tesis ini.
4. Teman-teman di Direktorat Neraca Konsumsi, Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) terutama Bapak Sodikin, Bapak Uzair, Bapak Aden Gultom, Bapak Pipiet dan Bapak Puji yang telah memberikan motivasi, bantuan dalam penyediaan dan pengolahan data serta pendalaman materi yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.
5. Teman-teman angkatan 2006 Program Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Indonesia, terutama saudara Irwan, Sulton, Farid dan Desmon yang telah banyak membantu dan memberikan saran dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa “tiada gading yang tak retak” dan karya ini pun mungkin masih memiliki kekurangan. Namun penulis telah berusaha untuk menyelesaikannya dengan segenap kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dan berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Depok, Juli 2008

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK TESIS	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kerangka pemikiran	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	
2.1 Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Pendidikan	9
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.2 Permasalahan Ketenagakerjaan.....	12
2.1.3 Pendidikan	22
2.2 Hubungan Antara Anggaran Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan	23
2.3 <i>Social Accounting Matrix</i> (SAM)	27
2.3.1 Klasifikasi Tabel SAM	32
2.3.2 Matriks Pengganda dan Analisis SPA	33
BAB III. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL	
3.1 Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	37
3.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	46

	Halaman
3.2.1 Pemerataan dan Perluasan Akses	46
3.2.2 Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing	48
3.3 Program Pendidikan Menengah.....	50
3.3.1 Pemerataan dan Perluasan Akses	50
3.3.2 Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing	51
3.4 Program Pendidikan Tinggi	54
3.4.1 Pemerataan dan Perluasan Akses	54
3.4.2 Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing	55
3.5 Strategi Pembiayaan.....	57
3.5.1 Memperjelas Pemihakan terhadap Masyarakat Miskin...	59
3.5.2 Penguatan Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan	60
3.5.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Depdiknas	62
 BAB IV. ANALISIS HASIL	
4.1 Penyusunan SAM Pendidikan Indonesia Tahun 2006	67
4.2 Analisis Deskriptif SAM Indonesia Tahun 2006.....	69
4.3 Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga	73
4.4 Simulasi Subsidi Pendidikan	74
4.4.1 <i>Structural Path Analysis</i>	74
4.4.2 Simulasi.....	76
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	84
 DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tenaga Kerja menurut Pendidikan Tahun 2003 dan 2006.....	5
Tabel 2.1 Tingkat Pertumbuhan GNP Riil Per Kapita Periode 1980-1990, 1985-1994 dan 1996-1997.....	12
Tabel 2.2 Kerangka Dasar SAM	29
Tabel 3.1 Skenario Pendanaan Pendidikan	63
Tabel 3.2 Biaya Satuan Pendidikan Total (BSPT) Masing-Masing Sekolah Tahun 2005 (Rupiah)	64
Tabel 3.3 Skenario Pendanaan Pendidikan di Bawah Depdiknas (Triliun Rupiah)	65
Tabel 3.4 Perkiraan Yang Mungkin Dipenuhi oleh Masyarakat dan Bantuan Luar Negeri (Triliun Rupiah)	65
Tabel 4.1 SAM Indonesia 2006 (13 x 13) (Triliun Rupiah)	70
Tabel 4.2 Pendapatan Golongan Rumah Tangga Sebelum dan Sesudah Pertumbuhan Ekonomi 1 persen	71
Tabel 4.3 Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja jika Pertumbuhan Ekonomi Naik 1 Persen	72
Tabel 4.4 Perkiraan Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Tahun 2007-2009 (Milyar Rupiah)	74
Tabel 4.5 Pendapatan Golongan Rumah Tangga Sebelum dan Sesudah Subsidi Pendidikan Secara Merata	78
Tabel 4.6 Pendapatan Golongan Rumah Tangga Sebelum dan Sesudah Subsidi Pendidikan untuk Rumah Tangga Golongan Bawah	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Siklus Peningkatan Anggaran Pendidikan	7
Gambar 2.1 Transaksi Ekonomi Antara Agen di dalam Sebuah Perekonomian	30
Gambar 2.2 Jalur Dasar	34
Gambar 2.3 Sirkuit	35
Gambar 4.1 Alur Subsidi Pendidikan 2009 Proporsional.....	75
Gambar 4.2 PATH Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga dari Dampak Subsidi Pendidikan	76



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia, 2005 (13 x 13) (Milyar Rupiah)	87
Lampiran 2 Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia 2006 (13 x 13) (Milyar Rupiah)	88
Lampiran 3 Klasifikasi Sektor SAM Indonesia 2006	89
Lampiran 4 Tabel SAM Indonesia Tahun 2006 (43 x 43) (Milyar Rupiah)	90
Lampiran 5 Matrik Multiplier dari SAM Indonesia Tahun 2006	95
Lampiran 6 Simulasi Dampak Pertumbuhan Ekonomi.....	100
Lampiran 7 Simulasi Dampak Subsidi Pendidikan Secara Merata Terhadap Rumah Tangga.....	101
Lampiran 8 Simulasi Dampak Subsidi Pendidikan Untuk Rumah Tangga Golongan Bawah.....	102
Lampiran 9 Simulasi Dampak Kebutuhan Tenaga Kerja Akibat Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi	103
Lampiran 10 Jalur Utama Pengaruh Subsidi Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Hasil Pengolahan SPA	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan nasional atau regional yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah dihasilkan oleh kegiatan sektor produksi yang menggunakan input berupa tenaga kerja dan modal. Sebagai akibatnya, pemilik tenaga kerja mendapatkan upah dan gaji sebagai balas jasa dari faktor tenaga kerja yang diberikan sedangkan pemilik modal (kapital) mendapatkan sewa dan surplus usaha sebagai balas jasa kepemilikan modal tersebut.¹

Keterkaitan antara sektor produksi dan tenaga kerja diawali dari adanya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat baik berupa kebutuhan terhadap pangan, sandang maupun papan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut mendorong sektor produksi untuk dapat menghasilkan berbagai output atau produk yang diminta oleh masyarakat dan untuk menghasilkan output tersebut, sektor produksi membutuhkan faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal, selain kebutuhan terhadap bahan baku (input). Dalam teori ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai akibat adanya permintaan (*derived demand*) terhadap faktor-faktor produksi oleh sektor-sektor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Dalam siklus perekonomian selanjutnya, pendapatan yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (disebut juga sebagai pendapatan faktorial) dibawa ke masing-masing institusi dari mana faktor-faktor produksi tersebut berasal, seperti rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Pendapatan yang diterima oleh masing-masing pelaku ekonomi tersebut, selanjutnya dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka dan sisanya ditabung untuk pembentukan modal atau investasi. Khusus pendapatan faktorial yang diterima rumah tangga akan memberikan kontribusi bagi pendapatan rumah tangga dan ini akan mempengaruhi distribusi pendapatan rumah tangga.

Rumah tangga yang memiliki faktor-faktor produksi yang relatif banyak akan menerima pendapatan yang lebih besar dari pada mereka yang memiliki faktor-faktor produksi yang relatif terbatas. Hal ini menyebabkan tingkat pengeluaran yang berbeda

¹ Todaro, M. 2000, *Economic Development*. Seven Edition. Addison-Wesley Longman, Inc, London

sehingga menimbulkan apa yang disebut sebagai pola pengeluaran rumah tangga, yang memberikan gambaran mengenai pengeluaran rumah tangga menurut berbagai komoditas dan tabungan.

Pada sisi lain, masalah-masalah pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan, dan pengangguran merupakan masalah-masalah yang perlu diperhatikan secara seksama dalam pembangunan ekonomi. Hasil penelitian Todaro (1987) tentang pengalaman negara-negara berkembang yang berorientasi pada kebijakan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pada satu sisi, pertumbuhan ekonomi memang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi pada sisi yang lain juga menimbulkan masalah ketidakmerataan pendapatan dan pengangguran. Kondisi ini tidak mustahil dialami juga di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang.²

Pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang paling ditakutkan oleh para pekerja. Pada awalnya ketakutan ini hanya dirasakan terutama oleh para pekerja tidak terdidik (*unskilled labor*) di sektor konstruksi dan bangunan, industri padat karya seperti tekstil dan sepatu, yang memang rawan krisis dan rentan terhadap PHK secara sepihak. Namun ternyata dalam perkembangannya, hampir semua pekerja di sebagian besar sektor usaha terkena *stress*, yang disebabkan oleh perubahan teknologi di setiap sektor kegiatan ekonomi dan rendahnya tingkat perkembangan ekonomi.

Dengan pemahaman seperti itu, penelitian yang mengaitkan masalah pertumbuhan ekonomi dengan ketenagakerjaan (*employment*) dan distribusi pendapatan perlu dilakukan. Dengan demikian, hasil penelitian yang memperhatikan keterkaitan ketiga hal tersebut: perkembangan kinerja ekonomi dan sosial seperti pola penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan tenaga kerja maupun distribusi pendapatan rumah tangga dapat menghasilkan temuan yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya. Hal ini diperlukan karena perencanaan pembangunan yang memberikan fokus perhatian terhadap ketiga aspek tersebut akan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memberikan kesempatan kerja yang luas kepada masyarakat melalui penyebaran hasil-hasil pembangunan secara lebih merata.

² Sumitro Dj. (1991). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Untuk menganalisis lebih lanjut masalah ketenagakerjaan di Indonesia harus memperhatikan perkembangan struktur dan kualitas tenaga kerja karena kedua faktor ini turut mempengaruhi stabilitas dan kecepatan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi. Kebutuhan angkatan kerja dari segi jumlah dalam proses pembangunan ekonomi tidak terlalu menjadi masalah bagi Indonesia karena jumlahnya yang relatif banyak. Sebaliknya, kebutuhan akan tenaga kerja berkualitas cukup sulit mengingat mutu angkatan kerja yang relatif masih rendah. Namun demikian, kondisi ini sedikit membaik dimana proporsi penggunaan faktor produksi tenaga kerja baik dari segi jumlah maupun mutunya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejalan dengan tuntutan pembangunan ekonomi yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan penyediaan tenaga kerja berkualitas.

Perkembangan angkatan kerja tidak terlepas dari perkembangan penduduk itu sendiri. Dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi, penduduk memegang peranan penting karena di samping sebagai konsumen, penduduk juga bertindak sebagai produsen dan pengelola pembangunan yang sangat menentukan arah perkembangan ke depan. Penduduk sebagai produsen akan berusaha untuk bertindak rasional dengan memaksimalkan produktivitas sehingga balas jasa yang diterima menjadi optimal.

Melihat kondisi ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan nasional. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menetapkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan mendapat alokasi minimal 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).³ Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN/APBD. Namun demikian, sampai saat ini pemerintah pusat belum mengalokasikan 20 persen dana APBN untuk pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Sedangkan untuk pemerintahan daerah, ada beberapa daerah khususnya daerah kaya yang sudah memenuhi amanat undang-undang tersebut, namun sebagian besar daerah belum memenuhinya.

³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Departemen Pendidik Nasional 2004-2009

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah mengalokasikan dana APBN dalam bentuk subsidi pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Untuk mengetahui dampak subsidi ini, perlu dilakukan studi yang mendalam untuk melihat dampaknya terhadap peningkatan tingkat pendidikan pekerja dan distribusi pendapatan rumah tangga.

1.2 Perumusan Masalah

Kinerja ekonomi suatu negara dapat ditunjukkan oleh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai kegiatan produksi di berbagai sektor ekonomi yang memberikan gambaran mengenai besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga faktor (*at factor costs*) pada suatu tahun tertentu. PDB atau nilai tambah yang diciptakan oleh berbagai sektor ekonomi ini selanjutnya diterima oleh faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kapital. Alat analisis yang dapat menangkap hubungan di atas dikenal dengan *Social Accounting Matrix* (SAM) atau Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Dalam SAM, dapat dilihat alokasi nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi ke faktor-faktor produksi sebagai balas jasa dari penggunaan faktor-faktor produksi. Dalam hal ini, upah dan gaji merupakan balas jasa bagi penggunaan faktor produksi tenaga kerja sedangkan keuntungan, dividen, bunga, dan sewa sebagai balas jasa bagi penggunaan faktor produksi kewirausahaan, kapital, dan barang modal lainnya. Dengan tabel SAM dapat juga dilihat, institusi mana yang menikmati nilai tambah tersebut. Alat analisis ini juga berguna untuk melihat banyaknya tenaga kerja yang bekerja di masing-masing sektor ekonomi serta besarnya tingkat upah yang mereka peroleh.

Data tenaga kerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan menunjukkan telah terjadi perubahan penyerapan tenaga kerja oleh sektor produksi. Pada tahun 2006, jumlah tenaga kerja yang terserap dalam seluruh aktivitas kegiatan ekonomi mencapai 95,2 juta pekerja. Nilai tersebut naik sebesar 2,9 persen jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang terserap pada tahun 2003, yaitu sebesar 92,5 juta pekerja. Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pekerja, maka pertumbuhan penyerapan tenaga kerja menurut pendidikan tertinggi terjadi ditingkat tenaga kerja berpendidikan akademi dan diploma, dengan pertumbuhan sebesar 43,8 persen yang diikuti oleh pekerja berpendidikan S1 ke atas dimana penyerapan tenaga kerjanya meningkat sampai 39,5 persen. Untuk pekerja dengan tingkat pendidikan sekolah menengah, tingkat penyerapannya

meningkat 5,47 persen. Sedangkan untuk pekerja berpendidikan SD ke bawah, penyerapan tenaga kerjanya turun sebesar 1,85 persen.

Tabel 1.1 Tenaga Kerja menurut Pendidikan Tahun 2003 dan 2006

Klasifikasi Tenaga Kerja	Tenaga Kerja (pekerja)		Pertumbuhan Tenaga Kerja (%)
	2006	2003	
SD ke Bawah	51.981.394	52.959.523	(1,85)
Sekolah Lanjutan	37.287.970	35.353.187	5,47
Akademi/Diploma	2.568.438	1.785.926	43,82
S1 ke Atas	3.386.260	2.427.468	39,50
Total	95.224.062	92.526.104	2,92

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kondisi di atas menunjukkan bahwa dunia usaha dalam kurun waktu 2003 -2006 lebih membutuhkan tenaga kerja berpendidikan diploma/akademi ke atas dibandingkan dengan tenaga kerja yang berpendidikan sekolah menengah ke bawah. Hal ini terjadi sejalan dengan meningkatnya perubahan teknologi yang terjadi di dunia usaha, di mana kegiatan usaha lebih cenderung menggunakan teknologi informasi dan mesin yang membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tinggi. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dalam kurun periode yang sama dimana ekonomi tumbuh sebesar 17,1 persen, maka pertumbuhan pekerja berpendidikan S1 ke atas yang sebesar 39,5 persen menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan memerlukan pekerja dengan tingkat pendidikan S1 ke atas sampai 2,3 persen.

Sampai saat ini wajib belajar yang menjadi program pemerintah baru sampai pada wajib belajar 9 tahun, atau sampai pada tingkat SLTP. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah hanya mendorong penciptaan pekerja sampai di tingkat pendidikan menengah. Sedangkan untuk sampai pada penciptaan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan diploma ke

atas, pemerintah menyerahkan kepada kemampuan masyarakat sendiri. Namun, perkembangan biaya pendidikan yang terjadi belakangan ini meningkat cukup tajam dan pada sisi lain jumlah penduduk miskin terus bertambah, sehingga menjadi sulit bagi masyarakat untuk dapat menyiapkan tenaga kerja terdidik yang makin diperlukan dalam dunia usaha.

Kenyataan tersebut mendorong penulis untuk melakukan analisis seberapa besar pengaruh subsidi pendidikan bagi peningkatan tenaga kerja terdidik (diploma ke atas) dan berapa besar subsidi tersebut harus diberikan. Analisis pengaruh subsidi dilakukan dengan melihat dampak peningkatan anggaran terhadap tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia dengan menggunakan SAM Indonesia tahun 2006. Penggunaan SAM ini didasari bahwa SAM dapat digunakan untuk mentransformasi perubahan alokasi anggaran pendidikan yang diluncurkan oleh pemerintah, serta melihat dampak dari perubahan anggaran pendidikan terhadap peningkatan kemampuan tenaga kerja Indonesia yang pada akhirnya akan berdampak pula pada aktivitas ekonomi dan pendapatan institusi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari tesis ini adalah untuk melihat dampak kenaikan alokasi subsidi pendidikan dalam APBN terhadap tingkat pendidikan dan distribusi pendapatan rumah tangga dengan pendekatan model SAM Indonesia tahun 2006. Dengan menggunakan model SAM yang merupakan model keseimbangan umum dapat dilakukan analisis *comparative static* untuk menganalisis tujuan di atas.

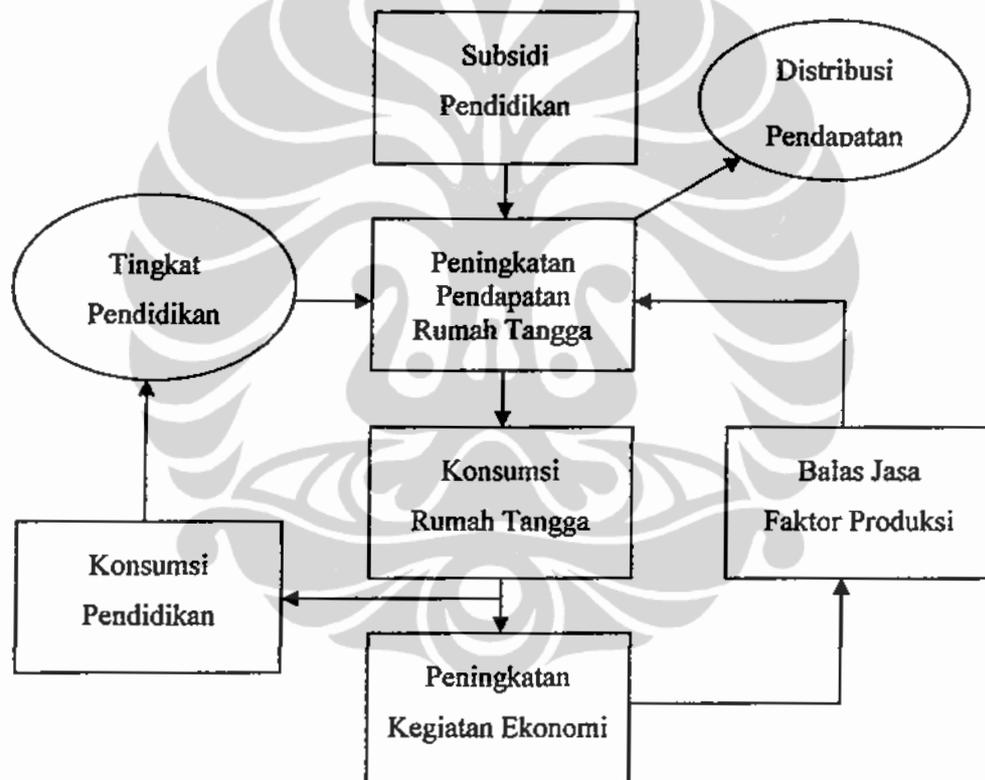
Berdasarkan tujuan utama di atas, beberapa tujuan khusus dari tesis ini meliputi:

- a. Penyusunan Tabel *Social Accounting Matrix* Indonesia 2006
- b. Analisis deskriptif Tabel *Social Accounting Matrix* Indonesia 2006.
- c. Menganalisis hasil simulasi dampak pertumbuhan ekonomi terhadap tenaga kerja menurut pendidikan dan distribusi pendapatan rumah tangga dengan menggunakan Tabel SAM Pendidikan 2006.
- d. Menganalisis hasil simulasi dampak subsidi pendidikan terhadap tingkat pendidikan dan distribusi pendapatan rumah tangga dengan menggunakan Tabel SAM Pendidikan 2006.
- e. Menganalisis alur subsidi pendidikan dengan menggunakan *Structural Path Analysis* (SPA).

1.4 Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini merujuk pada sifat hubungan antar sektor yang ada di dalam SAM (lihat Gambar 1.1). Apabila anggaran pendidikan naik, maka rumah tangga akan mendapat subsidi karena pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan menjadi menurun, dengan demikian tingkat pendapatan masyarakat secara tidak langsung meningkat. Bersamaan dengan peningkatan pendapatan tersebut, kualitas pendidikan tenaga kerja akan meningkat sehingga perekonomian dapat memberikan penyediaan (*supply*) pekerja dengan

Gambar 1.1 Siklus Peningkatan Anggaran Pendidikan



Sumber: Penulis

tingkat pendidikan yang tinggi. Sebagai akibatnya, tingkat produktifitas tenaga kerja juga meningkat dan akhirnya output perekonomian semakin meningkat. Peningkatan output

perekonomian ini akan meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan balas jasa tenaga kerja dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.⁴

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terbagi dalam 5 bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan gambaran mengenai latar belakang masalah yang diangkat dalam penelitian, formulasi permasalahan yang akan menjadi kajian, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran. Selanjutnya pada bab dua berisi tinjauan teoritis yang menjelaskan berbagai konsep yang terkait dengan teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan pendidikan serta distribusi pendapatan. Pada bab ini juga akan dipaparkan berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan maksud dan tujuan dari tesis ini.

Kemudian pada bab tiga berisi uraian mengenai gambaran singkat tentang kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama tahun 2005-2009. Sedangkan uraian mengenai runtun penyusunan SAM Pendidikan 2006, analisis deskriptif dan analisis simulasi kebijakan pendidikan 2007-2009 dijelaskan pada bab empat. Akhirnya bab lima menyajikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran kebijakan.

⁴ Keuning, S.J. and Willem de Ruijter. (1990). *The Sosial Accounting Framework: Outline of Construction Stages and Organization of Work*. Dalam J. Alarcon, J.v. Heemst, S. Keuning, W.de Ruijter and R. Vos (eds.), *The Social Accounting Framework for Development: Concepts, Construction and Applications*. Avebury: 191-221.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

Pekembangan perekonomian suatu wilayah dicerminkan dari meningkatnya kapasitas produksi barang dan jasa yang ditunjukkan oleh besaran nilai pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kapasitas produksi berkaitan secara langsung dengan adanya peningkatan kebutuhan faktor produksi sebagai input dari kegiatan produksi tersebut. Salah satu kebutuhan faktor produksi yang meningkat adalah jumlah pekerja. Peningkatan jumlah pekerja menurut tingkat pendidikan mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, dimana saat ini berkembang ke arah pekerja dengan tingkat pendidikan tinggi. Hal ini merupakan cerminan dari perubahan teknologi yang terjadi.

Pada bab ini dijelaskan kaitan antara pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan pendidikan. Disamping itu, dijelaskan juga suatu alat analisis yang biasa digunakan dalam melihat pola hubungan antar ketiga aspek tersebut, yaitu *Social Accounting Matrix* (SAM).

2.1 Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Pendidikan

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Sebelum melihat gambaran pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang perlu dilihat berbagai teori yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, karena berdasarkan teori-teori tersebut dapat dilihat berbagai aspek yang mendasari terjadinya pertumbuhan ekonomi dan beberapa faktor penting untuk dapat dikaji lebih lanjut. Seperti diketahui, pengukuran pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teori dan alat analisis. Oleh sebab itu, pemahaman teori-teori pertumbuhan ekonomi menjadi sangat berguna dalam menganalisis permasalahan pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi diawali dengan suatu teori yang dikenal sebagai teori ekonomi klasik yang tertuang dalam buku '*The Wealth of Nations*' karya Adam Smith (1776). Buku tersebut menjelaskan sebab-sebab dan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi.⁵

Dalam teori ekonomi klasik disebutkan ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: (i) jumlah penduduk, (ii) jumlah stok barang-barang modal, (iii) luas tanah dan kekayaan alam, dan (iv) teknologi yang digunakan. Berdasarkan teori

⁵ Djoyohadikusumo, S., (1991). Perkebangan Pemikiran Ekonomi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

ini hubungan jumlah penduduk dan jumlah kekayaan alam harus dilihat dalam keseimbangan. Disamping itu, teori ini juga menjelaskan bahwa suatu masyarakat dapat menuju pada keadaan tidak berkembang (*stationary state*) yang berdampak pada pendapatan pekerja yang hanya mencapai tingkat cukup hidup (*subsistence*). Salah satu teori ekonomi klasik menjelaskan kaitan antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk yakni "teori penduduk optimal" dimana apabila terdapat kekurangan penduduk, maka produksi marginal akan lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Sebaliknya, apabila penduduk sudah semakin banyak, maka nilai tambah akan semakin berkurang dan akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mulai menurun.

Teori pertumbuhan ekonomi yang lain dikemukakan oleh Harrold-Domar (1807) yang menjelaskan syarat yang harus dipenuhi agar perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh (*steady growth*) dalam jangka panjang yaitu (i) barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (ii) tabungan adalah proporsional terhadap pendapatan nasional, (iii) rasio modal terhadap produksi (*capital output ratio*) tetap, dan (iv) perekonomian terdiri dari dua sektor.

Teori di atas merupakan perluasan dari analisis Keynes yang menjelaskan apabila ada pertambahan pengeluaran agregat (misalnya pertambahan investasi) maka pendapatan nasional akan bertambah. Besarnya pertambahan pendapatan nasional tergantung kepada *multiplier* dan pertambahan pengeluaran agregat atau investasi tersebut. Dalam perekonomian keseimbangan dicapai apabila $S=I$ (*Saving = Investment*). Pada akhirnya formulasi teori Harrold-Domar menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi sama tingkatnya dengan kecenderungan menabung (*marginal propensity to save*) dibagi dengan rasio kebutuhan modal terhadap output.

Teori lain dikemukakan oleh Schumpeter (1934) yang menekankan pentingnya peranan pengusaha di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Menurut Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu perekonomian makin terbuka kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Berbeda dengan pandangan klasik, dalam pandangan Schumpeter tingkat keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pembangunan yang tinggi.⁶

Sementara itu, teori pertumbuhan Neo-klasik yang dikembangkan oleh Abramavits dan Solow (1956) melihat dari segi penawaran. Teori ini muncul karena teori-teori sebelumnya lebih banyak fokus pada segi permintaan. Teori pertumbuhan Neo-klasik

⁶ Sumitro D. (1991). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Jadi pada hakekatnya tingkat ekonomi tergantung kepada (i) penambahan modal dan produktivitas modal *marginal*, (ii) penambahan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja *marginal*, (iii) perkembangan teknologi.

Dari uraian mengenai teori-teori pertumbuhan di atas dapat diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan gambaran upaya bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tentunya diharapkan dalam suatu negara dapat dicapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan ideal. Setelah diuraikan berbagai teori tentang pertumbuhan ekonomi selanjutnya diuraikan sisi empiris dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada negara-negara berkembang.

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan salah satu indikator yang berkaitan dengan tingkat perkembangan ekonomi suatu negara. Seperti diketahui bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan pendapat nasional (GNP) di banyak negara dunia ketiga lebih rendah dibandingkan tingkat pertumbuhan yang dicapai oleh negara-negara maju. Negara-negara dunia ketiga pada umumnya mengalami kemerosotan pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam selama dasawarsa 1980-an. Tabel 2.1 memberikan gambaran tentang tingkat pertumbuhan ekonomi per kapita di beberapa negara berkembang dari tahun 1980 hingga tahun 1997. Dari tabel tersebut nampak terjadi variasi tingkat pertumbuhan ekonomi pada beberapa negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin. GDP riil per kapita mereka turun 0,2 persen pada tahun 1990, dan hal itu terjadi lagi pada tahun 1991. Meskipun sejumlah negara dari Benua Asia masih tetap mengalami pertumbuhan positif selama dekade 1980-an, pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Amerika Latin dari Karibia secara keseluruhan merosot hingga 0,2 persen pada periode 1980-1992 sedangkan pertumbuhan ekonomi negara-negara Afrika bahkan turun hingga sebesar 0,8 persen dalam periode yang sama.

Tabel 2.1 Tingkat Pertumbuhan GNP Riil Per Kapita Periode 1980-1990, 1985-1994 dan 1996-1997

Negara	Tahun 1980-1990	Tahun 1985-1994	Tahun 1996-1997
Afrika			
Kenya	0,3	0,0	0,4
Nigeria	-3,0	1,2	2,1
Tanzania	-0,7	1,1	1,2
Uganda	0,8	3,0	3,0
Zaire	1,5	-0,8	-
Asia			
Bangladesh	1,0	2,1	4,6
India	3,2	2,9	4,3
Indonesia	4,1	6,0	2,6
Filipina	-1,5	1,8	3,0
Korea Selatan	8,9	7,8	3,9
Sri Langka	2,4	2,8	5,9
Amerika Latin			
Brasil	0,6	-0,4	1,9
Kolombia	1,1	1,9	1,2
Guatemala	-2,1	0,9	1,8
Meksiko	-0,9	0,6	6,3
Peru	-2,0	-2,5	5,4
Venezuela	-2,0	0,6	5,2

Sumber : Diolah dari publikasi United Nation

Pada kenyataannya selama dekade 1980-an dan awal dasawarsa 1990-an, kesenjangan pendapatan (*income gap*) antara negara kaya dan miskin semakin lebar. Melebarnya kesenjangan pendapatan ini berlangsung dalam kecepatan yang sangat tinggi, dan tertinggi selama tiga dekade terakhir. Berbagai dampak negatif dari semakin melebarnya kesenjangan pendapatan antar negara itu sendiri sangat mengejutkan. Sebagai contoh, kita dapat meninjau tingkat pendapatan dari 20 persen penduduk dunia yang paling kaya serta membandingkannya dengan pendapatan 20 persen penduduk dunia yang paling miskin. Rasio pendapatan ini pada tahun 1960 baru mencapai 30:1 (artinya pendapatan mereka yang terkaya 30 kali lipat lebih besar daripada pendapatan mereka yang paling miskin), namun pada akhir tahun 1991 perbandingan ini telah berubah menjadi 61:1 (pendapatan 20 persen yang paling kaya 61 kali lipat lebih besar daripada pendapatan 20 persen penduduk dunia yang paling miskin).

2.1.2 Permasalahan Ketenagakerjaan

Konsepsi pemikiran dan bahkan paradigma pembangunan ekonomi selama kurun waktu setengah abad, khususnya dalam 20 tahun terakhir ini, telah mengalami banyak perubahan secara mendasar melalui proses dinamika-evolutif dari waktu ke waktu. Terjadinya perubahan tersebut disebabkan selain karena sistem-sistem ekonomi, sosial, politik dan yang

menyangkut aspek fisik ekosistem yang berkaitan dengannya banyak mengalami perubahan-perubahan, tetapi juga karena terjadinya perubahan-perubahan dalam kerangka berfikir yang didorong oleh pengalaman-pengalaman. Dalam pelaksanaan pembangunan telah banyak terjadi kekecewaan-kekecewaan, khususnya yang menyangkut kemampuan peramalan dari konsepsi pembangunan lama untuk meramalkan kejadian yang akan terjadi dimasa depan. Paradigma lama sudah tidak mampu lagi untuk digunakan sebagai alat analisis yang baik dalam mencapai sasaran-sasaran yang sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan.

Dalam kasus pembangunan *spatial* (keruangan), terutama yang berkaitan dengan konsep pembangunan yang mendahulukan pertumbuhan ekonomi melalui kutub-kutub pertumbuhan, semula meramalkan bakal terjadinya "penetesan" pendapatan (*trickle down effect*) dari kutub-pusat pertumbuhan tersebut ke wilayah-wilayah belakangnya (*hinterland*). Akan tetapi kerangka berfikir tersebut menimbulkan *net-effect* yang mengarah kepada pengurasan besar-besaran (*massive backwash effect*) dari wilayah belakang (perdesaan) ke pusat pertumbuhan di kota-kota besar. Dalam konteks pembangunan wilayah di Indonesia, terjadi suatu kondisi yang berkaitan dengan ekonomi yang menyebabkan transfer neto sumber daya dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan secara besar-besaran. Kondisi ini digambarkan sebagai gejala *urban bias* oleh Lipton (1977).

Dalam hubungan ini, Lipton selanjutnya mencoba untuk meyakinkan bahwa:

"many of the resources were allocated by state action to city-dwellers would have earned a higher return in rural areas; that private individuals, furthermore, were indirectly induced by administrative decisions and price distortions to transfer from countryside to town their own resources, thereby reducing the social (but increasing the private) rate of return upon those as well; and that, ultimately, inadequate inputs of rural resources substantially reduced even the efficient use of urban resources" (Lipton 1977).

Beberapa hasil analisis dan ramalan yang memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan seperti itu, secara umum telah mengarah kepada penyimpangan yang menyesatkan (*misleading policy*) yang berdampak pada semakin jauhnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan semula. Akibat dari kebijakan salah arah ini, menimbulkan berjuta-juta orang miskin terutama kehidupan masyarakat kecil yang lemah (Serageldin, 1996). Kegagalan dari konsepsi pembangunan lama, yang memberikan kebijakan salah arah ini terutama terletak dalam beberapa asumsi yang ditanamkan dalam teori, yang tidak realistis dengan apa yang terjadi di dunia nyata (*the real world situation*).

Kegagalan ini khususnya banyak terjadi dan diderita oleh negara-negara berkembang termasuk di Indonesia.

Secara konseptual tujuan pembangunan, tidak hanya sekedar mengejar perubahan kekayaan material dan instutional yang bersifat incremental saja, melainkan juga melakukan perubahan paradigma yang mendasar melalui suatu proses yang dikenal sebagai proses "meta-modeling". Dalam proses meta-modeling ini dilakukan penelusuran tidak hanya menyangkut aspek-aspek yang dapat dikukur secara sederhana (*superficial*) tetapi juga dilakukan penelusuran secara lebih mendalam dan holistik terhadap aspek hubungan-hubungan sosial dan kultural yang berkaitan dengan asal-usul (epistimologi) ilmu yang mendasarinya. Hasil dari proses ini menunjukkan bahwa beberapa aspek pembangunan yang tadinya dianggap baik, menjadi dianggap buruk dan sebaliknya.⁷

Sebagai contoh, empatpuluh tahun yang lalu, di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang baru memulai upaya-upaya pembangunan ekonomi, konsep peranan sektor pemerintah yang kuat dianggap baik. Hal ini disebabkan pada saat tersebut kondisi ekonomi beresiko tinggi dan penuh ketidakpastian (hiper-inflasi, hutang luar negeri, dan kekurangan kapital, pengangguran massal dan sebagainya) sehingga sulit untuk bertopang pada pihak swasta untuk dapat menggerakkan perekonomian melalui investasi. Oleh sebab itu, hanya pemerintah yang mampu memulai kegiatan ekonomi dengan melakukan investasi dalam pembangunan ekonomi dengan menggunakan sumber dana yang berupa bantuan dan hutang luar negeri. Konsep pentingnya peranan pemerintah dalam mendorong laju pembangunan ekonomi didukung oleh pendapat ekonom Keynesian yang meyakini terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) pada aktivitas ekonomi.

Setelah kebijakan peranan pemerintah yang besar dilaksanakan, dimana ukuran (volume) ekonomi nasional masih kecil (PDB dan lapangan kerja), kerja sama antara pihak swasta dengan jaminan pemerintah dianggap baik karena akan mengurangi resiko kegagalan usaha (swasta). Akan tetapi, setelah ukuran ekonomi menjadi semakin besar, kelompok swasta yang dibantu oleh pemerintah juga menjadi besar, sehingga kerjasama yang meliputi volume kegiatan diversifikasi industri semakin besar dan jaringan yang diciptakan tidak hanya bersifat lokal dan nasional, tetapi juga internasional, maka pihak pemerintah akhirnya sudah tidak mampu lagi mengendalikan tindakan-tindakan (perilaku) pihak swasta.

⁷ Todaro, M. 2000, *Economic Development*. Seven Edition. Addison-Wesley Longman, Inc, London

Keadaan kultural kita (*praiyisme*) yang lemah, tidak memungkinkan lembaga organisasi pemerintah untuk dapat mengontrol perilaku pihak swasta yang semakin kuat, melalui pengawasan dan pengaturan melalui undang-undang yang efektif. Keadaan ini mengarah kepada timbulnya perilaku ekonomi pihak swasta besar (konglomerat) yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha swasta yang dijamin oleh pemerintah ini pada akhirnya banyak mengalami kegagalan, karena manfaat keuntungan proyek-proyek mereka relatif kecil (*profitability* rendah) dan kalah bersaing dengan industri di luar negeri.

Krisis moneter yang terjadi memicu besarnya hutang-hutang luar negeri swasta jangka pendek yang diselewengkan oleh pihak swasta dan kondisi ini tidak dapat dikendalikan lagi oleh pemerintah. Oleh karena itu, maka dalam membangun paradigma baru, sekarang dipertanyakan siapa sebenarnya yang disebut pemerintah tersebut?. Ternyata dalam prakteknya para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab dan semestinya mewakili 'kepentingan (organisasi) negara' tersebut diwakili oleh oknum-oknum yang berperilaku seperti swasta juga, yang cenderung mengarah kepada mendahulukan kepentingan dirinya sendiri atau kelompok/golongan, daripada kepentingan umum. Sehingga perilaku swasta disamping mudah menyebabkan terjadinya kegagalan pasar (*market failure*), maka juga terjadi kegagalan kebijaksanaan pemerintah (*government policy failure*).

Kegagalan pemerintah ini dampaknya seringkali lebih parah dari dampak kegagalan pasar (swasta), karena para pejabat pemerintah mempunyai wewenang dan kekuasaan yang berkaitan dengan tugasnya. Kekuasaan secara ekonomi, pada dasarnya mengandung surplus keuntungan yang disebut rente ekonomi (*economic rent*), yang cenderung menghambat terhadap terjadinya perubahan-perubahan dinamik yang diperlukan guna melakukan penyesuaian-penyesuaian ekonomi (*economic adjustment*). Pada akhirnya perilaku para pejabat pencari rente (*rent seekers*) ini akan merugikan kepentingan masyarakat keseluruhan. Oleh karena itu peranan lembaga pemerintah yang tadinya dianggap (diasumsikan) sebagai '*the benevolent institution*', sekarang sering dipandang sebagai '*the predatory institution*', karena banyak menciptakan biaya-biaya transaksi tinggi (termasuk biaya-biaya negosiasi, kontrak, monitoring dan *enforcement*) yang pada akhirnya menurunkan efisiensi terhadap kinerja ekonomi dan pada gilirannya menghambat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi keseluruhan.

Perilaku pihak yang mewakili kepentingan pemerintah ini dapat diperparah lagi, terutama pada keadaan kultur priayi yang mendominasi sebagian besar masyarakat Indonesia, dan karenanya tidak mempunyai kemampuan kapasitas memerintah yang baik (*lack of good governance*). Oleh karena itu menurut paradigma pembangunan yang sekarang, kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pada bidang dan kegiatan yang disebut bidang yang memproduksi pelayanan umum (*public goods*) serta bidang-bidang kegiatan dimana kaum swasta dan organisasi masyarakat lainnya tidak mempunyai insentif untuk melakukannya .

Dalam pengertian pembangunan juga melibatkan perubahan kuantitatif maupun kualitatif yang bersifat multi-dimensi dan menjangkau perubahan besar kearah terjadinya keadaan yang sering tidak dapat pulih dari keadaan semula (*irreversibly*), sehingga sangat sulit didefinisikan pengertiannya (Hicks, 1957). Namun dalam sejarah dan perkembangan strategi pembangunan tersebut telah terjadi evolusi perubahan, dimulai dari strategi pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian kepada pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Serta kemudian beralih kepada strategi yang memperhatikan pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan yang terakhir strategi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).⁸

Perubahan strategi yang berjalan secara evolutif dari pengertian pembangunan di atas ke arah yang lebih baik, didasarkan kepada banyak kekecewaan dan hasil umpan balik (*feed back*) dari pelaksanaan pembangunan yang tidak mampu mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pembangunan *spatial* strategi tersebut diterjemahkan sebagai alokasi sumber daya menurut ruang (*spatial order*), khususnya dalam hubungan dengan pembangunan *spatial rural-urban*.

Kekurangan informasi dalam memahami persoalan-persoalan yang timbul untuk memecahkan persoalan yang dihadapi, terutama dengan terjadinya banyak variabel yang sebelumnya tidak diperhitungkan, apalagi dapat diramalkan, tetapi kemudian tiba-tiba muncul menjadi faktor penentu serta mempunyai keterkaitan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dalam hubungan-hubungan yang sangat kompleks. Kompleksitas sistem tersebut mempunyai bentuk hubungan-hubungan yang rumit yang hanya dapat dimodelkan dalam bentuk hubungan-hubungan non-linear dengan mempunyai keterkaitan ke depan (*forward loops*) dan ke belakang (*backward loops*), yang dalam perjalanan

⁸ Todaro, M. 2000, *Economic Development*. Seven Edition. Addison-Wesley Longman, Inc, London.

waktu seperti diperlihatkan oleh kompleksitas sistem seolah-olah mengandung ketidakpastian (*uncertainty*) yang besar. Tetapi secara umum dan populer gejala kompleksitas sistem tersebut dapat dikemukakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang melibatkan segala lapisan masyarakat dan mengalami berbagai perubahan dalam banyak aspek kehidupan manusia yang bertujuan dan memberi harapan kepada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan lebih merata dalam jangka panjang secara berkelanjutan.

Pembangunan yang pada setiap tahapannya mampu menghindari atau mengurangi terjadinya ketidakpastian, akan memerlukan dialog-dialog yang terus menerus antara pemerintah dan perwakilan kelompok-kelompok masyarakat pada berbagai tingkatan, dan diharapkan mampu memecahkan setiap permasalahan pembangunan melalui proses pembentukan konsensus-konsensus, agar hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pada dasarnya, pembangunan tersebut memperhatikan aspek bagaimana pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang berkaitan dengannya seperti perubahan teknologi, institusi (kelembagaan), dan nilai-nilai sosial yang selalu berubah dapat diorganisasikan dengan mengakomodasikan keinginan-keinginan masyarakat ke dalam kebijakan yang berlangsung pada situasi yang semakin kompleks dan dinamik secara terus menerus berubah. Sehingga pengaturan dan kebijakan yang sebelumnya cocok dengan keadaan suatu tahapan pembangunan, kemudian memerlukan reformasi pengaturan dan kebijakan baru yang diperlukan sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi. Sedangkan hasil interaksi antara faktor-faktor fisik, ekonomi dan sosial yang terus berubah setiap tahapannya terus menerus dievaluasi. Untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan seperti itu diperlukan 'kemampuan belajar' (*learning advantage*) melalui proses dialog-dialog yang sering dilakukan, seperti telah dikemukakan di atas.

Dengan demikian, hasil konsensus masyarakat diharapkan akan membuahkan beberapa upaya-upaya pembangunan yang dapat diarahkan kepada peningkatan efisiensi (*efficiency*) yang dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya (*equity*), sehingga mengarah kepada keberlanjutan (*sustainability*). Hasil-hasil konsensus antara berbagai lapisan masyarakat dapat memberi panduan kepada alokasi sumber daya, yaitu sumber daya yang berkaitan dengan semua kapital: *natural capital*, *human capital*, *man-made capital* maupun *social capital*, baik pada tingkatan nasional maupun regional dan lokal. Terjadinya kelangkaan berbagai kapital tersebut pada tiap tingkatan (*level*), sering memerlukan impor sumber daya dari luar, seperti barang-barang modal dan

keterampilan (*skill*) untuk diinvestasikan, guna mempertinggi kemampuan masyarakat lokal dalam mengembangkan infrastruktur pendukung ekonomi, sosial dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada tingkatan regional dan lokal.

Dalam hubungan dengan uraian di atas, pembangunan wilayah dapat diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kepada kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang dalam perwujudannya melibatkan interaksi antara sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya, termasuk sumber daya alam dan lingkungannya melalui berbagai investasi guna memperbesar kapasitas ekonomi lokal. Tindakan ini bertujuan agar kapasitas produksi dan produktivitas masyarakat keseluruhan wilayah nasional (secara agregat) menjadi terus meningkat. Tetapi dalam melakukan berbagai investasi tersebut juga memerlukan pertimbangan kemampuan ekonomi makro nasional (negara) seperti stabilitas moneter, inflasi yang cukup rendah, tersedianya kesempatan kerja, tingkat suku bunga yang tepat dan nilai tukar (*exchange rate*) yang benar (*the right price*) dan keseimbangan perdagangan (*balance of trade*) yang memperbaiki neraca pembayaran. Semua keadaan tersebut diperlukan, untuk dapat menjamin dan menjadi payung pelindung bagi kelancaran program-program pembangunan disemua tingkatan wilayah nasional. Disamping itu diperlukan menciptakan kebijakan insentif (fiskal) yang mampu mendorong, agar kaum swasta dan organisasi sosial lain mau menginvestasikan modalnya di wilayah perdesaan dan memberi kesempatan pengembangan *entrepreneurship* pada masyarakat di wilayah ini.

Dalam hubungan dengan pertumbuhan penduduk di wilayah perdesaan yang melahirkan pertumbuhan angkatan kerja di wilayah ini menurut Boserup (1965) para petani akan meningkatkan investasi dan produktivitasnya didorong oleh pertumbuhan penduduk, asalkan mereka mempunyai akses ke pasar. Jadi ramalan Boserup bertentangan dengan ramalan Malthus yang menyatakan bahwa terjadinya kelaparan disebabkan karena terus bertumbuhnya penduduk yang cepat, sehingga manusia tidak akan mampu memberi makan secara terus menerus. Sebaliknya Boserup percaya bahwa sebenarnya pertumbuhan penduduk tersebut dapat ditampung melalui investasi kearah perbaikan kesuburan lahan dan pembangunan irigasi, yang meningkatkan produktivitas lahan apabila lahan pertanian mempunyai akses yang baik ke pasar. Ramalan Boserup menguraikan secara rinci tentang bagaimana sektor pertanian dan wilayah perdesaan mengalami pertumbuhan ekonomi melalui adopsi teknologi yang dapat mengarah kepada sistem pengelolaan pertanian dengan konservasi, sehingga mengarah kepada berkelanjutan. Namun dari pengalaman terlihat bahwa tidak semua wilayah perdesaan di Indonesia mengalami pertumbuhan

penduduk dengan bertambah baik akses kepada pasar akan dapat mengalami pertumbuhan produktivitas pertaniannya. Hal ini terjadi jika hak-hak (*property right*) sumber daya dasar lahan tersebut tidak didistribusikan secara mencukupi kepada para petani yang mau bekerja dalam melaksanakan usaha taninya.

Proses transformasi struktur ekonomi kearah industrialisasi dan bertumbuhnya sektor-sektor modern (industri dan jasa) dimasa lalu, terlalu dipercepat (*accelerated*) dengan berbagai proteksi pemerintah. Akibatnya mengarah kepada proses yang tidak matang (*immature*), dimana sektor pertanian dan perdesaan kurang mendapat perhatian dalam investasi diberbagai bidang di luar usaha tani. Karena perkembangan sektor industri tersebut ternyata banyak yang kurang atau tidak terkait secara langsung dengan sektor pertanian dan perdesaan. Sebagai akibatnya di sektor pertanian dan perdesaan tidak memberikan tempat untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak, padahal pertumbuhan angkatan kerja disektor tersebut relatif tinggi. Sebagai akibatnya terjadi kelebihan (*excess supply*) tenaga kerja yang kemudian bermigrasi secara eksesif dari perdesaan ke perkotaan yang apabila ukuran kota mengalami '*diseconomies of scale*' kemudian menimbulkan berbagai "penyakit" urbanisasi yang berdampak dan menimbulkan biaya-biaya sosial maupun kerusakan lingkungan hidup. Pertumbuhan sektor industri yang dipacu oleh kebijaksanaan pemerintah, ternyata terlalu bergantung (*over dependent*) kepada kapital dari luar dan mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*). Akibatnya keadaan ekonomi nasional yang terkait dengan ekonomi dunia yang dinamik, kemudian menjadi rentan terhadap resiko-resiko yang suatu waktu menjadi penyebab ambruknya sektor tersebut, seperti sama-sama kita saksikan akhir-akhir ini.

Dengan demikian, ditinjau dari sudut logika pembangunan ekonomi, guna menghindari pengalaman pahit dari yang lalu, maka antara industrialisasi dan urbanisasi harus dianggap tidak mesti mempunyai hubungan yang tidak dapat dihindari. Keduanya tidak harus merupakan unsur yang saling terkait dan tak-terpisahkan satu sama lain, seperti yang diasumsikan dalam paradigma pembangunan ekonomi berdasar teori tradisional. Analisis yang dikemukakan di sini menganut tinjauan aspek spatial yang justru ingin mencari pemecahan, dengan mencari jalur alternatif yang dapat mengarah kepada pembangunan ekonomi. Diharapkan akan ada kemungkinan terjadinya faktor pendorong (*inducement*) yang mampu menggerakkan sistem produksi manufaktur padat karya maupun modern yang berbasis di wilayah perdesaan. Hal ini sebagai alternatif pengganti dari terjadinya proses migrasi tenaga kerja dari perdesaan ke sektor perkotaan. Pada jalur alternatif ini diharapkan akan terjadi penyebaran aktivitas-aktivitas industri di wilayah

perdesaan yang dapat diorganisasikan dengan cara terdesentralisasikan yang memanfaatkan bukan hanya tenaga kerja fisik, tetapi juga dapat menumbuhkan potensi kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*) dari masyarakat perdesaan.

Dua sumber daya di atas kurang dimanfaatkan oleh pemerintah selama ini, terutama dimasa lalu sebelum terjadinya krisis. Strategi pembangunan industrialisasi berbasis di lokasi wilayah pedesaan melalui pembangunan ini jika memungkinkan, bertujuan untuk dapat diwujudkan pemerataan dan menghilangkan kesulitan besar terhadap keadaan dimana sering terjadinya *trade-off* antara aspek pertumbuhan dan pemerataan.

Dengan mengacu kepada dalil ekonomi penting yang disebut "*The Second Fundamental Theorem of Welfare Economics*" yang menyatakan bahwa alokasi sumber daya yang efisien (*Pareto efficiency*) yang mengarah kepada keseimbangan kompetitif, dapat didukung oleh suatu tindakan pemerintah (yang diinginkan) melalui sistem perpajakan dan transfer (subsidi atau *grant*). Sedangkan hal-hal lain dalam ekonomi dapat diserahkan kepada bekerjanya mekanisme pasar yang kompetitif. Dalil ini mempunyai implikasi yang penting dalam memberi justifikasi tentang pentingnya pemerataan dalam ekonomi – yang dalam hal pembangunan mikropolitan merupakan pemerataan dalam dimensi spatial, untuk dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karenanya dalam kaitan dengan pembangunan, pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan tingkat pemerataan tertentu yang diinginkan, dengan melakukan redistribusi alokasi sumber daya (kapital, lahan dan sumber daya alam lainnya) secara spatial. Selebihnya yang menyangkut efisiensi sebaiknya pemerintah membiarkan untuk dapat memungkinkan bekerjanya sistem pasar (yang bersaing), agar keseimbangan ekonomi yang efisien dapat tercapai. Sehingga apabila gagasan ini dapat diwujudkan, maka antara pertumbuhan dan pemerataan akan berjalan bersama, yang tidak perlu dipertentangkan lagi. Sedangkan faktor yang dapat merangsang kaum swasta dan organisasi kemasyarakatan untuk mengarahkan aktivitas industrialisasi ke wilayah pedesaan, guna melawan arus kekuatan aglomerasi kawasan perkotaan, dapat dirangsang dengan instrumen insentif fiskal dan pengembangan lembaga keuangan dan pasar keuangan dan reformasi agraria di wilayah pedesaan.

Kebutuhan terhadap adanya kerangka pemikiran atau paradigma baru ini, yang dihadapkan kepada kenyataan tentang adanya tekanan penduduk yang semakin besar di wilayah pedesaan seperti yang sekarang dihadapi oleh Indonesia sudah mendesak. Keadaannya menjadi sedemikian rupa, sehingga telah menciptakan konsekuensi keadaan

yang gawat (*serious*). Terutama, apabila kita ingat bahwa dari pengalaman pembangunan industrialisasi (yang lalu) hanya didasarkan kepada keputusan-keputusan swasta yang berbasis industrialisasi dan berlokasi disekitar kawasan perkotaan besar, setelah mengalami malapetaka krisis, maka keseluruhan sistem ekonomi nasional menjadi ambruk. Kejadian ambruknya sistem perekonomian nasional ini karena sektor pertanian dan perdesaan tidak menjadi penyangga (*buffer*), kecuali bagi sektor-sektor tertentu.

Meskipun pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun cenderung menurun, akan tetapi pertumbuhan penduduk di perdesaan masih menunjukkan peningkatan. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan angkatan kerja di perdesaan. Dalam kebanyakan sistem ekonomi wilayah, peningkatan tenaga kerja di perdesaan ternyata tidak dapat dipenuhi oleh peningkatan ketersediaan lahan pertanian. Sehingga dengan terjadinya penurunan yang tajam dalam ketersediaan lahan pertanian untuk masing-masing tenaga kerja, karena terjadinya masalah institusional yang lemah dibidang kebijakan pertanahan, maka dengan keadaan ini sekarang sudah menjadi ancaman yang semakin serius. Dengan terjadinya proses pemiskinan di wilayah perdesaan, yang antara lain disebabkan oleh meningkatnya fragmentasi pemilikan lahan, maka keadaan ini mengarah kepada terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja yang tidak mempunyai lahan (*landless laborer*). Sebagai akibatnya maka migrasi tenaga kerja besar-besaran dari wilayah perdesaan ke kawasan kota tidak dapat dihindarkan, seperti terjadi dimasa sebelum krisis bahkan sampai sekarang masih terus berlangsung.

Uraian teori pertumbuhan ekonomi di atas sebagian besar mengungkapkan bahwa salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha. Untuk itu dalam proses pembangunan perlu adanya upaya peningkatan kualitas tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan ekonomi. Akan tetapi, permasalahan ketenagakerjaan di negara-negara berkembang selalu terkendala oleh kurangnya tenaga kerja terdidik dan tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah.

Pada tahun 2006, jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 106,4 juta. Dari jumlah tersebut, yang bekerja sebanyak 95,5 juta, dengan demikian yang menganggur sebanyak 10,9 juta. Dari jumlah pengangguran tersebut paling banyak berpendidikan SLTA Umum 2,8 juta. Kemudian diikuti oleh angkatan kerja berpendidikan SLTP Umum dan SD, masing-masing sebanyak 2,6 juta. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar dari penduduk yang menganggur berada pada angkatan kerja berpendidikan menengah, yaitu SLTP dan SLTA sekitar 63,0 persen. Gambaran tersebut

mencerminkan bahwa angkatan kerja berpendidikan menengah jumlahnya paling banyak dan kebutuhan untuk tenaga kerja berpendidikan menengah tidak mampu menyerap semuanya.

2.1.3 Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia sampai saat ini tergolong masih rendah. Hal tersebut dicerminkan dari masih rendahnya rata-rata pendidikan masyarakat. Kondisi perekonomian *pasca* krisis yang belum membaik menyebabkan pendapatan sebagian masyarakat Indonesia tidak cukup untuk membiayai pendidikan anggota rumah tangganya sampai ke tingkat perguruan tinggi. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang hanya tamat SLTA Umum sampai 15,8 juta jiwa dan yang hanya lulus SLTP Umum sebanyak 19,8 jiwa. Banyaknya penduduk yang tidak berpendidikan tinggi menyebabkan kegiatan ekonomi dan proses pembangunan nasional menjadi kurang optimal. Oleh sebab itu, upaya peningkatan pendidikan harus dilakukan karena faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan keahlian yang berdampak pada peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan (Wijaya, 1997). Berdasarkan hal tersebut upaya peningkatan kualitas pekerja tersebut terus diupayakan pemerintah melalui pembangunan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan pendapatan rumah tangga karena perubahan pada pendapatan rumah tangga akan merubah pengeluaran untuk pendidikan dengan arah yang sama (Novita, 2005).

Pada Maret dan Oktober 2005, pemerintah Indonesia mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasi sebagian besar dananya dalam empat program besar yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, akibat peningkatan harga BBM. Keempat program tersebut adalah untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur perdesaan, dan bantuan langsung tunai. Salah satu program dibidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana ke sekolah-sekolah setingkat SD dan SLTP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program. Sekolah yang dicakup dalam program ini adalah SD/MI/SDLB/Salafiyah setingkat SD dan SMP/MTS/SMPLB/Salafiyah setingkat SLTP, baik negeri maupun swasta. Program ini mulai dilaksanakan pada Juli 2005 bersamaan dengan awal tahun ajaran (TA) 2005/2006.

Secara konseptual Program BOS berbeda dengan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan sebelumnya. Sampai dengan TA 2004/2005, PKPS-BBM bidang pendidikan untuk tingkat SD dan SLTP diberikan dalam bentuk beasiswa bagi siswa miskin, yang dikenal dengan sebutan Bantuan Khusus Murid (BKM). Jumlah siswa miskin yang mendapat BKM ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan indeks kemiskinan. Pada tahun ajaran 2004/2005, BKM diberikan kepada sekitar 20 persen siswa SD dan 24 persen siswa SLTP, dengan nilai beasiswa Rp 60.000 per semester per siswa tingkat SD dan Rp 120.000 per semester per siswa tingkat SLTP. Setiap sekolah mendapat kuota tertentu, melakukan seleksi siswa yang berhak menerima, dan selanjutnya dana BKM diberikan langsung kepada siswa terpilih melalui kantor pos yang ditunjuk.

Program BOS mengadopsi pendekatan yang berbeda karena dana tidak diberikan kepada siswa miskin tetapi diberikan dan dikelola oleh sekolah. Jumlah dana BOS yang diberikan ke sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah. Dengan adanya perubahan tersebut, jumlah siswa yang dicakup oleh program PKPS-BBM pendidikan tingkat SD dan SLTP meningkat hampir lima kali lipat dan anggaran PKPS-BBM bidang pendidikan untuk tingkat SD dan SLTP juga meningkat sekitar delapan kali lipat.

Karena adanya perubahan konseptual rancangan program PKPS-BBM bidang pendidikan untuk SD dan SLTP tersebut, serta besarnya dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program BOS, dirasa perlu untuk mempelajari pelaksanaan program di lapangan. Banyak pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan dan persiapan program BOS mengakui bahwa program yang sangat besar ini dipersiapkan dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karenanya pemantauan secara mendalam terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi selama satu semester pertama pelaksanaan program juga akan sangat diperlukan bagi penyempurnaan program di masa mendatang.

2.2 Hubungan Antara Anggaran Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Pendidikan dalam pandangan tradisional selama sekian dekade dipahami sebagai bentuk pelayanan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat, dalam konteks ini pelayanan pendidikan sebagai bagian dari *public service* atau jasa layanan umum dari negara kepada masyarakat yang tidak memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat, sehingga pembangunan pendidikan tidak menarik untuk menjadi tema perhatian, kedudukannya tidak mendapat perhatian menarik dalam gerak langkah pembangunan.

Opini yang berkembang justru pembangunan sektor pendidikan hanyalah sektor yang bersifat memakan anggaran tanpa jelas manfaatnya (terutama secara ekonomi). Pandangan demikian membawa orang pada keraguan bahkan ketidakpercayaan terhadap pembangunan bidang pendidikan sebagai pondasi bagi kemajuan pembangunan disegala bidang. Ketidakyakinan ini misalnya terwujud dalam kecilnya komitmen anggaran pendidikan untuk dunia pendidikan. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pendidikan dianggap buang-buang uang yang tidak bermanfaat. Cara pandangan ini sekarang sudah mulai tergusur sejalan dengan ditemukannya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kekuatan utama sekaligus prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai bidang.

Dalam hal ke tingkat pendidikan mana anggaran harus dialokasikan, Booth (2000) menulis bahwa di Indonesia pada 1980-1990-an, subsidi pemerintah yang terlalu besar bagi pendidikan tinggi menyebabkan koefisien Gini yang meningkat. Alasannya, lulusan perguruan tinggi adalah yang paling diuntungkan dari *boom* selama ekonomi periode itu. Selain soal anggaran, tingkat pendidikan di suatu negara mungkin menghadapi masalah lain di luar pendanaan. Di sini dibutuhkan intervensi pemerintah yang spesifik untuk mengatasi masalah-masalah itu.

Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi (*education as investement*) telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan ekonomi. Konsep tentang investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), sebenarnya telah mulai dipikirkan sejak jaman Adam Smith (1776), Johann Heinrich Von Thunen (1875) dan para teoritis klasik lainnya sebelum abad ke-19 yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia.

Pengembangan SDM suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Investasi dalam bentuk modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangunan. Pendidikan harus meliputi suatu spektrum yang luas dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Pengembangan SDM melalui pendidikan menyokong secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, dan karenanya anggaran pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang produktif dan tidak semata-mata dilihat sebagai sesuatu yang konsumtif tanpa manfaat balikan yang jelas (*rate of return*).

Sejumlah hubungan telah diuji dalam rangka kesimpulan tersebut, misalnya studi Bank Dunia mengenai 83 negara sedang berkembang menunjukkan bahwa di 10 negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan riil tertinggi dari GNP per kapita antara tahun 1960 dan 1977,

adalah negara yang tingkat melek huruf pada tahun 1960 rata-rata 16 persen lebih tinggi daripada negara-negara lain (World Bank, World Development Report, 1980).

Di lain pihak terdapat teori dan studi yang berbeda dari pandangan di atas. Teori Solow (1956) yang standar, hanya mampu menjelaskan bagaimana perekonomian sebuah negara bisa tumbuh, tetapi tidak cukup mampu menjelaskan distribusi pendapatan per kapita antarnegara di dunia. Baru ketika variabel modal manusia diikutsertakan dalam perhitungan, sebagian dari kesenjangan itu bisa dijelaskan.

Namun, sejumlah misteri masih tersisa. Tingkat pendidikan di negara-negara berkembang sebenarnya mengalami peningkatan drastis pada tahun 1960-1990. Easterly (2001) menunjukkan bahwa median angka partisipasi sekolah dasar meningkat dari 88 persen menjadi 90 persen, sementara untuk sekolah menengah dari 13 persen menjadi 45 persen. Selanjutnya, jika di tahun 1960 hanya 28 persen negara di dunia yang angka partisipasi sekolah dasarnya mencapai 100 persen, di tahun 1990 menjadi lebih dari separuhnya.⁹

Nyatanya, kenaikan drastis dari tingkat pendidikan di negara-negara berkembang tidak menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh benua Afrika. Antara tahun 1960 hingga tahun 1985 pertumbuhan tingkat sekolah di benua itu tercatat lebih dari 4 persen per tahun. Nyatanya, ekonomi negara-negara di Afrika hanya tumbuh 0,5 persen per tahun. Itu pun karena ada "keajaiban ekonomi" di Afrika, yaitu Botswana dan Lesotho.

Kebanyakan negara Afrika lain justru mencatat pertumbuhan negatif dalam periode tersebut. Kasus ekstrim dialami Senegal yang mengalami pertumbuhan angka sekolah hampir 8 persen per tahun, tetapi memiliki pertumbuhan ekonomi yang negatif. Dalam periode yang sama negara-negara Asia Timur mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan angka partisipasi sekolah. Namun, perbedaan keduanya tidak signifikan, hanya 4,2 persen berbanding dengan 2,7 persen.

Selain tidak bisa menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi, pendidikan juga tidak berhasil menjelaskan fenomena membesarnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Pritchett (2003) menunjukkan terjadinya konvergensi tingkat pendidikan antarnegara di dunia. Sepanjang 1960-1995, deviasi standar dalam tingkat pendidikan turun dari 0,94 menjadi 0,56. Tapi, di saat yang sama, deviasi standar untuk pendapatan per kapita

⁹ Easterly, W., (2001), The effect of International Monetary Fund and World Bank programs on poverty, Policy Research Working Paper 2517, The World Bank.

antarnegara meningkat dari 0,93 menjadi 1,13.¹⁰

Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkatkan produktivitas pekerja. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Di lain pihak kenaikan produktivitas berarti kenaikan penghasilan. Selalu diasumsikan bahwa manfaat dari kenaikan pendidikan secara agregat akan lebih besar bagi kelompok miskin. Dengan demikian, jika tingkat pendidikan meningkat, penghasilan kelompok miskin juga akan tumbuh lebih cepat dan pada akhirnya ketimpangan akan mengecil. Namun asumsi ini tidak selalu benar, Coto (2006) menemukan bahwa kenaikan persentase pekerja yang memiliki pendidikan terakhir SI sebesar 1 persen akan menurunkan persentase pendapatan 40 persen rumah tangga berpenghasilan rendah sebesar 0,078 persen sehingga ketimpangan menjadi lebih besar. Manfaat dari pendidikan dalam hal kenaikan produktivitas dan penghasilan pekerja hanya berlaku untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu. Akibatnya, kenaikan tingkat pendidikan belum tentu memberikan manfaat terhadap pertumbuhan dan pemerataan. Terutama jika kita berbicara mengenai manfaat pendidikan bagi kelompok termiskin.

Pendapat di atas yang mengatakan bahwa kenaikan tingkat pendidikan tidak bermanfaat secara signifikan bagi kemakmuran sebuah negara adalah pendapat yang sama sekali tidak berdasar secara empiris. Pesan yang ingin disampaikan adalah ada banyak hal lain yang menyebabkan kontribusi positif pendidikan tidak teralu besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Dengan kata lain, pendidikan bukanlah mantra ajaib. Konsekuensinya, intervensi pemerintah dalam bidang ini juga harus dilakukan secara hati-hati. Bentuk kehati-hatiannya adalah agar tidak terjebak dalam mengukur peranan pemerintah hanya dari besarnya alokasi anggaran pendidikan. Anggaran memang penting, tetapi bukan pada seberapa besar, melainkan direncanakan dan digunakan untuk apa, mengapa dan bagaimana. Varina (2000) menemukan bahwa peningkatan investasi pemerintah akan memperbaiki rasio pemerataan pendapatan. Pada akhirnya perbaikan rasio pemerataan pendapatan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, (Puspita, 2006). Hal ini memberikan indikasi bahwa penerapan kebijakan yang tepat akan memberikan hasil yang baik. Di beberapa negara Asia yang sedang berkembang meski kebanyakan guru dibayar terlalu murah, dari hasil studi ADB menyatakan bahwa tambahan anggaran untuk peralatan dan gedung memberikan hasil lebih besar terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ke tingkat pendidikan mana anggaran harus

¹⁰ Pritchett (2003), Who is not Poor? Proposing a Higher International Standard for Poverty, Working Paper 33, Center for Global Development.

dialokasikan, Booth (2000) menulis bahwa di Indonesia pada 1980-1990-an dalam laporan World Bank subsidi pemerintah yang terlalu besar bagi pendidikan tinggi menyebabkan koefisien Gini meningkat.¹¹

2.3 *Social Accounting Matrix (SAM)*

Social Accounting Matrix (SAM) dapat menggambarkan profil dan perubahan struktur ekonomi-sosial Indonesia, terutama untuk menggambarkan kinerja ekonomi yang dikaitkan dengan masalah-masalah distribusi pendapatan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan perkataan lain, SAM selain digunakan sebagai kerangka data untuk menghimpun data ekonomi dan sosial, juga akan digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dampak subsidi anggaran pendidikan terhadap tingkat pendidikan dan distribusi pendapatan rumah tangga, seperti tujuan tesis ini. SAM dapat digunakan sebagai alat analisis keterkaitan antara kinerja ekonomi dan ketenagakerjaan serta distribusi pendapatan karena:

- a. SAM merupakan suatu sistem kerangka data yang merangkum data ekonomi dan sosial ke dalam suatu kerangka yang terintegrasi, kompak, dan komprehensif;
- b. Sehingga dengan demikian SAM dapat mengaitkan kinerja ekonomi dengan kondisi sosial di Indonesia yang dalam kaitannya dengan laporan ini akan dikaitkan dengan masalah-masalah ketenagakerjaan dan distribusi pendapatan. Secara umum SAM dapat memberikan gambaran mengenai:
 - i. Kinerja ekonomi (*economic performance*);
 - ii. Kinerja sosial, yaitu distribusi pendapatan rumah tangga (*household income distribution*) serta distribusi pekerjaan dan pekerja menurut sektor, termasuk didalamnya pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh rumah tangga dan tenaga kerja menurut tingkat pendidikan.¹²

Dengan demikian, SAM merupakan suatu kerangka statistik (*statistical framework*) yang dapat menggabungkan berbagai indikator atau ukuran pembangunan sudah sejak lama menjadi bahan pemikiran para ahli statistik dan perencana pembangunan. Indikator-indikator atau ukuran-ukuran pembangunan yang selama ini tersedia, seperti ukuran-ukuran produksi, pendapatan, pengeluaran, konsumsi, tersusun

¹¹ Booth, A., (2000), *Poverty and Inequality in the Soeharto Era: An Assessment*, Invited paper for a special issue of the Bulletin of Indonesian Economic Studies in honour of Thee Kian Wie, Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol 36(1), pp. 73-104

¹² Keuning, S.J. and Willem de Ruijter. (1990). *The Sosial Accounting Framework: Outline of Construction Stages and Organization of Work*. Dalam J. Alarcon, J.v. Heemst, S. Keuning, W.de Ruijter and R. Vos (eds.), *The Social Accounting Framework for Development: Concepts, Construction and Applications*. Avebury: 191-221

secara terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Richard Stone dan kawan-kawan dari Universitas Cambridge, Inggris merupakan salah satu perintis yang mengusahakan penggabungan berbagai ukuran-ukuran ekonomi yang terpisah-pisah tersebut ke dalam suatu neraca ekonomi nasional (*national accounting framework*).

Hasil karya Stone dan kawan-kawan tersebut kemudian dipublikasikan oleh United Nations (1947) dengan judul *Measurement of National Income and Construction of Social Accounts: Studies and Reports of Statistical Methods, No. 7*. Kemudian publikasi tersebut disempurnakan oleh United Nations (1968) dengan judul *A System of National Accounts (SNA)*, yang kemudian digunakan sebagai referensi oleh banyak negara untuk melakukan kompilasi statistik pendapatan nasional. Pada periode setelah perang dunia kedua, strategi pertumbuhan ekonomi merupakan strategi yang banyak dirujuk oleh banyak negara dalam melakukan pembangunan ekonomi. Target utama strategi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah peningkatan output sektor-sektor ekonomi yang dominan sehingga dengan demikian pendapatan nasional negara bersangkutan akan meningkat. Melalui proses penetesan ke bawah (*trickle down effect*), hasil-hasil pembangunan yang diperoleh dengan strategi pertumbuhan ekonomi kemudian diharapkan akan mengalir kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat secara umum menjadi meningkat.

Pengalaman yang diperoleh oleh banyak negara yang mengaplikasikan strategi pertumbuhan ekonomi adalah bahwa pada satu sisi strategi pertumbuhan ekonomi memang meningkatkan pendapatan nasional. Namun pada sisi yang lain strategi pertumbuhan ekonomi memunculkan masalah lain yang cukup serius, diantaranya adalah masalah ketidakmerataan pendapatan dan pengangguran. Dari pengalaman tersebut, banyak negara mulai memperhatikan tidak saja masalah peningkatan pendapatan, tetapi juga memperhatikan masalah pemerataan pendapatan dan ketenagakerjaan dalam melaksanakan pembangunan.

Untuk dapat memantau masalah pemerataan pendapatan, banyak konsep yang telah direkomendasikan oleh para ahli, diantaranya adalah pengukuran ketidakmerataan pendapatan atau distribusi pendapatan dengan menggunakan indek Gini (*Gini index*), ukuran Bank Dunia, atau pun dengan menggunakan kurva Lorenz. Sedangkan permasalahan pengangguran dipantau dengan menggunakan ukuran *unemployment rate*, yaitu suatu ukuran yang membandingkan jumlah penduduk yang menganggur dengan mereka yang bekerja.

Social Accounting Matrix (SAM) merupakan sebuah matriks yang merangkum neraca sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Neraca-neraca (*account*) tersebut

dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni kelompok neraca-neraca endogen dan kelompok neraca-neraca eksogen. Secara garis besar kelompok neraca-neraca endogen dibagi dalam tiga blok, yaitu: (i) blok neraca faktor produksi; (ii) blok neraca institusi; dan (iii) blok neraca aktivitas (kegiatan) produksi. Untuk menyingkat penulisan, ketiga blok tersebut selanjutnya akan disebut sebagai blok faktor produksi, blok institusi dan blok kegiatan produksi.¹³

Untuk lebih memahami pengertian yang sederhana dari SAM, di bawah ini akan diberikan penjelasan yang diawali dari kerangka dasar SAM. Secara sederhana kerangka dasar SAM dapat dilihat pada Tabel 2.2. Kerangka dasar pembentukan SAM tersebut adalah berbentuk matriks partisi yang berukuran 4 x 4. Baris menunjukkan penerimaan, sedangkan kolom menunjukkan pengeluaran. Pada Tabel 2.2, submatriks T_{ij} digunakan untuk menunjukkan penerimaan neraca baris ke- i dari neraca kolom ke- j . Vektor y_i menunjukkan total penerimaan neraca baris ke- i , sebaliknya vektor y'_j menunjukkan total pengeluaran neraca kolom ke- j . Sesuai dengan ketentuan pada SAM, vektor y_i sama dengan vektor y'_j , dengan kata lain y'_j merupakan vektor *transpose* dari y_i , untuk setiap $i = j$. Untuk dapat dengan mudah mengerti transaksi-transaksi ekonomi dicatat oleh sebuah SAM, perhatikan Gambar 2.1.

Tabel 2.2 Kerangka Dasar SAM

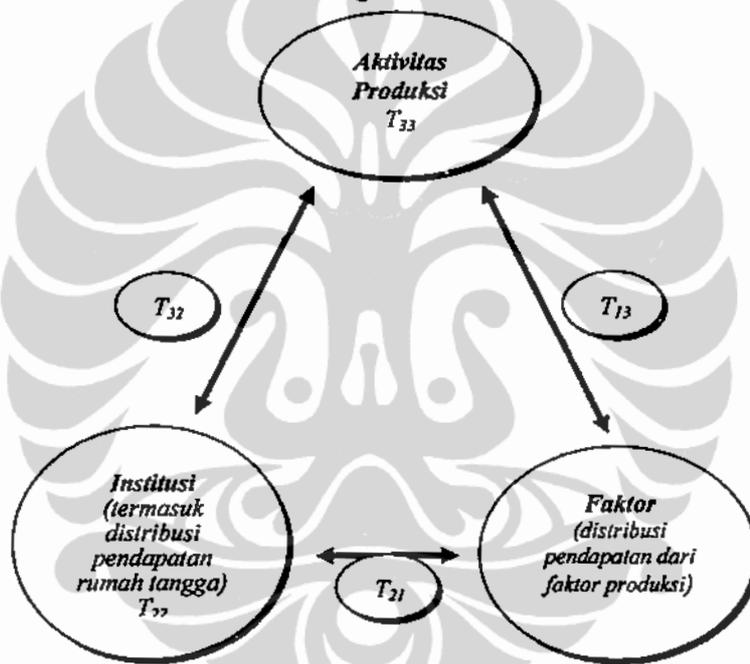
		PENGELUARAN					TOTAL
		Neraca Endogen			Neraca Eksogen		
		Faktor Produksi	Institusi	Kegiatan Produksi			
P E N E R I M A N	Neraca Endogen	Faktor Produksi	0	0	T_{13}	T_{14}	y_1
		Institusi	T_{21}	T_{22}	0	T_{24}	y_2
		Kegiatan Produksi	0	T_{32}	T_{33}	T_{34}	y_3
Neraca Eksogen		T_{41}	T_{42}	T_{43}	T_{44}	y_4	
TOTAL		y'_1	y'_2	y'_3	y'_4		

Sumber: Badan Pusat Statistik, 1996

¹³ Thorbecke, E. (1988). The Accounting Matrix and Consistency-Type. Dalam G. Pyatt and J.I. Round (eds.), Social Accounting matrices: A Basic for Planning, The World Bank, Washington, D.C

Gambar 2.1 menunjukkan transaksi ekonomi utama yang tercatat di dalam sebuah SAM (tanda panah menunjukkan arus uang). Submatriks T_{13} menunjukkan alokasi nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi ke faktor-faktor produksi, sebagai balas jasa dari penggunaan faktor-faktor produksi tersebut. Misalnya upah dan gaji sebagai balas jasa bagi penggunaan faktor produksi tenaga kerja. Submatriks T_{21} menunjukkan alokasi pendapatan faktor produksi ke berbagai institusi, yang umumnya terdiri dari rumah tangga, pemerintah dan perusahaan.

Gambar 2.1
Transaksi Ekonomi Antara Agen di dalam Sebuah Perekonomian



Sumber: Thorbecke, 1988

Dengan perkataan lain, matriks ini merupakan matriks yang merekam distribusi pendapatan dari faktor produksi ke berbagai institusi. Sebagai contoh, sebagian pekerja di sektor pertanian merupakan anggota dari kelompok masyarakat petani pemilik tanah kecil. Dengan demikian ada uang yang mengalir dari sektor pekerja tani ke kelompok masyarakat pemilik tanah pertanian kecil. Submatriks T_{22} menunjukkan transfer pembayaran antar institusi, misalnya pemberian subsidi dari pemerintah kepada rumah tangga, pemberian subsidi dari perusahaan kepada rumah tangga, atau pembayaran transfer dari rumah tangga ke rumah tangga yang lain. Submatriks T_{32} menunjukkan permintaan terhadap barang dan jasa oleh institusi, dengan kata lain menunjukkan uang

yang dibayarkan pihak institusi ke sektor produksi untuk membeli barang dan jasa yang dikonsumsi. Submatriks T_{33} menunjukkan permintaan barang dan jasa antar industri atau transaksi antar sektor produksi. Selain submatriks-submatriks tersebut, SAM juga mencatat submatriks transaksi ekonomi di sektor perbankan dan transaksi ekonomi dengan pihak luar negeri.

SAM juga memberikan informasi mengenai struktur sosial suatu perekonomian, khususnya informasi struktur produksi, kondisi faktor produksi, distribusi pendapatan rumah tangga (berdasarkan kelompok sosial-ekonomi), dan pola pengeluaran berbagai institusi (termasuk kelompok rumah tangga yang berbeda-beda). Secara umum, SAM merupakan pendekatan terbaik bagi kerangka penghitungan keseimbangan umum yang tersedia bagi para peneliti ekonomi dan sosial (Thorbecke, 1985).

Studi empiris sebelumnya yang mempengaruhi pola berpikir penulis dalam penulisan tesis ini adalah: Hidayat (1988), Lewis dan Thorbecke (1992) serta Iwan Azis dan Yuri Mansury (2003). Studi tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hidayat (1988) menggunakan SAM untuk: (1) menggambarkan bagaimana proses pembuatan kerangka SAM di Indonesia, (2) memberikan contoh penggunaan SAM untuk menganalisis masalah distribusi pendapatan di Indonesia dengan menggunakan metodologi SPA, (3) untuk menetapkan penggunaan SAM sebagai alat analisis ekonomi regional. Dari penggunaan SAM tersebut studi ini dapat melihat secara cermat dampak subsidi beras pada berbagai kelompok pendapatan. Dalam konteks distribusi pendapatan, studi ini menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan, di mana kebijakan *allocation of benefits* lebih banyak menguntungkan kelompok rumah tangga kaya.

Lewis dan Thorbecke (1992) menggunakan model SAM untuk melihat keterkaitan ekonomi antar pusat pasar dengan daerah pedalaman di Kenya. Analisisnya didasarkan pada *income multiplier* dan *employment multiplier* yang diperoleh dari estimasi SAM pada wilayah tersebut. Studi ini juga melihat dampak dari aktifitas produksi terhadap nilai tambah dan kesempatan kerja, pengaruh sektor produksi pada pendapatan rumah tangga, dan dampak pengeluaran rumah tangga terhadap nilai tambah. Hasil studi tersebut dapat menggambarkan secara baik manfaat SAM untuk perencanaan ekonomi pada suatu wilayah.

Iwan Azis dan Yuri Mansury (2003) dalam makalahnya yang berjudul "*Measuring Economic-wide Impacts of Financial Shock*" pada *ASEAN Economic Bulletin*, telah menggunakan model SAM 2000 dalam menganalisis transmisi *shock* terhadap distribusi pendapatan untuk kasus di Indonesia, dengan metodologi yang digunakan adalah SPA.

Dalam tulisannya disimpulkan bahwa: orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari depresiasi rupiah dan suku bunga tinggi adalah kelompok orang-orang yang berpendapatan tinggi, namun demikian kelompok ini mendapatkan kerugian karena mereka dipekerjakan pada sektor-sektor dengan ketergantungan impor yang tinggi. Konstruksi merupakan sektor yang paling parah terkena dampak krisis 1998, oleh karena itu rumah tangga non-pertanian yang berpendapatan rendah merupakan kelompok yang rentan karena sangat bergantung pada pekerjaan manual pada sektor konstruksi, sektor ini juga merupakan instrumen transmisi jatuhnya pendapatan rumah tangga akibat *shock* kredit. Sistem Jaring Pengaman Sosial (JPS) formal semakin berkurang dan JPS informal yang diharapkan dapat membantu orang miskin, namun kenyataannya ditemukan tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa rumah tangga peduli untuk membantu tetangga mereka yang miskin selama terjadi krisis.

2.3.1 Klasifikasi Tabel SAM

Klasifikasi dari SAM Indonesia Tahun 2006 disesuaikan dengan kebutuhan tesis, sehingga klasifikasi neraca dibuat sebagai berikut:

i. Neraca Faktor Produksi

Faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja dibedakan menjadi 4, yaitu;

- a. Tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah,
- b. Tenaga kerja berpendidikan menengah,
- c. Tenaga kerja berpendidikan Diploma/Akademi,
- d. Tenaga kerja berpendidikan S1 ke atas.

Untuk faktor produksi tenaga kerja tetap 1 sektor yang merupakan gabungan dari: surplus usaha, bunga modal, deviden dan sewa.

ii. Neraca Institusi

Institusi dalam SAM Indonesia Tahun 2006 dibagi menjadi 3 yaitu rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Perusahaan dan pemerintah hanya 1 sektor, tetapi rumah tangga di golongkan menjadi 10 golongan rumah tangga. Penggolongan rumah tangga dilakukan berdasarkan desil rumah tangga dengan kelompok pengeluaran berdasarkan data Susenas 2006. Dengan demikian, golongan rumah tangga I adalah 10 persen rumah tangga berpendapatan paling rendah. Golongan rumah tangga II adalah 10 persen rumah tangga dengan pendapatan di atas golongan I. Golongan rumah tangga III adalah 10 persen rumah tangga dengan pendapatan di atas golongan II. Dan

seterusnya sampai pada golongan rumah tangga X adalah 10 persen rumah tangga dengan pendapatan paling tinggi.

iii. Neraca Sektor

Neraca Sektor di dalam SAM Indonesia 2006 terdiri dari 23 sektor. Penetapan jumlah sektor sebanyak 23 berdasarkan pada kebutuhan analisis dan ketersediaan data.

iv. Neraca Lainnya

Neraca lainnya terdiri dari transaksi neraca kapital, pajak tidak langsung minus subsidi dan neraca luar negeri.

2.3.2 Matriks Pengganda dan Analisis SPA

i) Matriks Pengganda SAM

Matriks pengganda dalam kerangka SAM begitu penting, karena matriks tersebut dapat menangkap seluruh dampak dari perubahan suatu sektor terhadap sektor lainnya di dalam ekonomi; dan juga digunakan untuk menjelaskan dampak yang terjadi pada neraca endogen akibat perubahan neraca eksogen. Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, dapat dituliskan suatu matriks sebagai berikut:

$$y = Ay + x \quad [2.1]$$

dimana:

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}; A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & 0 \\ 0 & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}; x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Jika matriks $(I - A)$ diasumsikan matriks tak singular agar matriks $(I - A)$ memiliki invers, maka bentuk [2.1] dapat ditulis kembali sebagai bentuk:

$$y = Ay + x \Leftrightarrow y = (I - A)^{-1} x \Leftrightarrow y = M_a x \quad [2.2]$$

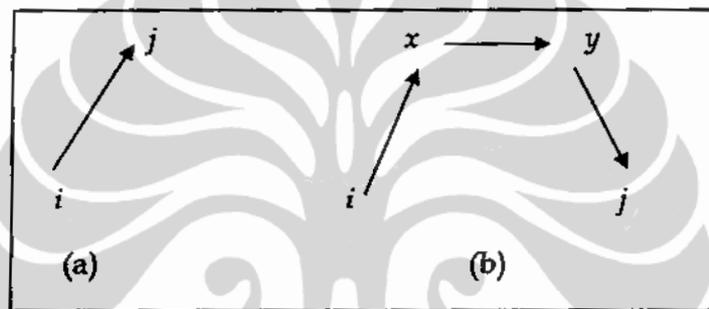
dengan $M_a = (I - A)^{-1}$ yang disebut sebagai matriks pengganda (*multiplier matrix*). Dalam hal ini A berisi koefisien-koefisien yang menunjukkan pengaruh langsung dari perubahan yang terjadi pada sebuah sektor terhadap sektor lainnya melalui pendekatan keterkaitan kebelakang. Sedangkan M_a dinamakan matriks pengganda yang menunjukkan pengaruh

global dari perubahan pada sebuah sektor terhadap sektor lainnya melalui keseluruhan sistem dalam SAM.¹⁴

ii) Analisis *Structural Path Analysis*

Structural Path Analysis (SPA) pada dasarnya adalah metode untuk mengidentifikasi seluruh jaringan yang berisi jalur yang menghubungkan pengaruh suatu sektor pada sektor lainnya dalam suatu sistem sosial ekonomi. Pengaruh dari suatu sektor ke sektor lainnya dapat melalui sebuah jalur dasar (*elementary path*) atau sirkuit.¹⁵

Gambar 2.2 Jalur Dasar



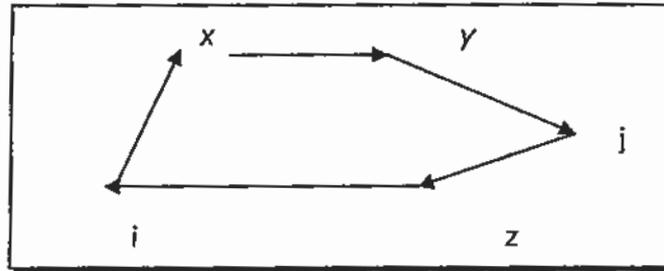
Disebut jalur dasar apabila jalur tersebut melalui sebuah sektor tidak lebih dari satu kali. Misalkan sektor i mempengaruhi sektor j , pengaruh dari sektor i ke sektor j bisa terjadi secara langsung ataupun bisa juga terjadi melalui sektor-sektor lain, katakanlah sektor x dan sektor y . Apabila dalam jalur i ke j tersebut, sektor i , x , y dan j hanya dilalui satu kali, maka hal seperti ini disebut sebagai jalur dasar.

Ada kalanya suatu sektor, setelah mempengaruhi sektor yang lain, pada akhirnya akan kembali lagi mempengaruhi sektor itu sendiri. Misalkan saja pengaruh sektor i ke sektor j yang terlihat dalam Gambar 2.2 (b) di atas masih terus berlanjut di mana misalnya sektor j mempengaruhi sektor z dan sektor z ini kembali mempengaruhi sektor i . Jalur yang demikian tersebut dinamakan sebagai sirkuit, dalam jalur ini setiap sektor hanya dilalui satu kali kecuali sektor i . Sektor i dalam sirkuit ini dilalui dua kali yaitu pada awal jalur dan pada akhir jalur (perhatikan Gambar 2.3).

¹⁴ Thorbecke, E. (1997). *Social Accounting Matrices and Social Accounting Analysis*. Dalam Walter Isard (ed.), *Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science*

¹⁵ Defourny, J. And E. Thorbecke. (1984). *Structural Path Analysis and Multiplier Decomposition with A Social Accounting Matrix Framework*. *The Economic Journal*, 94(3): 111-136

Gambar 2.3 Sirkuit



“Pengaruh” atau *influence* adalah ukuran yang mencerminkan besarnya pengaruh pengeluaran dari suatu sektor ke sektor lainnya, dan oleh karenanya menggambarkan keeratan hubungan antara kedua sektor tersebut. Besaran yang dipakai untuk mengukur keeratan hubungan tersebut tergantung pendekatan yang digunakan, apakah pendekatan rata-rata ataukah pendekatan marjinal.

Ada 3 (tiga) jenis “pengaruh” yang akan dijadikan alat analisis, yaitu pengaruh langsung (*direct influence*), pengaruh total (*total influence*) dan pengaruh global (*global influence*).

iii) SPA Keterkaitan Kebelakang¹⁶

1. Pengaruh Langsung (PL)

Pengaruh langsung dari i ke j adalah perubahan pendapatan atau produksi j disebabkan oleh perubahan satu unit i , selama pendapatan atau produksi pada titik yang lain, kecuali pada jalur dasar yang dilalui dari i ke j , tidak mengalami perubahan. Dengan pendekatan rata-rata, pengaruh langsung (PL) dari i ke j yang diagramnya terlihat pada Gambar 2.2 (a) adalah $PL_{(i \rightarrow j)} = a_{ji}$. Sedangkan untuk Gambar 2.2 (b) pengaruh langsungnya adalah $PL_{(i \rightarrow j)} = PL_{(i \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow j)} = a_{xi} a_{yx} a_{jy}$. Dalam hal ini $a_{ji}, a_{xi}, a_{yx}, a_{jy} \in A$, dimana A adalah matriks kecenderungan pengeluaran rata-rata.

¹⁶ SPA dengan pendekatan keterkaitan kebelakang didasarkan pada tulisan Defourney dan Thorbecke (1984), yaitu *Structural Path Analysis and Multiplier Decomposition with A Social Accounting Matrix Framework*. The Economic Journal, 94(3): 111-136.

2. Pengaruh Total (PT)

Pengaruh Total dari i ke j adalah perubahan yang dibawa dari i ke j baik melalui jalur dasar maupun sirkuit yang menghubungkannya. Secara kuantitatif PT merupakan perkalian antara pengaruh langsung (PL) dengan pengganda jalur atau path multiplier (M_p). Dalam Gambar 2.2 (b) pengaruh totalnya adalah:

$$PT_{(i \rightarrow j)} = a_{xi} a_{yx} a_{jy} [I - a_{yx} (a_{xy} + a_{zy} a_{xz})]^{-1}$$

dimana pengganda jalur dinyatakan sebagai:

$$M_p = [I - a_{yx} (a_{xy} + a_{zy} a_{xz})]^{-1}$$

yang menangkap transmisi balik dari y menuju x . Dengan demikian pengaruh total dapat dinyatakan sebagai bentuk:

$$PT_{(i \rightarrow j)} = PL_{(i \rightarrow j)} \cdot M_p$$

3. Pengaruh Global (PG)

Pengaruh global dari i ke j mengukur keseluruhan pengaruh pada pendapatan atau produksi j disebabkan satu unit perubahan i , yang dapat dinyatakan sebagai

$$PG_{(i \rightarrow j)} = M_{a(ji)}$$

$M_{a(ji)}$ merupakan komponen matriks pengganda neraca dengan pendekatan kecenderungan pengeluaran rata-rata, yang dapat juga disebut sebagai matriks pengaruh global. Dalam hal ini matriks M_a diperoleh melalui teknik *invers* standar dari bentuk $(I - A_n)$, sehingga diperoleh bentuk berikut:

$$y_n = A_n y_n + x = (I - A_n)^{-1} x = M_a x$$

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL

3.1 Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelum krisis. Untuk itu, sampai dengan tahun 2009 dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan, dengan mempertahankan Angka Partisipasi Murni (APM) SD pada tingkat 95 persen, memperluas SLTP/MTs hingga mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) 98,0 persen serta menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas hingga 5 persen.

Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial-budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan, dan daerah terpencil), maupun hambatan atau kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih efektif antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah, putus sekolah, serta lulusan SD/MI/SDLB yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB yang masih besar jumlahnya, untuk memperoleh layanan pendidikan. Di samping itu, akan dilakukan strategi yang tepat untuk meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, khususnya pada masyarakat yang menghadapi hambatan tersebut.

Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun akan menambah jumlah lulusan SMP/MTs/SMPLB setiap tahunnya, sehingga juga akan mendorong perluasan pendidikan menengah. Dengan bertambahnya permintaan pendidikan menengah, pemerintah juga melakukan perluasan

pendidikan menengah terutama bagi mereka yang karena satu dan lain hal tidak dapat menikmati pendidikan SMA yang bersifat reguler melalui SMA Terbuka dan Paket C, sehingga pada gilirannya mendorong peningkatan APM-SMA. Oleh karena SMA cenderung semakin meluas jauh di atas SMK, maka pemerintah lebih mempercepat pertumbuhan SMK diiringi dengan upaya mendorong peningkatan program pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Pemerintah akan memperluas akses pendidikan tinggi untuk menjawab meningkatnya partisipasi sekolah menengah. Meningkatnya angka partisipasi PT tersebut akan diiringi oleh kebijakan yang mengarah pada pencapaian daya saing lulusan PT secara global. Secara bersamaan, dilakukan upaya untuk meningkatkan proporsi jumlah keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Salah satu upaya untuk pemenuhan tersebut diantaranya melalui peningkatan jumlah keahlian bidang vokasi melalui institusi politeknik. Selain itu, dikembangkan program yang merupakan upaya harmonisasi antara pendidikan kejuruan di SMK, pendidikan nonformal berkelanjutan, dan pendidikan vokasi. Di samping itu, peningkatan APK PT dapat dicapai dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapat pelayanan pendidikan yang memadai.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fiskal negara, strategi pemerataan dan perluasan akses pendidikan tinggi lebih diarahkan pada peran partisipasi swasta dalam *community college* mendirikan lembaga pendidikan tinggi baru. Namun, strategi perluasan akan dikaitkan dengan pencapaian mutu yang lebih baik dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global. Untuk itu, pemerintah akan terus membenahi peraturan dan perundang-undangan serta memperkuat kapasitas kelembagaan yang terkait dengan fungsi pengendalian dan penjaminan mutu.

Kebijakan perluasan pendidikan tinggi juga dilakukan searah dengan upaya membuka kesempatan bagi calon mahasiswa yang berasal dari penduduk di atas usia ideal pendidikan tinggi (di atas 24 tahun) seperti karyawan, guru, tenaga spesialis industri, termasuk dalam pendidikan nongelar dan pendidikan profesi yang mengutamakan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja industri. Perluasan akses pendidikan tinggi juga dilakukan melalui pengembangan kapasitas pembelajaran digital jarak jauh yang semakin luas dan efektif. Universitas Terbuka dan

institusi sejenis lainnya ditugaskan untuk mengimplementasikan strategi ini, dengan memanfaatkan secara optimal teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran, pengelolaan, dan akses informasi. Dalam kaitan itu, Ditjen Pendidikan Tinggi memprioritaskan investasi infrastruktur TIK untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada Universitas Terbuka dan perguruan tinggi lainnya serta Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan.

Beberapa kebijakan strategis yang disusun dalam rangka memperluas pemerataan dan akses pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas akses bagi anak usia 0-6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan di SD/MI.
- b. Menghapus hambatan biaya melalui pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) bagi semua siswa pada jenjang Dikdas baik pada sekolah umum maupun madrasah yang dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat, yang besarnya dihitung berdasarkan per siswa dikalikan dengan jumlah seluruh siswa pada jenjang tersebut. Di samping itu, dilakukan kebijakan pemberian bantuan biaya personal terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin pada jenjang Dikdas melalui pemanfaatan BOS untuk tujuan tersebut. Secara bertahap BOS akan dikembangkan menjadi dasar untuk penentuan satuan biaya pendidikan berdasarkan formula yang memperhitungkan siswa miskin maupun kaya serta tingkat kondisi ekonomi daerah setempat.
- c. Membentuk bagi daerah terpencil yang berpenduduk jarang dan terpencar, dengan menambahkan ruang belajar SMP di SD untuk menyelenggarakan program pendidikan SMP bagi lulusannya. Untuk mengatasi kesulitan tenaga pengajar dalam kebijakan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan guru SD untuk mengajar di SMP pada beberapa mata pelajaran yang relevan atau dengan meningkatkan kompetensi guru sehingga dapat mengajar di SMP. Selain itu, dilakukan upaya memaksimalkan fasilitas yang sudah ada, baik ruang kelas maupun bangunan sekolah dengan membuat jaringan sekolah antara SMP dengan SD yang ada di wilayah layanannya serta menggabungkan SD yang sudah tidak efisien lagi.

- d. Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7-15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur nonformal maupun program pendidikan terpadu/inklusif bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia layanan pendidikan khusus luar biasa. Di samping itu, untuk memperluas akses bagi penduduk usia 13-15 tahun dikembangkan SMP Terbuka melalui optimalisasi daya tampung dan pengembangan layanan pendidikan alternatif yang inovatif.
- e. Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan *cost barriers unit cost (formula based funding) catchment areas* "SD-SMP Satu Atap" melalui jalur pendidikan nonformal. Perluasan kesempatan bagi penduduk buta aksara dilakukan dengan menjalin berbagai kerjasama dengan pendidikan, seperti organisasi keagamaan, organisasi perempuan, dan organisasi lain yang dapat menjangkau lapisan masyarakat, serta PT.
- f. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses sekolah menengah (SM), khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP cukup besar. Di sisi lain, juga mengembangkan SM terpadu, yaitu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dalam satu satuan pendidikan. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus, dilakukan kebijakan strategis dalam melaksanakan program pendidikan inklusif.
- g. Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal. Perluasan SMK ini dilaksanakan melalui penambahan program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang. Di samping itu, dilakukan upaya penambahan muatan pendidikan keterampilan di SMA bagi siswa yang akan bekerja setelah lulus.
- h. Memperluas daya tampung PT yang ada dengan memberikan fasilitasi pada perguruan tinggi untuk membuka program-program keahlian yang dibutuhkan masyarakat dan mengalihfungsikan atau menutup sementara secara fleksibel program-program yang lulusannya sudah jenuh.

- i. Memperluas kesempatan belajar pada perguruan tinggi yang lebih dititikberatkan pada program-program politeknik, pendidikan tinggi vokasi dan profesi yang berorientasi lebih besar pada penerapan teknologi tepat guna untuk kebutuhan dunia kerja.
- j. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup yang relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui program-program pendidikan berkelanjutan. Perluasan kesempatan belajar sepanjang hayat dapat juga dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai fasilitas pendidikan formal yang sudah ada sebagai bagian dari harmonisasi pendidikan formal dan nonformal.
- k. Memperhatikan secara khusus kesetaraan gender, pendidikan untuk layanan khusus di daerah terpencil dan daerah tertinggal, daerah konflik, perbatasan, dan lain-lain serta mengimplementasikannya dalam berbagai program secara terpadu.
- l. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta advokasi kepada masyarakat agar keluarga makin sadar akan pentingnya pendidikan serta mau mengirimkan anak-anaknya ke sekolah dan/atau mempertahankan anaknya untuk tetap bersekolah.
- m. Melaksanakan advokasi bagi pengambil keputusan, baik di eksekutif maupun legislatif dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada pembangunan pendidikan.
- n. Memanfaatkan secara optimal sarana radio, televisi, komputer dan perangkat TIK lainnya untuk digunakan sebagai media pembelajaran dan untuk pendidikan jarak jauh sebagai sarana belajar alternatif selain menggunakan modul atau tutorial, terutama bagi daerah terpencil dan mengalami hambatan dalam transportasi, serta jarang penduduk.

Kebijakan untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilakukan melalui penguatan program-program sebagai berikut:

1. Pendanaan biaya operasi Wajar Dikdas 9 Tahun; adalah kebijakan yang menempati urutan prioritas tertinggi dalam 5 tahun ke depan. Hal ini sudah menjadi komitmen nasional seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. BOS dimaksudkan untuk menutup biaya minimal operasi

pembelajaran yang secara minimal memadai untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan kebijakan BOS tersebut, pemerintah akan mewujudkan “pendidikan dasar gratis”, yang diartikan sebagai bebas biaya secara bertahap.

2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Wajar; merupakan kebijakan strategis berikutnya, yang akan dilakukan untuk mendukung perluasan akses dikdas dalam program Wajar Dikdas. Penyediaan sarana/prasarana SD/MI/ sederajat mencakup penambahan sarana untuk pendidikan layanan khusus dan rehabilitasi serta revitalisasi sarana/prasarana yang rusak. Untuk SMP/MTs/ sederajat, kegiatan ini diarahkan untuk membangun unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, dan buku pelajaran, yang diharapkan juga akan berdampak pada peningkatan mutu Dikdas. Pembangunan USB/RKB diutamakan pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, untuk mencapai wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada tahun 2008/2009.
3. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan; juga merupakan kebijakan strategis untuk mendukung program Wajar Dikdas 9 tahun. Rekrutmen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan jumlah dan kualifikasi guru profesional diberbagai jenjang dan jenis pendidikan, pemerataan penyebaran secara geografis, keahlian, dan kesetaraan gender. Pemerataan secara geografis mempertimbangkan pengaturan mekanisme penempatan dan redistribusi guru, sistem insentif guru di daerah terpencil, pengangkatan guru tidak tetap secara selektif, serta tenaga pendidikan lainnya seperti pamong belajar pada jalur nonformal.
4. Perluasan pendidikan Wajar pada jalur nonformal; termasuk kebijakan strategis untuk mendukung program Wajar. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi (APM/APK) Dikdas melalui program Paket A dan Paket B. Program ini sangat strategis untuk menjangkau peserta didik yang memiliki berbagai keterbatasan untuk mengikuti pendidikan formal, terutama anak-anak dari keluarga tidak mampu, daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah konflik, atau anak-anak yang terpaksa bekerja.

5. Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia di atas 15 tahun; merupakan kebijakan dalam rangka memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi penduduk buta aksara. Hal ini dimaksudkan mendorong penduduk usia di atas 15 tahun untuk mengikuti kegiatan keaksaraan fungsional agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung sesuai dengan standar kompetensi keberaksaraan. Melalui kebijakan strategis ini diharapkan akan menurunkan jumlah penyandang tiga buta, yaitu buta aksara latin dan angka arab, buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar.
6. Perluasan akses SLB dan sekolah inklusif; merupakan kebijakan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif sehingga memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan belajar karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi bakat istimewa atau kecerdasan luar biasa.
7. Pengembangan pendidikan layanan khusus bagi anak usia Wajar Dikdas yang memerlukan layanan khusus (di daerah terpencil, daerah berpenduduk jarang dan terpencar, daerah bencana, daerah konflik, serta anak jalanan); adalah kebijakan untuk penduduk yang kesulitan akses karena faktor sosial ekonomi, geografis, sarana transportasi dan komunikasi. Kelompok penduduk yang kurang beruntung karena terisolasi atau hambatan lainnya, mendapat pelayanan khusus, antara lain melalui SD/MI kecil/paket A, SMP/MTs kecil/paket B, SMP terbuka dan SD-SMP "satu atap", guru kunjung dan kelas layanan khusus di SD (KLK), termasuk layanan dengan memanfaatkan TIK, seperti radio, televisi, komputer dan internet.
8. Perluasan akses PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini); merupakan kebijakan untuk mendorong terselenggaranya pelayanan pendidikan bagi anak-anak usia 0-6 tahun baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal. Kegiatan pemerintah lebih diarahkan untuk memberikan dukungan atau pemberdayaan bagi terselenggaranya pelayanan PAUD yang bermutu oleh masyarakat secara merata di seluruh pelosok tanah air. Hibah (atau imbal swadaya akan diberikan untuk pengembangan PAUD, PAUD model, dan berbagai bentuk integrasi PAUD ke dalam berbagai pelayanan anak usia dini lainnya.

9. Pendidikan kecakapan hidup; merupakan kebijakan strategis bagi peserta didik yang orang tuanya miskin dan orang dewasa miskin dan/atau pengangguran. Pendidikan ini akan memberikan kompetensi yang dapat dijadikan modal untuk usaha mandiri atau bekerja, mengingat masih besarnya jumlah mereka, maka kegiatan strategis ini menjadi sangat penting peranannya bagi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
10. Perluasan akses SMA/SMK dan SM terpadu; arah kebijakan ini lebih untuk memperluas SMK untuk mencapai komposisi jumlah SMA dan SMK yang seimbang pada tahun 2009. Perluasan SMA lebih ditekankan pada partisipasi swasta. Kebijakan ini ditempuh setelah melihat kenyataan bahwa bagian terbesar (65 persen) penganggur terdidik adalah lulusan pendidikan menengah (Sakernas, BPS 2004), yang dapat diartikan sebagai kurangnya keterampilan lulusan pendidikan menengah untuk masuk lapangan kerja.
11. Perluasan akses perguruan tinggi; pemerataan dan perluasan akses pendidikan tinggi menargetkan pencapaian jumlah mahasiswa meningkat dari 14,3 persen (tahun 2004) menjadi 18,0 persen pada tahun 2009. Investasi membangun institusi baru untuk pendidikan tinggi akademik (umum) lebih didorong pada peran swasta, sementara peran pemerintah lebih pada pengembangan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi pada perguruan tinggi yang sudah ada. Pendidikan tinggi akademik akan diperluas melalui penambahan ruang belajar, laboratorium, ruang praktikum, serta perpustakaan dalam rangka menambah daya tampung.
12. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran jarak jauh; kegiatan prioritas ini ingin mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi, pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk mendukung perluasan dan pemerataan pendidikan tinggi, pendidikan formal, dan pendidikan nonformal. Teknologi informasi dan komunikasi akan dimanfaatkan secara optimal dalam fungsinya sebagai media pembelajaran jarak jauh, dan juga untuk memfasilitasi manajemen pendidikan.
13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA, SMK/SM terpadu, SLB dan PT; kegiatan ini termasuk dalam prioritas kebijakan yang didasarkan pada

beberapa pertimbangan: bahwa kemampuan keuangan pemerintah masih terbatas untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya sementara itu ada potensi yang cukup besar pada masyarakat; kecenderungan arah pembangunan pendidikan yang ingin lebih banyak melibatkan partisipasi swasta di segala aspek penyelenggaraan, termasuk investasi, pengelolaan, dan pengawasan; sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah pusat akan lebih banyak memainkan perannya sebagai fasilitator pelayanan publik yang bertugas membuat kebijakan-kebijakan strategis, yang antara lain dilakukan melalui pengendalian dan penjaminan mutu, pengembangan standar-standar, akreditasi, dan sertifikasi dalam rangka desentralisasi pendidikan. Peran yang demikian ingin mendorong terselenggaranya pelayanan pendidikan yang mandiri (otonom), baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat (swasta). Dalam pemberian bantuan operasi penyelenggaraan pendidikan, pemerintah tidak lagi membedakan antara kepemilikan negara dan masyarakat/swasta.

Prioritas penanganan pendidikan pada tahun 2005 – 2010 lebih berkonsentrasi pada peningkatan kapasitas dan modernisasi. Program lima tahun tersebut merupakan bagian pertama guna terciptanya insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif dalam tatanan masyarakat lokal dan global difokuskan pada peningkatan daya tampung satuan pendidikan yang ada. Terlihat dalam analisa situasi pendidikan nasional sampai dengan saat ini bahwa kebutuhan/melebihi sediaan/ sarana dan prasarana pendidikan. Terlebih jika diperbandingkan antara pola sebaran penduduk Indonesia dan keberadaan infrastruktur pendidikan yang masih menuntut perhatian lebih. Apabila telah terjadi keseimbangan yang efektif antara kuantitas manusia Indonesia dengan kapasitas pendidikan nasional maka poin utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah tercapai.

Salah satu kendala dalam pemerataan pendidikan di Indonesia adalah cakupan geografisnya yang luas. Hal ini memerlukan modernisasi pada sistem dan jaringan informasi menggunakan TIK yang memadai. Luasnya wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan luasnya sebaran penduduknya dapat dipersatukan dengan jaring-jaring teknologi informasi.

Modernisasi dengan menggunakan TIK juga dapat meningkatkan sistem pengawasan pada implementasi program-program pendidikan. Dilengkapi dengan sistem informasi

manajemen yang tangguh, tantangan untuk mewujudkan sistem tata kelola yang sehat, efisien, dan akuntabel akan lebih mudah tercapai. Citra Depdiknas sebagai salah satu institusi pemerintah pun dapat terangkat.

Tema pokok pembangunan pendidikan nasional periode tahun 2005-2010 ini yang berkonsentrasi pada kapasitas dan modernisasi sangat mendukung program pemerintah, yaitu Pendidikan untuk Semua. Pemerataan akses pendidikan ke seluruh lapisan masyarakat dan ke seluruh pelosok negeri akan mempertinggi APS dan mengurangi angka buta aksara sehingga IPM Indonesia akan semakin baik. Perencanaan, proses, dan evaluasi kerja yang sesuai dan berkesinambungan akan mewujudkan transformasi rakyat Indonesia menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan. Kesepakatan dan komitmen terhadap tata nilai, terbentuknya sistem dan prosedur kerja, tersusun dan tertatanya produk hukum dan struktur organisasi, meningkatnya akuntabilitas publik, dan sasaran-sasaran lainnya yang relevan akan sangat diperlukan guna mendukung tema strategis pada periode ini.

3.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun nonformal yang mencakup sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) serta pendidikan nonformal kesetaraan sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, serta SMP, MTs dan SMP terbuka, dan pendidikan nonformal kesetaraan SMP, atau bentuk lain yang sederajat, sehingga seluruh anak usia 7-15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, dan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dalam memperoleh pendidikan, dapat memperoleh pendidikan setidaknya sampai sekolah menengah pertama atau sederajat.

3.2.1 Pemerataan dan Perluasan Akses

Pemerataan dan perluasan akses akan dilakukan dengan mengupayakan menarik semua anak usia sekolah yang sama sekali belum pernah sekolah, menarik kembali siswa putus sekolah dan lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan. Berbagai kegiatan berikut akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan program pemerataan dan perluasan.

Pemberian bantuan biaya operasional. Bantuan biaya operasional pendidikan diberikan dalam rangka membantu sekolah mencapai proses pembelajaran secara optimal. Bantuan pembiayaan tidak membedakan sekolah negeri maupun swasta, madrasah maupun sekolah umum. Target pada tahun 2009 setiap siswa pada satuan Dikdas memperoleh bantuan biaya operasional.

Penyediaan perpustakaan, buku teks pelajaran maupun nonteks pelajaran yang tidak membedakan sekolah negeri dan swasta, sekolah umum dan madrasah. Target pada tahun 2009 diharapkan setiap siswa pada satuan pendidikan memperoleh buku teks pelajaran dan satuan pendidikan memperoleh buku nonteks pelajaran.

Rehabilitasi ruang kelas yang rusak, merupakan upaya melaksanakan penyediaan sarana penunjang pendidikan yang layak untuk pendidikan dasar (SD dan SMP). Target rehabilitasi pada tahun 2007 mencapai sekitar 200 ribu ruang kelas yang rusak berat dan 300 ribu ruang kelas yang rusak ringan pada SD; sekitar 9.500 ruang kelas yang rusak berat dan lebih dari 23 ribu ruang kelas rusak ringan pada SMP.

Unit sekolah baru dan RKB. Penyediaan prasarana pendidikan termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) diupayakan dalam rangka pemerataan dan perluasan di tingkat SMP/MTs, untuk menampung peningkatan jumlah lulusan SD/MI. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di tingkat SD dilakukan dengan memanfaatkan layanan pendidikan yang sudah ada.

Perintisan pendidikan dasar 9 tahun satu atap, merupakan langkah untuk mendirikan SD-SMP satu atap atau SMP Khusus, yaitu penambahan tingkat kelas untuk penyelenggaraan pendidikan menengah pertama pada setiap SD negeri yang ada di daerah terpencil, serta berpenduduk jarang atau terpencar. Untuk itu akan dilakukan pemetaan sekolah agar program Dikdas satu atap dan SMP Terbuka dapat lebih optimal. Pada pendidikan luar biasa (PLB) upaya pemerataan dan perluasan akses dilakukan dengan pengembangan sekolah terpadu (SMP dan SMPLB) melalui pendidikan inklusif.

Penyelenggaraan kelas layanan khusus di sekolah dasar merupakan layanan pendidikan bagi anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang putus sekolah atau sama sekali belum pernah sekolah dasar sampai tamat. Layanan pendidikan dilaksanakan selama kurang satu tahun di luar kelas reguler pada sekolah dasar yang ada sebagai transisi untuk memasuki

kelas reguler. Target pada tahun 2009 ialah setiap penduduk usia sekolah dasar memperoleh layanan Dikdas.

Upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada tingkat SD dilaksanakan untuk mencapai target meningkatnya APS penduduk usia 7-12 tahun dari 99,12 persen (2005) menjadi 99,57 persen pada tahun 2009. APM SD/Paket A/MI/SDLB diusahakan akan meningkat dari 94,3 persen (2005) menjadi 95,0 persen pada tahun 2009.

Pada tingkat SMP, target yang akan dicapai yaitu meningkatnya APS penduduk usia 13-15 tahun dari 83,32 persen (2005) menjadi 96,64 persen pada tahun 2009. APK SMP/MTs/SMPLB dan Paket B diusahakan meningkat dari 85,22 persen (2005) menjadi 98 persen pada tahun 2009. APM SMP-MTs tahun 2005 sebesar 63,67 persen diusahakan meningkat menjadi 75,46 persen pada tahun 2009 sehingga dalam kurun waktu lima tahun akan terjadi kenaikan sebesar 14,79 persen. Sementara itu, pada PLB target sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya APK-PLB dari 5 persen tahun 2005 menjadi 10 persen pada tahun 2009.

3.2.2 Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing Dikdas akan dilaksanakan secara mendasar dan sistematis dalam peningkatan mutu pendidikan adalah pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. pengembangan model kurikulum perlu memperhatikan potensi peserta didik, karakteristik daerah, serta akar sosiokultural komunitas setempat, perkembangan Iptek, dinamika perkembangan global, lapangan kerja, lingkungan budaya dan seni, dan lain-lain. Pada jenjang Dikdas muatan kecakapan dasar perlu ditekankan pada kecakapan berkomunikasi (membaca, menulis, mendengarkan, dan menyampaikan pendapat, dan sebagainya), kecakapan (pemahaman diri, penguasaan diri, evaluasi diri, tanggung jawab, dan sebagainya), kecakapan (bersosialisasi, bekerja sama, mempengaruhi/mengarahkan orang lain, bernegosiasi, dan sebagainya), kemampuan mengambil keputusan (memahami masalah, merencanakan, analisis, menyelesaikan masalah, dan sebagainya). Dalam rangka perluasan pendidikan kecakapan hidup, perlu dilaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pengenalan dasar kewirausahaan dan kepemimpinan,

pengenalan dan pengembangan etika, penanaman dasar apresiasi terhadap estika dan lingkungan hidup.

Kapasitas profesi pendidik juga akan ditingkatkan agar mereka mampu membawakan proses pembelajaran efektif, sesuai dengan standar kompetensi pendidik yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran efektif diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, memotivasi, menyenangkan, dan mengasyikkan untuk mendorong peserta didik berpartisipasi aktif, berinisiatif, kreatif, dan mandiri, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan kematangan psikologis.

Pengembangan mutu dan keunggulan pendidikan dasar, juga disertai dengan program peningkatan kualitas jasmani dan pengembangan sekolah sehat. Dengan demikian dapat tercipta siswa yang sehat dan bugar, serta sekolah yang memenuhi standar sekolah sehat.

Sarana dan bahan belajar seperti perpustakaan, media pembelajaran, laboratorium bahasa/IPA/matematika, alat peraga pendidikan, buku pelajaran, dan buku nonteks pelajaran/buku bacaan lain yang relevan perlu dikembangkan. Pemerintah akan melaksanakan pengembangan naskah buku pendidikan dan melakukan pengendalian mutu buku teks pelajaran dan buku nonteks pelajaran/bacaan lainnya yang relevan. Dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan pemanfaatan TIK dalam berbagai sektor kehidupan, pemerintah akan terus mengembangkan pemanfaatan TIK untuk sistem informasi sekolah dan pembelajaran termasuk pengembangan pembelajaran secara elektronik. Hingga tahun 2009, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah (a) merancang sistem jaringan yang mencakup jaringan internet, yang menghubungkan sekolah-sekolah dengan pusat data dan aplikasi, serta jaringan intranet sebagai sarana dan media komunikasi, dan informasi intern sekolah; (b) merancang dan membuat aplikasi database, yang menyimpan dan mengolah data serta informasi sekolah, manajemen sekolah, konten-konten pembelajaran; (c) merancang dan membuat aplikasi pembelajaran berbasis portal, web, multimedia interaktif, yang terdiri atas aplikasi tutorial dan; (d) mengoptimalkan pemanfaatan TV edukasi sebagai materi pengayaan dalam rangka menunjang peningkatan mutu pendidikan; dan (e) mengimplementasikan pemanfaatan TIK secara bertahap untuk memudahkan manajemen pendidikan pada SMP dan sekaligus untuk mendukung proses pembelajaran di seluruh wilayah Indonesia.

Karena keterbatasan dana pemerintah, program wajib belajar belum dapat ditingkatkan sampai jenjang pendidikan menengah. Oleh karena itu, pendidikan kecakapan hidup (keterampilan praktis) diberikan kepada lulusan SMP/MTs yang tidak dapat melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi agar mereka dapat bekerja dan melakukan kegiatan produktif di masyarakat.

Pengembangan sekolah berkeunggulan pada Dikdas menargetkan paling tidak satu SD dan satu SMP pada masing-masing kabupaten/kota akan menjadi sekolah berkeunggulan lokal pada tahun 2009, dan target yang sama untuk sekolah bertaraf internasional. Sementara itu, dalam kaitan dengan pengembangan kecakapan berbahasa pada jenjang SMP, dilakukan upaya pengembangan program dengan sasaran sebanyak 430 buah sekolah hingga tahun 2009.

3.3 Program Pendidikan Menengah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi semua penduduk, laki-laki dan perempuan, melalui pendidikan formal yaitu SMA, SMK, MA, MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Program pendidikan menengah didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun sekolah/madrasah kejuruan dan pendidikan nonformal, guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja.

3.3.1 Pemerataan dan Perluasan Akses

Berbagai kegiatan berikut dilakukan dalam rangka melaksanakan program pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan melalui pembangunan USB, RKB, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran buku nonteks pelajaran/bacaan lainnya dan sarana belajar. Perluasan USB SMA akan lebih diarahkan untuk lebih banyak dilakukan oleh penyelenggara pendidikan swasta dengan tetap memperhatikan standar nasional pendidikan.

Sejalan dengan itu, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih merata, bermutu, serta penyediaan biaya operasional pendidikan dan beasiswa kepada anak yang kurang beruntung tetapi berprestasi, juga akan dilakukan untuk mendukung perluasan.

Untuk daerah yang mampu mencapai APM SMP di atas 95 persen dan bermutu, pemerintah mendorong daerah tersebut untuk proaktif melakukan inisiasi program dan fasilitasi pendidikan universal 12 tahun dalam rangka memperluas partisipasi pendidikan menengah. Target pada tahun 2009 sekurang-kurangnya satu kabupaten/kota setiap provinsi melakukan perintisan pendidikan universal 12 tahun.

Pengembangan model layanan alternatif pendidikan akan dilakukan khusus untuk daerah terpencil, daerah pedalaman, dan daerah tertinggal sebagai fasilitas untuk menampung lulusan SMP di daerah tersebut. Perluasan penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang dilaksanakan dengan menggunakan berbagai bentuk SMK, yaitu SMK besar di kawasan Industri, SMK kelas jauh di pesantren/institusi lain, SMK di daerah perbatasan, SMK kecil di daerah terpencil dan perdesaan, SMA terbuka, dan sekolah menengah terpadu. Target APS pendidikan menengah diusahakan mencapai 69,91 persen atau sebesar 7,5 juta orang pada tahun 2009, naik dari 56,04 persen pada tahun 2005. APK SMA/SMK/Paket C/MA/SMALB sebesar 52,2 persen (tahun 2005) akan ditingkatkan menjadi 68,20 persen pada tahun 2009, termasuk peningkatan APK SMLB.

Program pemerataan dan perluasan akses pendidikan juga diusahakan agar dapat menurunkan angka putus sekolah, angka mengulang kelas, dan meningkatnya proporsi siswa SMA/SMK/MA/MAK dan yang sederajat yang lulus ujian nasional.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja menengah di sektor manufaktur, industri pengolahan, konstruksi, pertambangan, perdagangan, jasa kemasyarakatan, pariwisata, TIK, pertanian, serta teknologi dan seni (konservatori budaya) pemerintah akan meningkatkan jumlah peserta didik SMK, yang diproyeksikan akan meningkat secara signifikan sampai dengan tahun 2009.

3.3.2 Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pada jenjang pendidikan menengah akan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. Pemerintah mengembangkan kurikulum berbasis

kompetensi, bahan ajar, model pembelajaran, dan sistem evaluasi/penilaian menuju standar nasional dan internasional. Semua bagian dari sistem dan muatan pembelajaran dikembangkan untuk mencapai pembelajaran yang bermakna dan efektif. Pada jenjang pendidikan menengah, penekanan muatan kecakapan dasar mendapat porsi yang menurun, sedangkan muatan akademik dan keterampilan hidup meningkat.

Dalam rangka meningkatkan mutu buku pendidikan, pemerintah akan mengembangkan buku pendidikan yang bermutu dengan melakukan peningkatan sistem penilaian perbukuan. Dalam rangka pendidikan kecakapan hidup, pemerintah akan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung tumbuhnya pribadi siswa, yang berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, beretika, serta memiliki apresiasi terhadap estetika dan lingkungan hidup. Guna mendorong siswa berprestasi, pemerintah juga akan melaksanakan program pembinaan dan fasilitasi untuk mempersiapkan anak-anak yang berprestasi istimewa mengikuti kompetisi tingkat nasional/internasional seperti olimpiade sains dan matematika bagi siswa SMA, sedangkan bagi siswa SMK berprestasi mengikuti promosi keterampilan siswa tingkat nasional, tingkat regional dan tingkat internasional.

Terkait dengan peningkatan mutu juga perlu dilakukan perbaikan kondisi ruang belajar. Berdasarkan data tahun 2003, jumlah ruang belajar yang rusak ringan pada SMA sekitar 4.400 ruang dan SMK sekitar 4.800 ruang, serta yang rusak berat pada SMA sekitar 1.600 ruang dan SMK sekitar 3.000 ruang.

Pemerintah juga akan melakukan peningkatan jumlah SMK secara proporsional termasuk upaya penataan bidang keahlian dan program studi di SMK serta fasilitas magang agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Penataan ini dilakukan agar lulusan sekolah menengah kejuruan dapat makin memadai untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja.

Pengembangan mutu dan keunggulan sekolah menengah juga diarahkan untuk mendorong sekolah potensial menuju kategori di atas standar nasional. Sekolah seperti ini akan terus dikembangkan menjadi sekolah berkeunggulan nasional dan internasional. Pengembangan sekolah berkeunggulan pada pendidikan menengah ditargetkan paling tidak satu SMA/SMK pada masing-masing kabupaten/kota menjadi sekolah berkeunggulan lokal dan internasional pada tahun 2009. Pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pengembangan keunggulan lokal, dan dengan luar negeri dalam pengembangan

kurikulum dan standar kompetensi untuk mengembangkan kompetensi lulusan agar dapat bersaing secara global. Salah satu orientasi pencapaian standar internasional adalah mendorong sekolah untuk dapat memperoleh sertifikat ISO.

Pengembangan mutu dan keunggulan sekolah menengah juga disertai dengan program peningkatan kualitas jasmani dan pengembangan sekolah sehat. Dengan demikian, dapat tercipta siswa yang sehat dan bugar, serta sekolah yang memenuhi standar sekolah sehat. Untuk mengantisipasi banyaknya lulusan SMA yang tidak dapat meneruskan ke pendidikan tinggi, pendidikan kecakapan hidup akan diberikan pada siswa SMA. Untuk peserta yang berasal dari keluarga miskin tetapi berpotensi, pemerintah akan memberikan subsidi beasiswa.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah kejuruan dilakukan dengan mengembangkan program studi/jurusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, antara lain teknologi pengolahan dan pengemasan makanan teknologi otomotif modern, telematika, hotel dan restoran, bidang kelautan, seni etnik dan kerajinan industri manufaktur, serta teknologi pertanian nilai tinggi. SMK di setiap daerah juga didorong untuk mengembangkan program studi yang berorientasi pada keunggulan lokal, baik pada aspek keterampilan maupun kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan akan diberikan untuk membekali lulusan SMK mampu mengembangkan sendiri lapangan kerja bagi dirinya. Pengembangan kecakapan berwirausaha akan dilakukan seluasluasnya untuk mendorong tumbuhnya wiraswastawan sebanyak-banyaknya, yang selain menjadi wahana kemandirian berusaha bagi pelaku-pelakunya, juga memberikan dampak makro yang sangat positif bagi pengembangan ekonomi nasional.

Dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan pemanfaatan TIK dalam berbagai sektor kehidupan, pemerintah akan terus mengembangkan pemanfaatan TIK untuk sistem informasi sekolah dan pembelajaran termasuk pengembangan. Hingga tahun 2009, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah (a) merancang dan membuat aplikasi yang menyimpan dan mengolah data dan informasi sekolah, manajemen sekolah, muatan pembelajaran; (b) merancang dan membuat aplikasi pembelajaran berbasis portal, web, multimedia interaktif, yang terdiri atas aplikasi tutorial dan; (c) mengoptimalkan pemanfaatan TV edukasi sebagai materi pengayaan dalam rangka menunjang peningkatan mutu pendidikan; dan (d) mengimplementasikan pemanfaatan TIK secara bertahap untuk

memudahkan manajemen pendidikan pada SMA dan SMK dan sekaligus untuk mendukung proses pembelajaran di seluruh wilayah Indonesia.

3.4 Program Pendidikan Tinggi

Program pembangunan PT bertujuan pertama, meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi semua warga negara melalui program-program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor; kedua, meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan Iptek, untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa meningkatkan kinerja perguruan tinggi dengan jalan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan pendidikan tinggi secara otonom melalui Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHPT).

3.4.1 Pemerataan dan Perluasan Akses

Program pemerataan dan perluasan akses pendidikan tinggi akan dilaksanakan dengan pemberian bantuan pembiayaan untuk kelompok masyarakat yang miskin tetapi potensial agar dapat belajar di perguruan tinggi, melalui skema (a) program beasiswa dengan target penerima yang bervariasi dari aspek-aspek kemampuan ekonomi, gender, bakat khusus, dsb; (b) program pinjaman dana lunak melalui bunga rendah dan/atau tenggang pembayaran; dan (c) program yang membebaskan beberapa jenis biaya pendidikan, yang variasinya terus dikembangkan sesuai kebutuhan.

Membangun kemitraan antara LPTK dengan sekolah, untuk memperluas kapasitas dalam menghasilkan guru yang dapat mencukupi kebutuhan jumlah dan mutu, khususnya untuk menunjang keberhasilan program Wajar Dikdas dan program perluasan jalur/jenjang/jenis pendidikan lainnya.

Pengembangan pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi, dengan proyek percontohan pada beberapa perguruan tinggi dan pusat pelatihan hingga tahun 2009, yaitu ITB, ITS, UGM, IPB, UI, UNRI, UNDANA, UNHAS, PENS, dan POLMAL. Diseminasi proyek ini akan dikembangkan pada UNLAM, UM, UNY, UNP, UNHALU, UNCEN dan PT lainnya.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan tinggi menargetkan pencapaian jumlah mahasiswa sebesar 4,5 juta orang pada tahun 2009. Sementara itu, APK diharapkan dapat ditingkatkan dari 14,62 persen pada tahun 2004 menjadi 18,00 persen pada tahun 2009.

3.4.2 Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Program peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi akan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penerapan otonomi keilmuan dimaksudkan untuk mendorong perguruan tinggi melaksanakan tugasnya sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kualitas/kuantitas dan diversifikasi bidang penelitian di lingkungan perguruan tinggi.

Pengembangan kurikulum dan pembelajaran efektif dalam kelompok mata kuliah: iman dan takwa serta akhlak mulia, Iptek, estetika, serta kepribadian. Kelompok mata kuliah iman dan takwa serta akhlak mulia dimaksudkan untuk meningkatkan potensi keimanan sehingga dapat memiliki ketakwaan personal dan sosial. Kelompok mata kuliah Iptek dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pemanfaatan Iptek dan pengembangannya; kelompok mata kuliah/kegiatan estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitifitas estetis dan humanisme; dan kelompok mata kuliah kepribadian dimaksudkan untuk mencerahkan kesadaran kepribadian. Peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, etika dan kepribadian, serta wawasan kebangsaan, diintegrasikan dalam proses pembelajaran semua mata kuliah.

Pengembangan *community collage* akan dilakukan untuk mengenalkan model pendidikan kejuruan/vokasi yang fleksibel menjawab kebutuhan pasar. memfasilitasi eksistensi program kejuruan/vokasi berbasis keunggulan lokal, dengan penyediaan tenaga terampil untuk industri lokal, nasional, multi-nasional, serta pengembangan kewirausahaan. Pengembangan yang ada harus bersinergi dengan industri, politeknik, maupun lembaga pendidikan yang relevan. Selain itu didorong untuk peningkatan APK PT serta untuk mengurangi jumlah pengangguran pada kabupaten/kota atau provinsi bersangkutan.

Target-target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan jumlah program studi di perguruan tinggi yang akreditasi A atau B, dari jumlah 1000 program studi pada tahun 2005 menjadi sebanyak 3.000 program studi pada tahun 2009. Akan dikembangkan pula program studi / jurusan bertaraf internasional, dengan menargetkan tercapainya 32 program studi/jurusan sampai dengan tahun 2009, dengan memperhatikan kepentingan pengembangan ilmu, pelestarian budaya, serta persaingan keahlian di forum antarbangsa. Selain itu, untuk keperluan peningkatan efisiensi akan diupayakan agar tidak ada lagi perguruan tinggi yang jumlah mahasiswanya kurang dari 100 orang.
- b. Peningkatan efektivitas waktu studi sehingga angka kelulusan tepat waktu mencapai 80 persen untuk PTN dan 50 persen untuk PTS.
- c. Mengupayakan untuk tercapainya rasio keluaran terhadap jumlah mahasiswa secara keseluruhan menjadi 20 persen untuk program sarjana dan 30 persen untuk program diploma.
- d. Lama waktu tunggu lulusan dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan untuk bidang-bidang keahlian tertentu diharapkan dapat dipersingkat, yaitu yang tidak lebih dari 6 bulan dapat mencapai 40 persen.
- e. Peningkatan kualitas daya saing di tingkat Asia dengan memunculkan minimal 4 perguruan tinggi yang masuk dalam 100 besar perguruan tinggi di Asia atau 500 besar perguruan tinggi dunia.
- f. Peningkatan status perguruan tinggi menjadi 50 persen yang berbadan hukum pendidikan tinggi negeri pada tahun 2009, dan 40 persen berbadan hukum pendidikan tinggi swasta.
- g. Penataan proporsi bidang ilmu IPA: IPS/Humaniora yang pada tahun 2004 berbanding sebagai (30:70) diupayakan untuk pada tahun 2009 menjadi (50:50) di lingkungan PTN dan (35:65) di lingkungan PTS.
- h. Peningkatan kualifikasi dosen berpendidikan S2/S3 yang baru mencapai 54,55 persen untuk PTN dan 34,50 persen untuk PTS pada tahun 2004, menjadi 85 persen untuk PTN dan 55 persen untuk PTS pada tahun 2009. Di samping itu jumlah guru besar yang baru mencapai 3 persen pada tahun 2004 diupayakan dapat mencapai 10 persen dari jumlah dosen yang ada pada PTN pada tahun 2009.

- i. Pelatihan tenaga teknis di perguruan tinggi pada jangka waktu 5 tahun ke depan diupayakan mencapai 100 jenis pelatihan fungsional, yang menjangkau 7.500 personil pendidikan tinggi dengan rincian 70 persen dari PTN dan 30 persen dari PTS.
- j. Pelaksanaan penelitian untuk 5 tahun ke depan diusahakan dapat mencapai 10 persen dari seluruh anggaran Ditjen Dikti, dan menghasilkan berbagai hak atas kekayaan intelektual termasuk permohonan mencapai 50 buah dan hak cipta mencapai 200 judul, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta mendorong penelitian untuk penyelesaian masalah-masalah sosial.
- k. TIK (kemampuan akses, memanfaatkan dan menggunakan radio, televisi, komputer dan internet) 80 persen untuk kalangan mahasiswa dan dosen.
- l. Pengendalian jumlah dan ragam program studi yang sesuai dengan kebutuhan di pendidikan tinggi.
- m. Pembangunan dan penambahan infrastruktur pendidikan tinggi sehingga tercapai pemenuhan kriteria rasio ruang kuliah $2m^2$ per mahasiswa, rasio ruang laboratorium $9m^2$ per mahasiswa, dan ruang dosen $9m^2$ per dosen.
- n. Peningkatan kapasitas dan efektivitas layanan perpustakaan kepada civitas akademika kampus melalui peningkatan penyediaan bahan bacaan wajib mata kuliah mencapai 80 persen dari mata kuliah yang ditawarkan perguruan tinggi, dan layanan perpustakaan sekurang-kurangnya mencapai 40 jam per minggu.

3.5 Strategi Pembiayaan

Pendanaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundangan yang berlaku, kebijakan Mendiknas, program-program pembangunan pendidikan dan sasarannya, serta implementasi program dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam lima tahun ke depan, pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan masih akan menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, baik sarana-prasarana, ketenagaan, maupun anggaran pendidikan baik dari sumber APBN maupun APBD. Oleh karena itu, strategi pembiayaan disusun untuk menyalahi keterbatasan sumber daya tersebut agar pelaksanaan program pembangunan pendidikan dapat memberikan andil yang signifikan terhadap pencapaian

tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.

Mengingat terbatasnya anggaran pemerintah untuk pendidikan, strategi pembiayaan pendidikan nasional dalam lima tahun ke depan disusun dalam skala prioritas. Penetapan prioritas pembangunan pendidikan didasarkan pada (a) keberpihakan pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung karena faktor-faktor ekonomi, geografi, dan sosial-budaya, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (b) tuntutan prioritas karena adanya perubahan kebijakan pendidikan, termasuk dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara pada setiap satuan, jenjang dan jenis pendidikan baik pada jalur formal maupun nonformal, serta untuk menjawab komitmen internasional dan kepentingan nasional; dan (c) prediksi perkembangan kemampuan keuangan negara dan potensi kontribusi masyarakat terhadap pendidikan.

Kebijakan desentralisasi pendidikan menuntut peningkatan kemampuan daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat menyusun strategi pembiayaan untuk dapat mencapai target-target program yang disusun dalam perencanaan pembangunan pendidikan untuk lima tahun ke depan. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam berbagai aspek manajemen penyelenggaraan pendidikan itu merupakan bagian dari strategi implementasi Renstra Depdiknas. Renstra 2005-2009 yang disusun oleh pemerintah pusat harus dijabarkan oleh setiap unit utama yang ada di Depdiknas (empat Ditjen, Setjen, Itjen, dan Balitbang) menjadi Renstra unit utama untuk lima tahun ke depan. Renstra unit utama memuat perencanaan program yang akan dilaksanakan secara berkala setiap tahun untuk dapat mencapai target 15 program RPJM pada tahun 2009 karena target-target tahunan unit utama pada dasarnya merupakan penjabaran dari target lima tahun Renstra.

Selanjutnya, pemerintah daerah harus menjabarkan program-program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan di daerah dalam rencana strategis lima tahun (Renstrada) 2005-2009. Berdasarkan Renstrada, pemerintah daerah membuat perencanaan pembiayaan pembangunan pendidikan untuk lima tahun ke depan untuk mencapai target-target program di daerahnya hingga tahun 2009. Strategi pembiayaan disusun dengan memperhitungkan proyeksi (a) pendapatan asli daerah (PAD); (b) dana perimbangan yang meliputi dana bagi

hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK); (c) dana otonomi khusus dan penyeimbang; dan (d) perkiraan alokasi belanja pemerintah pusat berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan (DTP). Sumber pendanaan lainnya yang dapat diperhitungkan adalah bantuan luar negeri, khususnya untuk pembiayaan program-program prioritas.

Karena keterbatasan keuangan pemerintah pusat dan juga kendala daerah meningkatkan PAD, kesenjangan pendanaan di daerah akan sangat mungkin terjadi. Terjadinya kesenjangan itu diakibatkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan pendanaan untuk mencapai target-target program yang telah ditentukan. Untuk menutup kesenjangan pendanaan, pemerintah daerah harus memperhitungkan sumber-sumber pendanaan lain yang mungkin dapat diupayakan, seperti bantuan luar negeri (donor) dan kontribusi masyarakat yang harus ditelaah per program. Semua kemungkinan skenario pembiayaan tersebut harus tertuang dalam Renstrada 2005-2009, sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerahnya, dalam rangka mendukung pencapaian target-target nasional program pembangunan jangka menengah 2005-2009.

3.5.1 Memperjelas Pemihakan terhadap Masyarakat Miskin

Pemihakan terhadap masyarakat miskin dilakukan dengan menghilangkan berbagai hambatan biaya bagi orangtua peserta didik, dalam rangka meningkatkan jumlah peserta didik SD dan SMP yang berasal dari keluarga miskin sehingga wajib belajar 9 tahun dapat diselesaikan. Hambatan tersebut terdiri atas tiga jenis pembiayaan pendidikan yang selama ini dibebankan kepada orangtua peserta didik, yaitu biaya operasi satuan pendidikan, biaya pribadi, dan biaya investasi. Dengan semakin kecilnya hambatan biaya khususnya bagi keluarga miskin, diharapkan seluruh anak usia sekolah dapat mengikuti pendidikan paling tidak sampai dengan pendidikan dasar sembilan tahun.

Pemerintah akan mulai menghilangkan hambatan biaya seluruh item biaya operasi satuan pendidikan di luar gaji pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk melaksanakan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pemerintah secara bertahap membebaskan seluruh beban biaya operasi satuan pendidikan negeri dan swasta menuju pendidikan dasar bebas biaya. Walaupun orangtua siswa dibebaskan dari biaya operasi satuan

pendidikan, masih banyak keluarga miskin yang tidak mampu memenuhi biaya pribadi untuk anaknya sehingga tidak dapat pergi ke sekolah. Untuk mengantisipasi menurunnya APK SMP karena hambatan biaya pribadi, pemerintah menyediakan bantuan beasiswa yang disalurkan melalui biaya satuan pendidikan ke sekolah untuk menutup biaya pribadi bagi siswa miskin agar tidak terhambat masuk sekolah. Bantuan beasiswa juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi sekolah. Hambatan biaya lainnya adalah biaya investasi seperti lahan, prasarana pendidikan, sarana pendidikan, dan modal kerja yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang dapat mendorong terwujudnya mutu proses pembelajaran di sekolah. Pada tahun 2005, pemerintah dan pemerintah daerah menanggung sebagian besar dari biaya investasi satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Biaya investasi tersebut difokuskan pada perbaikan prasarana dan sarana pendidikan (gedung, ruang kelas, dan sarana belajar) yang mendesak untuk direhabilitasi agar dapat melindungi guru dan siswa melaksanakan proses belajar dengan baik.

3.5.2 Penguatan Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, antara lain mengatur sistem pembiayaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut undang-undang tersebut sumber keuangan APBD adalah PAD, DAU, dan dana bagi hasil (DBH). Dengan mempertimbangkan kemampuan yang berbeda antara daerah, DAU diberikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Selain itu, melalui instrumen pendanaan DAK, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, setiap departemen membantu pembiayaan pembangunan sektornya di daerah. Ketiga pola pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat keuangan daerah, baik dalam rangka pelaksanaan kebijakan khusus yang menjadi prioritas nasional (pola DAK), maupun kewenangan pusat yang dilimpahkan dan ditugaskan ke daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan).

Fungsi pembiayaan pendidikan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan

urusan pendidikan. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sektor pendidikan adalah salah satu yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Depdiknas akan terus membantu provinsi dan kabupaten/kota dalam pembiayaan pembangunan sektor pendidikan melalui ketiga pola pendanaan itu untuk mengatasi kekurangan kemampuan pembiayaan bagi sektor pembangunan pendidikan, sampai tercapainya kondisi pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui peningkatan PAD, dan atau peningkatan alokasi DAU.

Bersamaan dengan itu, komitmen dan kemampuan kabupaten/kota dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan terus ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas. Bantuan pembiayaan dan pengembangan kapasitas pada prinsipnya diarahkan untuk makin memperkuat pelaksanaan desentralisasi dan kemandirian pemerintah kabupaten/kota (otonom). Pelaksanaan desentralisasi di bidang pendidikan harus terus mendorong pemerintah daerah (dinas pendidikan) dan satuan pendidikan untuk dapat mencapai otonomi pengelolaan pendidikan. Pemerintah bersama pemerintah provinsi akan mengambil peran sebagai mitra pemerintah kabupaten/kota dalam pembiayaan dengan pola dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pembiayaan bersama (*cost sharing*).

Dana dekonsentrasi pemerintah pusat diberikan kepada provinsi untuk membiayai pelaksanaan kewenangan pusat yang dijalankan oleh provinsi sebagai wakil pemerintah di daerah. Penggunaan dana dekonsentrasi dalam rangka pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan, termasuk kegiatan evaluasi, akreditasi, sertifikasi dan pengembangan kapasitas.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar nasional yang diharapkan. Penggunaan DAK antara lain untuk pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi bangunan SD yang rusak berat yang akan diselesaikan pada tahun 2008, dan pembangunan sarana untuk memperluas akses dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Pemberian DAK memerlukan dana pendamping dari daerah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 10 persen dari besarnya DAK. Tujuan menyertakan dana pendamping adalah untuk menumbuhkan rasa kepemilikan daerah atas aset yang dibangun dengan bantuan DAK tersebut.

Dana tugas pembantuan bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Pelaksanaan kewenangan yang harus berupa kegiatan fisik itu dijalankan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh gubernur, bupati/walikota. Sementara itu, pembiayaan bersama merupakan komitmen antara pemerintah dan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Perimbangan pembiayaan pendidikan antara pusat, provinsi, kabupaten dan kota disepakati secara adil, proporsional, transparan, dan sesuai dengan kemampuan fiskal dan potensi.

3.5.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Depdiknas

Rencana pembiayaan yang akan dijelaskan dalam bagian ini mencakup pendanaan pendidikan nasional untuk pembiayaan pembangunan pendidikan, baik secara keseluruhan maupun hanya pada Depdiknas serta pembiayaan program prioritas Depdiknas sesuai dengan RPJM. Skenario pendanaan pendidikan nasional untuk pembiayaan pembangunan pendidikan serta untuk memenuhi amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) menggunakan APBN dan sesuai dengan RPJMN 2004-2009.

Sementara itu, pembiayaan dengan pendekatan ideal digunakan untuk memberikan gambaran besarnya anggaran yang sebenarnya diperlukan dalam membangun pendidikan yang bermutu sesuai dengan tujuan reformasi pendidikan dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Hal ini menyangkut konsekuensi upaya mencapai standar nasional pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, seperti standar pengelolaan, standar kompetensi guru, dan standar sarana/prasarana. Rencana pembiayaan pembangunan pendidikan dan program prioritas sampai dengan tahun 2009 diuraikan di bawah ini.

Pembiayaan pembangunan pendidikan dalam rangka pemerataan dan perluasan akses; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, bersumber pada APBN, APBD dan dana masyarakat. Dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang dicanangkan pada RPJMN 2004-2009, total anggaran pendidikan pada tahun 2009 akan mencapai 212,64 triliun atau setara dengan 5,5

persen dari PDB pada tahun yang sama. Anggaran sektor pendidikan pada pemerintah pusat pada tahun 2009 akan mencapai 127,34 triliun, sedangkan anggaran sektor pendidikan pada pemerintah daerah akan mencapai 85,30 triliun. Persentase anggaran sektor pendidikan pemerintah pusat terhadap belanja pemerintah pusat, tumbuh sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan DPR yaitu dari 9,3 persen pada tahun 2005 menjadi 20,1 persen pada tahun 2009 dan ini untuk memenuhi UUD 1945 pasal 31 ayat (4). Skenario pendanaan pendidikan nasional selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skenario Pendanaan Pendidikan

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009
1. Pertumbuhan ekonomi (%)	5,7	6,2	6,7	7,2	7,6
2. Inflasi (%)	8	7	5	4	3
3. PDB (triliun Rp)	2.647,55	3.040,00	3.405,86	3.797,06	4.208,21
4. Belanja pemerintah pusat dalam APBN (triliun Rp)	411,67	427,60	479,06	534,09	591,92
5. Belanja pemerintah daerah dalam APBN (triliun Rp)	153,40	220,07	246,56	274,88	304,64
6. Anggaran pendidikan pemerintah pusat (persentase dari '4')	9,3	12,0	14,7	17,4	20,1
7. Anggaran pendidikan pemerintah daerah (persentase dari '5')	20,1	22,0	24,0	26,0	28,0
8. Anggaran pendidikan pemerintah pusat (termasuk gaji guru, triliun Rp)	42,79	56,81	76,75	100,21	127,34
9. Anggaran pendidikan pemerintah daerah (termasuk gaji guru, triliun Rp)	46,50	48,42	59,17	71,47	85,30
10. Total anggaran pendidikan (triliun Rp)	89,29	105,23	135,92	171,68	212,64
11. Persentase anggaran pendidikan terhadap PDB (%)	3,37	3,46	3,99	4,52	5,05

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Depdiknas

Besarnya pembiayaan pembangunan pendidikan di bawah Depdiknas yang meliputi biaya operasional dan biaya investasi dihitung dengan menggunakan perhitungan biaya operasional tahun 2005 serta menggunakan besarnya biaya satuan per siswa per tahun menurut jenjang.

**Tabel 3.2 Biaya Satuan Pendidikan Total (BSPT) Masing-Masing Sekolah
Tahun 2005 (Rupiah)**

No	Jenjang Pendidikan	Negeri	Swasta
1	SD	8.079	8.724
2	MI	10.198	6.682
3	SMP	10.682	9.828
4	MTs	12.002	7.587
5	SMA	13.220	11.505
6	MA	13.203	10.348
7	SMK	11.154	11.505

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Depdiknas

Rata-rata BSPT ideal antara 1,31 kali sampai dengan 1,48 kali rata BSPT faktual. Perhitungan biaya operasional untuk tahun 2009 menggunakan besarnya biaya satuan per siswa per tahun menurut jenjang pada sekolah dengan mutu yang sangat baik. Perhitungan biaya investasi didasarkan pada kebutuhan biaya untuk pengadaan lahan, sarana dan prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia. Seperti telah disinggung di depan, baik biaya operasional maupun biaya investasi dihitung sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mengupayakan pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Hal ini berarti proyeksi pembiayaan telah memperhitungkan optimalisasi penggunaan dana pemerintah dan kontribusi masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas manajemen, termasuk proporsi kontribusi masyarakat atau pemerintah yang makin tinggi pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Proyeksi juga memperhitungkan pengaruh variabel ekonomi makro.

Tabel 3.3 memuat skenario pendanaan pendidikan di bawah Depdiknas dengan rencana pembiayaan dengan metode perhitungan di atas. Nomor 1 merupakan jumlah nilai total biaya operasional dan biaya investasi yang merupakan nilai total kebutuhan pembiayaan pembangunan pendidikan di bawah Depdiknas dalam lima tahun ke depan di mana masing-masing sudah memperhitungkan asumsi inflasi 7 persen untuk biaya operasional dan 10 persen untuk biaya investasi.

**Tabel 3.3 Skenario Pendanaan Pendidikan di bawah Depdiknas
(Triliun Rupiah)**

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009
1. Kebutuhan pembiayaan pendidikan	108,3	122,7	138,7	163,2	183,4
2. Pendanaan pendidikan oleh masyarakat	43,1	49,1	55,5	62,4	70,0
3. Anggaran Depdiknas (80% dari tabel 3.1. no.8)	34,23	45,45	61,40	80,16	101,87
I. Gaji dan tunjangan pendidik	3,00	3,50	15,49	27,58	31,48
a. Gaji pendidik	3,00	3,50	4,03	4,63	5,32
b. Tunjangan fungsional Dosen negeri dan swasta	-	-	1,20	1,20	1,20
c. Tunjangan fungsional Guru negeri dan swasta	-	-	4,26	10,74	10,74
d. Tunjangan profesi pendidik Guru	-	-	3,20	6,41	9,61
e. Tunjangan profesi pendidik Dosen	-	-	1,80	3,60	3,60
f. Tunjangan pendidik daerah khusus	-	-	1,00	1,00	1,00
II. Diluar gaji dan tunj. pendidik	31,23	41,95	45,91	52,59	67,96
a. Operasional non gaji pendidik	9,37	12,58	13,77	15,78	20,39
b. Dana diskresi termasuk investasi	21,86	29,36	32,14	36,81	47,58

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Depdiknas

Sementara itu, anggaran Depdiknas tahun 2005 yang berasal dari APBN sebesar 34,23 triliun, sedangkan kontribusi pendanaan pendidikan dari masyarakat sebesar 43,1 triliun. Untuk mengetahui kemungkinan pemenuhan kekurangan dana, sumber-sumber dana yang dapat diperhitungkan di luar pemerintah ialah tambahan pembiayaan dari pemerintah daerah, masyarakat (untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi), dan donor luar negeri.

**Tabel 3.4 Perkiraan Yang Mungkin Dipenuhi oleh Masyarakat
dan Bantuan Luar Negeri (Triliun Rupiah)**

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009
1. Kebutuhan pembiayaan pendidikan di bawah Depdiknas	108,3	122,7	138,7	163,2	183,4
2. Anggaran Depdiknas	34,23	45,45	61,40	80,16	101,87
3. Kekurangan kebutuhan	74,07	77,25	77,30	83,04	81,53
4. Perkiraan donor luar negeri	5,42	6,14	6,94	8,16	9,17
5. Kontribusi dana masyarakat	43,10	49,10	55,50	62,40	70,00
6. Jumlah '4' dan '5'	48,52	55,24	62,44	70,56	79,17
Kekurangan (<i>fiscal gap</i>)	25,56	22,02	14,87	12,48	2,36

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Depdiknas

Tabel 3.4 menampilkan skenario kemungkinan pemenuhan kekurangan dana yang dapat dipenuhi oleh masyarakat dan bantuan luar negeri atau donor tahun 2005-2009. Nomor 1 adalah total kebutuhan pembiayaan di bawah Depdiknas; Nomor 2 merupakan perkiraan anggaran Depdiknas yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR. Nomor 3 adalah kekurangan kebutuhan dana, setelah dikurangi anggaran hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Nomor 4 merupakan asumsi besarnya pemenuhan oleh donor luar negeri, sebesar 5 persen dari total kebutuhan pembiayaan 2005-2009 di bawah Depdiknas. Nomor 5 adalah perkiraan besarnya dana kontribusi masyarakat pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Nomor 6 merupakan penjumlahan dari perkiraan donor luar negeri (Nomor 4), dan perkiraan kontribusi dana masyarakat (Nomor 5).

Dari jumlah pada nomor 6 (jumlah perkiraan kontribusi donor luar negeri dan kontribusi masyarakat), diperoleh kekurangan dana berturut-turut sebesar (dalam rupiah) 25,56 triliun (2005); 22,02 triliun (2006); 14,87 triliun (2007); 12,48 triliun (2008); dan 2,36 triliun (2009). Sejalan dengan meningkatnya kemampuan keuangan dari berbagai sumber itu, juga makin membaik walaupun sampai dengan tahun 2009 jumlahnya masih 2,36 triliun rupiah. Beberapa alternatif untuk menutup kekurangan dana ialah dengan mengupayakan peningkatan sumber pendanaan dari pemerintah daerah, partisipasi pendanaan yang makin besar dari masyarakat, atau meningkatkan bantuan luar negeri (donor).

BAB IV

ANALISIS HASIL

Analisis diawali dengan melakukan rekonstruksi SAM Pendidikan Indonesia tahun 2006. Kemudian SAM hasil rekonstruksi ini dianalisa untuk menggambarkan keadaan awal (*benchmark*) sebelum adanya perubahan atau kebijakan pengalokasian subsidi anggaran pendidikan. Selanjutnya dilakukan beberapa simulasi pengalokasian anggaran pendidikan untuk dilihat dampaknya terhadap distribusi pendapatan rumah tangga dan penyediaan pekerja berpendidikan S1 ke atas. Untuk pengaruh subsidi pendidikan terhadap distribusi pendapatan rumah tangga dilakukan analisis jalur dengan menggunakan program MATS.

4.1 Penyusunan SAM Pendidikan Indonesia Tahun 2006

Penyusunan SAM Pendidikan Indonesia Tahun 2006 menggunakan metode RAS dengan berdasarkan pada angka sementara SAM Indonesia tahun 2005. Sebelum melakukan RAS, terlebih dahulu dikumpulkan data-data sebagai berikut:

- i. Angka sementara SAM Indonesia tahun 2005
- ii. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2006
- iii. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2005
- iv. Survei Upah Triwulanan tahun 2006
- v. Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR) tahun 2006
- vi. Survei Khusus Badan Usaha (SKBU) tahun 2006
- vii. Neraca Pemerintah tahun 2006
- viii. Neraca Perusahaan tahun 2006

Tahapan penyusunan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- i. Menyiapkan SAM Indonesia tahun 2005 (13 x 13).
- ii. Menyiapkan PDB penggunaan menurut institusi.
- iii. Menghitung rasio balas jasa faktor produksi terhadap total PDB yang terdapat dalam SAM Indonesia tahun 2005. Mendistribusikan PDB Indonesia tahun 2006 menurut balas jasa faktor produksi berdasarkan rasio tersebut.
- iv. Menyusun SAM Indonesia tahun 2006 (13 x 13) dengan memindahkan hasil penghitungan (i) dan (ii) ke dalam matrik yang telah disediakan. Kemudian

mengestimasi sel-sel matrik yang masih kosong dengan rasio yang ada pada matrik SAM Indonesia 2005 dengan isian nilai PDB baik penggunaan maupun sektoral. Sebagai *balancing*, setiap neraca ada satu sel yang menjadi penyeimbang.

- v. Setelah SAM Indonesia tahun 2006 (13 x 13) diperoleh, balas jasa faktor produksi tenaga kerja yang sudah diperoleh dari poin iii didistribusikan dengan menggunakan proporsi angka sementara SAM tahun 2005. Basis data yang digunakan adalah tenaga kerja dan jam kerja dari Sakernas dan upah tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan pekerja dari Survei Upah. Dari poin ini diperoleh 3 informasi, yaitu jumlah ekivalen tenaga kerja, rata-rata upah gaji dan total balas jasa tenaga kerja menurut sektor dan tingkat pendidikan pekerja.
- vi. Langkah berikutnya adalah mencari matrik transaksi antar sektor, yaitu dengan mendistribusikan sel transaksi antar sektor dalam matrik SAM (13 x 13) dengan menggunakan matrik transaksi antar sektor yang terdapat dalam angka sementara SAM tahun 2005.
- vii. Merinci konsumsi institusi dari PDB penggunaan (ii) menjadi konsumsi menurut sektor.
- viii. Menghitung neraca rumah tangga yang berbasis data dari SKTIR. Dimana rumah tangga dirinci menurut 10 golongan, rumah tangga golongan I adalah 10 persen golongan rumah tangga berpendapatan paling rendah, rumah tangga golongan II adalah 10 persen rumah tangga berpendapatan di atas golongan I, dan seterusnya hingga golongan rumah tangga X adalah 10 persen rumah tangga berpendapatan paling atas. Dengan demikian, didalam satu kelompok golongan rumah tangga mempunyai jumlah rumah tangga yang sama dengan kelompok rumah tangga yang lainnya. Dengan mengasumsikan jumlah anggota rumah tangga sama, rumah tangga yang punya anak sekolah dan tidak punya anak sekolah secara proporsional untuk setiap golongan rumah tangga sama, maka kecenderungan setiap golongan akan memperoleh peluang subsidi pendidikan yang sama. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis distribusi pendapatan.
- ix. Transfer rumah tangga dihitung berdasarkan informasi total penerimaan transfer dan pengeluaran transfer menurut golongan rumah tangga, kemudian distribusinya dihitung berdasarkan proporsi SAM sementara tahun 2005.
- x. Neraca pemerintah dihitung berdasarkan data neraca pemerintahan yang diperoleh dari laporan keuangan pusat dan daerah. Neraca pemerintahan berisi informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran pemerintah seperti penerimaan pajak, transfer,

konsumsi pemerintah dan informasi lainnya yang diperlukan dalam penyusunan SAM.

- xii. Neraca perusahaan dihitung berdasarkan hasil olahan survei khusus badan usaha. Neraca perusahaan berisi informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran perusahaan seperti penerimaan perusahaan, pembayaran pajak, transfer, dan informasi lainnya yang diperlukan dalam penyusunan SAM.
- xiii. Menyusun SAM Pendidikan Indonesia tahun 2006 dengan memasukan setiap transaksi dalam uraian vii sampai xi ke dalam matrik SAM Pendidikan Indonesia 2006 (43 x 43). Untuk keseimbangan seluruh neraca dilakukan penyeimbangan di salah satu sel di setiap neraca.

4.2 Analisis Deskriptif SAM Indonesia Tahun 2006

Dari tabel SAM Indonesia tahun 2006 (13x13) seperti terlihat pada Tabel 4.1 dapat diperlihatkan bahwa pendapatan faktor produksi tenaga kerja Indonesia (dari upah dan gaji ditambah dengan imputasi upah dan gaji) pada tahun 2006 sebesar Rp 1.712,5 triliun; sedangkan pendapatan kapital sebesar Rp 1.549,3 triliun. Jumlah kedua pendapatan tersebut memberikan dugaan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar biaya faktor (*at factor costs*), sebesar Rp 3.261,8 triliun. Bila ditambah dengan pajak tidak langsung neto yang sebesar Rp 76,4 triliun, maka PDB Indonesia tahun 2006 diperkirakan sebesar Rp 3.338,2 triliun.

Dari PDB tersebut yang dapat dinikmati oleh masyarakat hanya sebesar Rp 2.212,5 triliun. Sisa dari nilai PDB tersebut menjadi pendapatan perusahaan, pemerintah dan institusi di luar negeri yang melakukan aktivitas ekonominya di Indonesia. Selain dari balas jasa yang merupakan bagian dari PDB, rumah tangga juga memperoleh transfer, baik dari rumah tangga lain, pemerintah, perusahaan dan luar negeri. Dengan demikian total dari pendapatan seluruh rumah tangga menjadi Rp 2.524,7 triliun.

Apabila golongan rumah tangga diklasifikasikan secara desil berdasarkan jumlah penduduk, maka 10 persen rumah tangga golongan paling bawah hanya menikmati pendapatan rumah tangga secara keseluruhan sebesar Rp 35,09 triliun. Untuk 10 persen golongan rumah tangga paling kaya menikmati pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1.075,23 triliun atau sekitar 43 persen. Ini menunjukkan bahwa gap pendapatan antara rumah tangga 10 persen termiskin dengan rumah tangga 10 persen terkaya sebesar 1 banding 31.

Tabel 4.1 SAM INDONESIA 2006 (13 x 13) (Triliun Rupiah)

	I. Faktor Produksi		II. Institusi			III. Neraca Sektor				IV. Neraca Lainnya			Jumlah
	Tenaga Kerja	Bukan Tenaga Kerja	Rumah tangga	Perusahaan	Pemerintah	Sektor Produksi	Marjin Perdagangan & Pengangkutan	Domestik	Impor	Neraca Kapital	Pajak Tak Langsung	Subsidi	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Faktor Produksi	1												
Bukan Tenaga Kerja	2												1,4
Rumah tangga	3	1.710,1	502,4	11,6	73,0	161,8							2,3
Perusahaan	4		861,8	52,0	122,8	50,1							65,9
Pemerintah	5		82,0	75,4	360,8	202,8							22,5
Sektor	6							6.367,1					1,5
Margin perdagangan	7							538,0	177,6				6.443,1
Domestik	8						2.481,3	715,6					715,6
Impor	9						700,0						1.119,4
Neraca Kapital	10			279,9	500,0	67,2							847,2
Pajak tak langsung	11												201,0
Subsidi	12												124,6
Neraca Luar negeri	13	3,9	105,4	13,1	52,6	28,9				50,4			1.124,4
Jumlah		1.714,0	1.551,6	2.524,7	1.109,2	923,4	6.443,1	715,6	1.119,4	847,2	201,0	124,6	1.124,4

Cara lain adalah menggolongkan rumah tangga menurut klasifikasi World Bank, dimana 40 persen rumah tangga berpendapatan paling rendah adalah rumah tangga golongan bawah, 40 persen rumah tangga berikutnya merupakan rumah tangga golongan menengah dan 20 persen rumah tangga berpendapatan paling tinggi disebut dengan rumah tangga golongan atas. Dengan cara ini rumah tangga golongan paling bawah menikmati pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp 287,8 triliun. Rumah tangga golongan menengah menikmati pendapatan sebesar Rp 781,0 triliun dan rumah tangga paling kaya menikmati pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1 455,9 triliun. Ini berarti gap pendapatan antara rumah tangga golongan bawah dengan rumah tangga golongan atas sebesar 1 banding 5.

Gambaran ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan rumah tangga pada tahun 2006 dapat dilihat dari beberapa sisi. Jika dilihat dengan klasifikasi rumah tangga dari World Bank ketimpangan pendapatan rumah tangga 1 banding 5. Akan tetapi jika rumah tangga dikelompokkan secara desil, maka ketimpangan pendapatan rumah tangga kelompok I dan X mencapai 1 banding 31.

Timpangnya distribusi pendapatan antar golongan tersebut menyebabkan kemampuan masing-masing golongan dalam membiayai anggota rumah tangganya dalam menempuh pendidikan menjadi tidak sama. Golongan atas akan dengan mudah dapat memilih pendidikan yang disukainya, sedangkan golongan bawah untuk mendapat makanpun masih sulit apalagi untuk biaya pendidikan. Untuk itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk membantu pembiayaan pendidikan bagi rumah tangga golongan bawah.

Tabel 4.2 Pendapatan Golongan Rumah Tangga Sebelum dan Sesudah Pertumbuhan Ekonomi 1 persen

Rumah Tangga	Kode	Pendapatan (Rp Milyar)	
		Sebelum	Sesudah
Golongan I	6	35.090	35.782
Golongan II	7	61.692	62.876
Golongan III	8	77.622	79.101
Golongan IV	9	113.405	115.573
Golongan V	10	126.818	129.244
Golongan VI	11	168.684	171.932
Golongan VII	12	225.989	230.357
Golongan VIII	13	259.532	264.542
Golongan IX	14	380.708	388.118
Golongan X	15	1.075.232	1.096.667

Sumber: diolah dari matrik SAM tahun 2006

Dari hasil analisis multiplier SAM Indonesia tahun 2006, dapat diketahui bahwa apabila pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan menciptakan sebanyak 687 ribu ekuivalen tenaga kerja (ETK). Dengan kata lain akan dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 687 ribu pekerja yang akan terserap di seluruh sektor ekonomi. Dari jumlah tersebut terlihat bahwa akan tersedia lapangan pekerjaan sebanyak 241 ribu bagi pekerja dengan pendidikan S1 ke atas. Dengan demikian, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan meminta pekerja berpendidikan S1 ke atas sebesar 4,12 persen. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan semakin besar permintaan akan tenaga kerja berpendidikan S1 ke atas.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa untuk tahun-tahun yang akan datang lebih diperlukan pekerja yang berpendidikan tinggi, terutama untuk pendidikan S1 ke atas. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan di bidang pendidikan, agar tingkat pendidikan masyarakat mencapai rata-rata S1 karena pekerja dengan tingkat pendidikan ini lebih dibutuhkan dunia usaha.

Sampai saat ini wajib belajar yang menjadi program pemerintah baru sampai pada wajib belajar 9 tahun, atau sampai pada SLTP. Program ini memang baik karena jumlah pekerja dengan pendidikan menengah ini yang paling banyak diperlukan ketika perekonomian berkembang, akan tetapi pertumbuhan penyerapannya masih lebih kecil jika dibandingkan dengan akademi/diploma.

Tabel 4.3 Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja jika Pertumbuhan Ekonomi Naik 1 Persen

Klasifikasi Tenaga Kerja	Dampak Output (juta Rp)	Koefisien TK	Kebutuhan Tenaga Kerja (ribu TK)
SD Ke bawah	13.645	0,0076	103
Sekolah Menengah	15.533	0,0163	253
Akademi/Diploma	1.751	0,0514	90
S1 Ke atas	3.232	0,0746	241
Total	34.160		687

Sumber: diolah dari matrik SAM tahun 2006

Kenyataan di atas merupakan salah satu kebijakan yang dapat diusulkan untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Akan tetapi, biaya pendidikan dari waktu ke waktu terus meningkat. Tingkat kemiskinan masyarakat membuat pendapatan yang diperoleh lebih cenderung akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga pengeluaran biaya pendidikan menjadi tidak prioritas bagi sebagian besar masyarakat tersebut. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah dalam mendorong pendidikan masyarakat sampai ketingkat pendidikan akademi/diploma. Hal ini dilakukan jika pemerintah berniat mengentaskan kemiskinan lewat jenjang pendidikan.

4.3 Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga

Pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 diperkirakan sebesar 6,7 persen, tahun 2008 sebesar 7,2 persen dan 2009 sebesar 7,6 persen. Dengan mengasumsikan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh struktur ekonomi yang tidak berubah dari tahun 2006 sampai 2009, dapat diketahui analisis peningkatan pendapatan rumah tangga.

Pada tahun 2006, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,7 persen maka perkiraan pendapatan rumah tangga akan meningkat sebesar Rp 331,10 triliun. Rumah tangga golongan I, yaitu 10 persen golongan rumah tangga berpendapatan paling rendah, pada tahun 2007 pendapatannya akan meningkat sebanyak Rp 4,63 triliun. Sedangkan rumah tangga golongan X, yaitu 10 persen golongan rumah tangga berpendapatan paling tinggi, pendapatannya meningkat sebanyak Rp 143,61 triliun. Sehingga terjadi selisih (gap) pendapatan sebesar Rp 138,98 triliun. Dapat dikatakan bahwa ketimpangan pertambahan pendapatan rumah tangga golongan I dengan golongan X adalah sebesar 1 banding 31.

Ketimpangan pendapatan tersebut dapat terjadi karena pada rumah tangga golongan I yang bekerja cenderung hanya kepala rumah tangga saja atau rumah tangga yang anggota rumah tangganya bekerja dengan upah/gaji di bawah UMR. Sedangkan rumah tangga golongan X bekerja sebagai profesional di berbagai tempat, mempunyai perusahaan lebih dari 1 dan mempunyai aset yang mendatangkan balas jasa setiap kali terjadi perputaran ekonomi. Sehingga ketika terjadi perputaran ekonomi atau pertumbuhan, rumah tangga golongan I akan memperoleh bagian jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan rumah tangga golongan X yang mempunyai balas jasa jauh lebih besar dan sumbernya dapat lebih dari satu.

**Tabel 4.4 Perkiraan Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga
Tahun 2007 – 2009 (Milyar Rupiah)**

Golongan Rumah Tangga	2007	2008	2009
Golongan I	4.634	4.980	5.256
Golongan II	7.929	8.521	8.994
Golongan III	9.907	10.646	11.237
Golongan IV	14.527	15.611	16.478
Golongan V	16.250	17.463	18.433
Golongan VI	21.762	23.386	24.685
Golongan VII	29.264	31.448	33.195
Golongan VIII	33.568	36.073	38.077
Golongan IX	49.649	53.354	56.318
Golongan X	143.615	154.333	162.907
Total	331.104	355.813	375.581

Sumber: diolah dari matrik SAM tahun 2006

Ketimpangan tersebut terasa menjadi lebih besar ketika pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, seperti yang terjadi pada perkiraan peningkatan pendapatan rumah tangga pada tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2008 diperkirakan rumah tangga golongan I pendapatannya akan meningkat sebesar Rp 4,98 triliun dan rumah tangga golongan X pendapatannya meningkat sebesar Rp 154,33 triliun. Pada tahun 2009, perkiraan peningkatan pendapatan rumah tangga golongan I meningkat sebesar Rp 5,26 triliun dan rumah tangga golongan X pendapatannya meningkat sebesar Rp 162,91 triliun. Dengan demikian, terjadi gap peningkatan pendapatan antara rumah tangga golongan I dengan rumah tangga golongan X di tahun 2008 sebesar Rp 149,35 triliun dan tahun 2009 sebesar Rp 157,65 triliun.

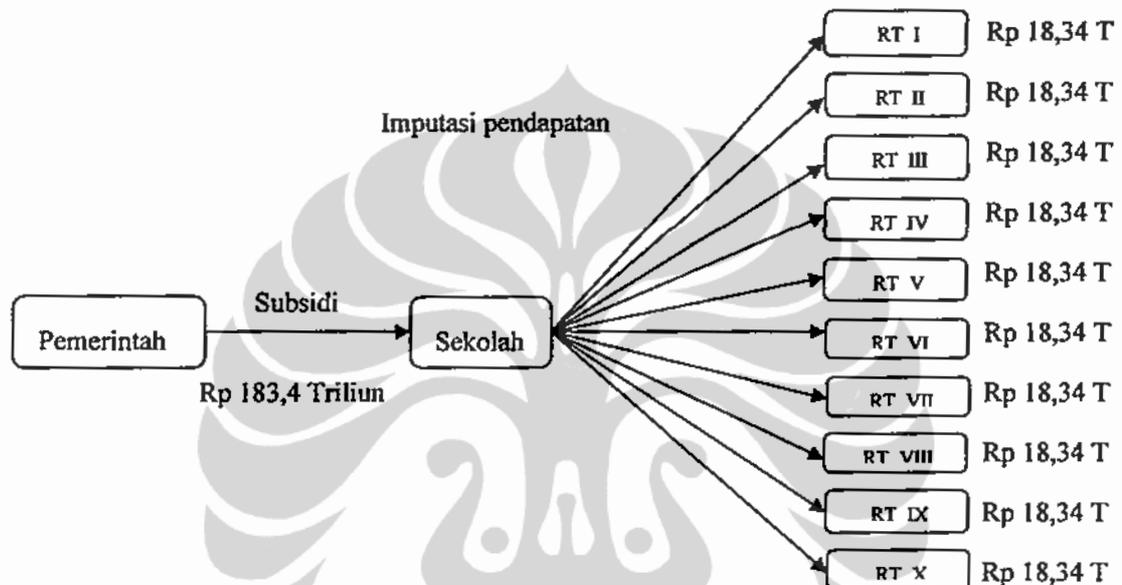
4.4 Simulasi Subsidi Pendidikan

4.4.1 Structure Path Analysis

Structure Path Analysis (SPA) digunakan untuk mengidentifikasi seluruh jaringan yang berisi jalur yang menghubungkan pengaruh suatu neraca pada neraca lainnya dalam suatu sistem sosial ekonomi. Dalam kebijakan subsidi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, jalur subsidi tersebut mengalir dari pemerintah langsung ke sektor pendidikan sehingga biaya pendidikan menjadi murah. Karena biaya pendidikan

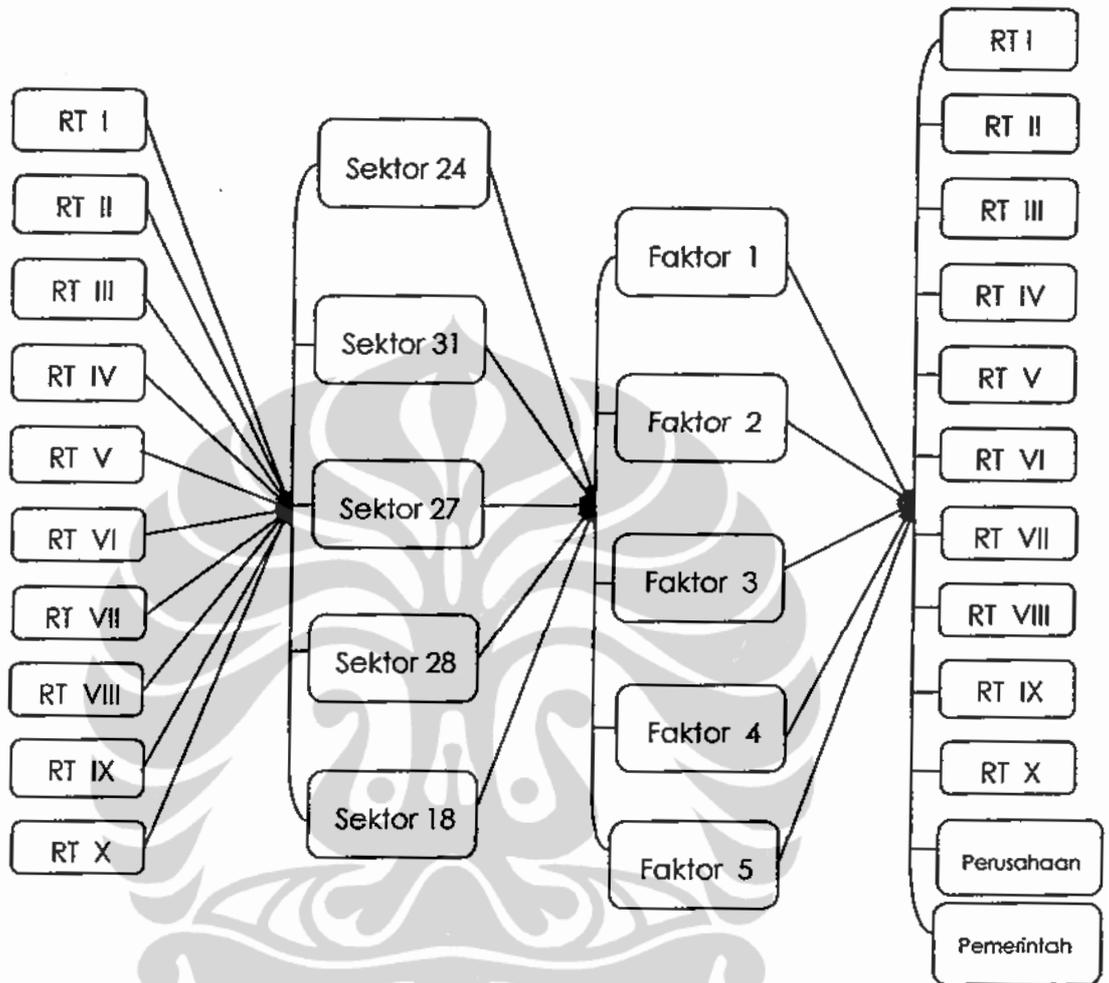
murah maka rumah tangga akan mengkonsumsi pendidikan lebih murah dari yang seharusnya, sehingga rumah tangga seakan-akan menerima tambahan pendapatan melalui imputasi biaya pendidikan yang seharusnya dibayar. Sebagai contoh, untuk alokasi subsidi pendidikan tahun 2009 mempunyai alur sebagai berikut:

Gambar 4.1 Alur Subsidi Pendidikan 2009 Proporsional



Dari alur subsidi yang diterima rumah tangga tersebut kemudian digunakan oleh masing-masing rumah tangga untuk melakukan peningkatan konsumsi barang dan jasa, sehingga output sektor produksi seluruh sektor juga meningkat. Adapun 5 kelompok komoditi utama atau yang paling banyak mengalami peningkatan output adalah sektor industri makanan, minuman dan tembakau (24), sektor perdagangan besar dan eceran (31), sektor industri kertas, percetakan, alat angkut, barang dari logam dan industri lainnya (27), industri kimia, pupuk, barang dari tanah liat dan semen (28), serta sektor pertanian tanaman pangan (18). Untuk sektor (27) dan (28) tidak terlihat pada Lampiran 10 (Jalur Utama Pengaruh Subsidi Pendidikan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Hasil Pengolahan SPA), namun dapat dilihat pada hasil pengolahan awal dengan menggunakan MATS. Lampiran 10 hanya menyajikan empat terbesar dari persentase pengaruh global dengan tujuan untuk mempermudah penyajian.

Gambar 4.2 PATH Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga dari Dampak Subsidi Pendidikan



Secara umum *path* peningkatan pendapatan rumah tangga dari dampak subsidi pendidikan dijelaskan pada Gambar 4.2 yang menunjukkan bahwa peningkatan permintaan barang dan jasa menyebabkan output sektor meningkat. Karena output sektor meningkat maka terjadi peningkatan juga terhadap permintaan faktor produksi. Peningkatan faktor produksi tersebut menyebabkan penerimaan institusi, baik rumah tangga, perusahaan dan pemerintah juga bertambah.

4.4.2 Simulasi

Subsidi pendidikan yang dilakukan dalam tesis berdasarkan Renstra Diknas tahun 2005-2009. Departemen Pendidikan Nasional merencanakan subsidi pendidikan pada tahun 2007 sampai 2009 masing-masing sebesar Rp 138,7 triliun, 163,2 triliun dan Rp 183,4 triliun.

i. Simulasi I (Subsidi Pendidikan secara Merata)

Gambar 4.1 menunjukkan alur kebijakan subsidi yang diterima oleh rumah tangga apabila kebijakan subsidi dilakukan secara merata, yaitu dengan memberikan pendidikan murah kepada semua lembaga pendidikan. Karena semua lembaga pendidikan memperoleh subsidi maka dapat diasumsikan semua rumah tangga akan memperoleh subsidi pendidikan secara merata, atau memperoleh imputasi pendapatan sebesar nilai subsidi yang diterima secara merata. Jika subsidi pendidikan yang rencana akan disalurkan pada tahun 2009 sebesar Rp 183,4 triliun maka setiap rumah tangga akan memperoleh imputasi pendapatan sebesar Rp 18,34 triliun.

Rumah tangga yang mendapat subsidi pendidikan akan menerima imputasi pendapatan sebesar biaya pendidikan yang tidak jadi digunakan. Dana yang tidak jadi digunakan tersebut kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa. Pada Gambar 4.2, barang dan jasa yang paling besar akan menerima permintaan paling banyak adalah sektor 24, yaitu industri makanan, minuman dan tembakau, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran (sektor 31), sektor industri kertas, percetakan, angkutan, barang dari logam dan industri lainnya (sektor 27), sektor industri kimia, pupuk, semen dan barang dari mineral bukan logam (sektor 28) dan sektor tanaman bahan makanan (sektor 18). Sedangkan sektor lainnya permintaannya lebih kecil.

Setelah permintaan barang dan jasa yang dihasilkan sektoral meningkat maka menyebabkan permintaan akan faktor produksi tenaga kerja juga meningkat. Dari lampiran tabel simulasi diketahui bahwa dampak penyaluran subsidi yang merata menyebabkan pendapatan tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah naik sebesar Rp 41,42 triliun, tenaga kerja berpendidikan menengah meningkat Rp 56,61 triliun, tenaga kerja berpendidikan DIII/Akademi meningkat Rp 5,42 triliun dan tenaga kerja S1 ke atas meningkat sebesar Rp 10,26 triliun.

Peningkatan balas jasa faktor produksi tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari peningkatan pendapatan institusi, baik rumah tangga, perusahaan maupun pemerintah. Gambar 4.2 memperlihatkan bahwa subsidi pendidikan sebesar Rp 183,4 triliun yang disalurkan secara merata mendorong rumah tangga golongan I sehingga pendapatannya meningkat sebesar Rp 20,56 triliun dan rumah tangga golongan X meningkat sebesar Rp 86,53 triliun atau terjadi gap 1 banding 21. Peningkatan pendapatan pergolongan berbeda-beda tergantung pada penguasaan aset faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing golongan rumah tangga dan penggunaannya dalam sektor ekonomi.

Selain meningkatkan pendapatan rumah tangga, subsidi pendidikan secara merata juga meningkatkan pendapatan agregat perusahaan sebesar Rp 64,84 triliun dan pendapatan pemerintah meningkat sebesar Rp 47,58 triliun. Dari simulasi ini diketahui bahwa jika pemerintah menyalurkan subsidi pendidikan secara merata ke seluruh masyarakat Indonesia sebesar Rp 183,4 triliun, maka pemerintah akan memperoleh pendapatan baik dari pajak, retribusi dan pendapatan pemerintah lainnya sebesar Rp 47,58 triliun. Dengan perkataan lain akan kembali ke kas Negara uang sebesar 25,94 persen.

Tingkat pendidikan merupakan gambaran meningkatnya rata-rata pendidikan masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Karena SAM merupakan alat analisis yang statis, maka tingkat pendidikan diukur dari perubahan golongan rumah tangga yang mengeluarkan biaya pendidikan. Dari simulasi, diketahui hasil penghitungan yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendidikan akan meningkat sebesar 14 persen. Artinya, rumah tangga secara rata-rata meningkatkan biaya pendidikannya sebesar 14 persen.

Tabel 4.5 Pendapatan Golongan Rumah Tangga Sebelum dan Sesudah Subsidi Pendidikan secara Merata

Rumah Tangga	Kode	Pendapatan (Rp Milyar)	
		Sebelum	Sesudah
Golongan I	6	35.090	35.110
Golongan II	7	61.692	61.714
Golongan III	8	77.622	77.645
Golongan IV	9	113.405	113.431
Golongan V	10	126.818	126.844
Golongan VI	11	168.684	168.713
Golongan VII	12	225.989	226.022
Golongan VIII	13	259.532	259.567
Golongan IX	14	380.708	380.749
Golongan X	15	1.075.232	1.075.318

Sumber: diolah dari matrik SAM tahun 2006

ii. Simulasi II (Subsidi Pendidikan Hanya untuk Rumah Tangga Golongan Bawah)

Menurut World Bank, rumah tangga dapat digolongkan menjadi rumah tangga golongan atas, menengah dan bawah. Rumah tangga golongan atas adalah 20 persen rumah tangga yang berpendapatan paling tinggi. Rumah tangga golongan menengah adalah 40 persen rumah tangga berpendapatan menengah. Rumah tangga golongan bawah adalah 40 persen rumah tangga berpendapatan paling bawah. Apabila subsidi pendidikan

sebesar Rp 183,4 triliun diberikan kepada rumah tangga golongan bawah, maka rumah tangga yang akan menikmati peningkatan imputasi pendapatan hanya rumah tangga golongan desil I, II, III dan IV. Dengan demikian masing-masing golongan rumah tangga tersebut mendapat imputasi pendapatan sebesar Rp 45,85 triliun.

Rumah tangga yang mendapat subsidi pendidikan akan menerima imputasi pendapatan sebesar biaya pendidikan yang tidak jadi digunakan. Dana yang tidak jadi digunakan tersebut kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa. Pada Gambar 4.2, barang dan jasa yang paling besar akan menerima permintaan paling banyak adalah sektor 24, yaitu industri makanan, minuman dan tembakau, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran (sektor 31), sektor industri kertas, percetakan, angkutan, barang dari logam dan industri lainnya (sektor 27), sektor industri kimia, pupuk, semen dan barang dari mineral bukan logam (sektor 28) dan sektor tanaman bahan makanan (sektor 18), serta sektor lainnya yang permintaannya lebih kecil.

Setelah permintaan barang dan jasa yang dihasilkan sektoral meningkat maka menyebabkan permintaan akan faktor produksi tenaga kerja juga meningkat. Dari lampiran tabel simulasi diketahui bahwa dampak penyaluran subsidi yang merata menyebabkan pendapatan tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah naik sebesar Rp 40,09 triliun, tenaga kerja berpendidikan menengah meningkat Rp 57,16 triliun, tenaga kerja berpendidikan DIII/Akademi meningkat Rp 5,29 triliun dan tenaga kerja S1 ke atas meningkat sebesar Rp 9,99 triliun.

Peningkatan balas jasa faktor produksi tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari peningkatan pendapatan institusi, baik rumah tangga, perusahaan maupun pemerintah. Rumah tangga golongan I pendapatannya meningkat sebesar Rp 48,01 triliun dan rumah tangga golongan X meningkat sebesar Rp 66,42 triliun atau terjadi gap 1 banding 3. Peningkatan pendapatan pergolongan berbeda-beda tergantung pada penguasaan aset faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing golongan rumah tangga dan yang digunakan dalam sektor ekonomi.

Selain meningkatkan pendapatan rumah tangga, subsidi pendidikan secara merata juga meningkatkan pendapatan agregat perusahaan sebesar Rp 62,55 triliun. Dan pendapatan pemerintah meningkat sebesar Rp 44,66 triliun. Dari simulasi ini diketahui bahwa jika pemerintah menyalurkan subsidi pendidikan secara merata ke seluruh masyarakat Indonesia sebesar Rp 183,4 triliun, maka pemerintah akan memperoleh pendapatan baik dari pajak, retribusi dan pendapatan pemerintah lainnya sebesar Rp 44,66 triliun. Dengan kata lain akan kembali ke kas negara sebesar 24,35 persen.

Tabel 4.6 Pendapatan Golongan Rumah Tangga Sebelum dan Sesudah Subsidi Pendidikan untuk Rumah Tangga Golongan Bawah

Rumah Tangga	Kode	Pendapatan (Rp Milyar)	
		Sebelum	Sesudah
Golongan I	6	35.090	35.138
Golongan II	7	61.692	61.742
Golongan III	8	77.622	77.672
Golongan IV	9	113.405	113.458
Golongan V	10	126.818	126.826
Golongan VI	11	168.684	168.694
Golongan VII	12	225.989	226.003
Golongan VIII	13	259.532	259.548
Golongan IX	14	380.708	380.730
Golongan X	15	1.075.232	1.075.298

Sumber: diolah dari matrik SAM tahun 2006

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendidikan akan meningkat sebesar 13 persen. Peningkatan ini berarti bahwa adanya subsidi akan meningkatkan rata-rata tingkat pendidikan sebesar 13 persen.

Dari kedua simulasi di atas dapat diketahui bahwa dampak subsidi pendidikan, baik secara merata maupun hanya untuk golongan bawah tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan balas jasa faktor produksi. Begitu juga terhadap peningkatan pendapatan perusahaan dan pendapatan pemerintah. Namun, kedua simulasi menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perbedaan peningkatan pendapatan rumah tangga golongan I hingga golongan X. Simulasi II lebih mempunyai dampak terhadap pengurangan gap pendapatan antara rumah tangga golongan bawah dengan rumah tangga golongan atas. Sebaiknya, dampak pemberian subsidi anggaran yang hanya ke rumah tangga golongan bawah (simulasi II) terhadap penyediaan pekerja dengan pendidikan S1 ke atas jauh lebih sedikit dibandingkan pemberian subsidi yang merata ke semua golongan rumah tangga (simulasi I). Adanya *trade-off* antara dua tujuan untuk meratakan distribusi pendapatan dan tujuan untuk menyediakan tenaga kerja dengan kualifikasi S1 ke atas menghendaki pembuat keputusan untuk berhati-hati dalam menyalurkan anggaran subsidi pendidikan. Perangkat SAM dan model SPA yang diperkenalkan dalam penelitian di tulisan ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan alokasi anggaran pendidikan yang optimal untuk mencapai tujuan tertentu dalam hal pemerataan distribusi pendapatan rumah tangga dan penyediaan pekerja dengan kualifikasi S1 ke atas yang diinginkan oleh pengambil kebijakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian yang dituangkan dalam tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dampak dari alokasi anggaran pendidikan yang diberikan dalam bentuk subsidi terhadap distribusi pendapatan rumah tangga dan ketersediaan tenaga kerja berpendidikan S1 ke atas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi. Untuk itu dipergunakan SAM Pendidikan tahun 2006 yang direkonstruksi dari data SAM 2005 dan beberapa data makro dan sektoral lainnya. Demikian pula, dipergunakan model SPA untuk menjelaskan jalur pengaruh anggaran pendidikan tersebut. Ditemukan adanya *trade-off* yang tidak signifikan antara usaha mencapai pemerataan pendapatan yang lebih baik dengan penyediaan tenaga kerja berpendidikan S1 keatas. Berikut disajikan beberapa kesimpulan yang diperoleh.

5.1 Kesimpulan

Dari tabel SAM 2006 yang direkonstruksi, diperoleh pendapatan faktor produksi tenaga kerja sebesar Rp 1.712,5 triliun, pendapatan kapital sebesar Rp 1.549,3 triliun. Jumlah kedua pendapatan tersebut memberikan dugaan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar biaya faktor (*at factor costs*), sebesar Rp 3.261,8 triliun. Bila ditambah dengan pajak tidak langsung neto yang sebesar Rp 76,4 triliun, maka PDB Indonesia tahun 2006 diperkirakan sebesar Rp 3.338,2 triliun. Apabila dilihat dari sisi PDB penggunaan atau konsumsi, yaitu: jumlah konsumsi rumah tangga sebesar Rp 2.092,7 triliun, konsumsi pemerintah sebesar Rp 288,0 triliun, konsumsi modal atau investasi sebesar Rp 796,8 triliun dan ekspor netto sebesar Rp 160,7 triliun, sehingga PDB dari sisi penggunaan menjadi Rp 3.338,2 triliun (sama dengan besarnya PDB dari sisi pendapatan). Dari nilai PDB tersebut yang dapat dinikmati oleh rumah tangga sebagai pendapatannya adalah sebesar Rp 2.212,5 triliun. Disamping pendapatan dari faktor produksi tersebut, rumah tangga juga memperoleh transfer, baik dari rumah tangga lain, pemerintah, perusahaan, maupun luar negeri. Dengan demikian, total pendapatan seluruh rumah tangga menjadi Rp 2.524,7 triliun.

Golongan rumah tangga I, yaitu rumah tangga paling miskin, hanya menikmati pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp 35,09 triliun atau 1 persen. Golongan rumah tangga X, rumah tangga paling kaya, menikmati pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1.075,23 triliun

atau sekitar 43 persen. Gap pendapatan antara rumah tangga paling miskin dengan rumah tangga paling besar pendapatannya sebesar 1 banding 31.

Apabila penggolongan rumah tangga diklasifikasikan menurut World Bank, dimana 40 persen rumah tangga berpendapatan paling rendah adalah rumah tangga golongan bawah, 40 persen rumah tangga berikutnya merupakan rumah tangga golongan menengah dan 20 persen rumah tangga berpendapatan paling tinggi disebut dengan rumah tangga golongan atas, maka gap pendapatan antara rumah tangga golongan bawah dengan rumah tangga golongan atas adalah sebesar 1 banding 5.

Dari hasil analisis multiplier SAM dapat diketahui bahwa apabila pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen secara proporsional di seluruh sektor, maka kesempatan kerja tercipta sebanyak 687 ribu ekivalen tenaga kerja (ETK). Dari jumlah tersebut, pekerja dengan pendidikan S1 ke atas diperlukan sebanyak 241 ribu ETK. Dilihat dari pertumbuhannya, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan atau meminta pekerja berpendidikan S1 ke atas sebesar 4,12 persen. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan semakin besar permintaan akan tenaga kerja berpendidikan S1 ke atas (lihat Lampiran 9).

Pada tahun 2007, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,7 persen maka perkiraan pendapatan rumah tangga akan meningkat sebesar Rp 331,10 triliun. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ini, rumah tangga golongan I pendapatannya akan meningkat sebanyak Rp 4,63 triliun. Sedangkan rumah tangga golongan X pendapatannya meningkat sebanyak Rp 143,61 triliun. Sehingga terjadi selisih peningkatan pendapatan sebesar Rp 138,98 triliun atau rasio distribusi pertambahan pendapatan antara rumah tangga golongan I dan rumah tangga golongan X adalah 1 banding 31. Pada tahun 2008 diperkirakan rumah tangga golongan I pendapatannya akan meningkat sebesar Rp 4,98 triliun dan rumah tangga golongan X pendapatannya meningkat sebesar Rp 154,33 triliun. Pada tahun 2009, perkiraan peningkatan pendapatan rumah tangga golongan I sebesar Rp 5,26 triliun dan rumah tangga golongan X sebesar Rp 162,91 triliun. Terlihat dari hasil simulasi ini, terjadi gap peningkatan pendapatan antara rumah tangga golongan I dengan rumah tangga golongan X di tahun 2008 sebesar Rp 149,35 triliun dan tahun 2009 sebesar Rp 157,65 triliun.

Ketimpangan pendapatan tersebut dapat terjadi karena pada rumah tangga golongan I yang bekerja cenderung hanya kepala rumah tangga saja atau rumah tangga yang anggota rumah tangganya bekerja dengan upah/gaji di bawah UMR. Sedangkan rumah tangga golongan X bekerja sebagai profesional di berbagai tempat, mempunyai perusahaan lebih dari 1 dan mempunyai aset yang mendatangkan balas jasa setiap kali terjadi perputaran ekonomi.

Sehingga ketika terjadi perputaran ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, rumah tangga golongan I akan memperoleh bagian jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan rumah tangga golongan X yang mempunyai balas jasa jauh lebih besar dan sumbernya dapat lebih dari satu.

Structure Path Analysis (SPA) mampu menggambarkan alur kebijakan subsidi pendidikan sampai pada peningkatan pendapatan institusi. Subsidi pendidikan akan meningkatkan (imputasi) pendapatan. Peningkatan pendapatan tersebut kemudian digunakan oleh masing-masing rumah tangga untuk melakukan peningkatan konsumsi barang dan jasa, sehingga output sektor produksi seluruh sektor juga meningkat. Karena output sektor meningkat maka terjadi peningkatan juga terhadap permintaan faktor produksi. Peningkatan faktor produksi tersebut menyebabkan penerimaan institusi, baik rumah tangga, perusahaan dan pemerintah juga bertambah.

Simulasi I menggambarkan subsidi pendidikan sebesar Rp 183,4 triliun diberikan secara merata ke seluruh golongan rumah tangga melalui pendidikan murah secara menyeluruh. Hasil simulasi ini mendorong pendapatan tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah naik sebesar Rp 41,42 triliun, tenaga kerja berpendidikan menengah Rp 56,61 triliun, tenaga kerja berpendidikan DIII/Akademi Rp 5,42 triliun dan tenaga kerja S1 ke atas sebesar Rp 10,26 triliun. Peningkatan balas jasa faktor produksi tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari peningkatan pendapatan institusi, baik rumah tangga, perusahaan, maupun pemerintah. Rumah tangga golongan I pendapatannya meningkat sebesar Rp 20,56 triliun dan rumah tangga golongan X meningkat sebesar Rp 86,53 triliun atau terjadi gap 1:21. Selain meningkatkan pendapatan rumah tangga, subsidi pendidikan secara merata juga meningkatkan pendapatan agregat perusahaan sebesar Rp 64,84 triliun dan pendapatan pemerintah meningkat sebesar Rp 47,58 triliun. Dengan kata lain, kebijakan subsidi pendidikan yang akan kembali ke kas negara sebesar 25,94 persen.

Simulasi II menunjukkan subsidi pendidikan sebesar Rp 183,4 triliun diberikan hanya untuk rumah tangga golongan bawah (golongan I, II, III dan IV) saja. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa pendapatan tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah naik sebesar Rp 40,09 triliun, tenaga kerja berpendidikan menengah meningkat Rp 57,16 triliun, tenaga kerja berpendidikan DIII/Akademi meningkat Rp 5,29 triliun dan tenaga kerja S1 ke atas meningkat Rp 9,99 triliun. Peningkatan balas jasa faktor produksi tersebut meningkatkan pendapatan rumah tangga I sebesar Rp 48,01 triliun dan rumah tangga golongan X Rp 66,42 triliun atau terjadi gap 1:3. Selain meningkatkan pendapatan rumah tangga, subsidi pendidikan secara merata juga meningkatkan pendapatan agregat perusahaan sebesar Rp 62,55 triliun dan

pendapatan pemerintah meningkat sebesar Rp 44,66 triliun. Dengan kata lain, sekitar 24,35 persen dari nilai subsidi pendidikan akan kembali ke kas negara.

Jika dibandingkan antara kebijakan subsidi pendidikan secara merata dan subsidi pendidikan hanya untuk rumah tangga golongan bawah, terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok untuk peningkatan pendapatan faktor, institusi perusahaan, dan pemerintah. Namun bila melihat dampaknya terhadap distribusi pendapatan rumah tangga, maka kebijakan subsidi pendidikan untuk golongan bawah mempunyai dampak terhadap gap pendapatan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kebijakan subsidi yang diberikan secara merata.

Tingkat pendidikan pekerja ditentukan oleh peningkatan pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan. Apabila subsidi pendidikan diberikan secara merata ke seluruh golongan rumah tangga, maka tingkat pendidikan yang dicerminkan oleh kenaikan pengeluaran pendidikan naik sebesar 14 persen. Sedangkan jika subsidi diberikan hanya untuk rumah tangga golongan bawah maka persentase kenaikannya sebesar 13 persen.

Subsidi yang diberikan secara merata ke seluruh golongan rumah tangga mengindikasikan gap yang lebih besar (1:21) bila dibandingkan dengan kebijakan subsidi yang diberikan hanya pada rumah tangga golongan bawah (1:3). Namun di sisi lain, peningkatan pendidikan yang dicerminkan oleh persentase peningkatan pengeluaran pendidikan berdampak relatif lebih besar, sehingga terjadi *trade-off* antara usaha mencapai pemerataan pendapatan yang lebih baik dengan upaya peningkatan jenjang pendidikan.

5.2. Saran

Mempertimbangkan hasil analisis di atas, bila tujuan utama dari pengambil kebijakan (*policy maker*) adalah untuk pemeratakan distribusi pendapatan, maka subsidi pendidikan sebaiknya diberikan hanya kepada rumah tangga golongan bawah saja terutama jika anggaran pendidikan terbatas. Namun, bila tujuannya adalah untuk meningkatkan jenjang pendidikan pekerja dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi, maka subsidi pendidikan sebaiknya diberikan secara merata kepada setiap golongan rumah tangga, Dengan demikian diperlukan formulasi yang tepat dalam mengalokasikan subsidi pendidikan agar distribusi pendapatan minimal tidak memburuk dan mutu pendidikan menjadi lebih baik.

Di samping upaya pemerataan distribusi pendapatan dan peningkatan tingkat pendidikan pekerja melalui alokasi subsidi pendidikan, diperlukan juga kebijakan-kebijakan yang menyeluruh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang cepat mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi (S1 ke atas) yang diciptakan melalui subsidi pendidikan tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat

diimplementasikan melalui program investasi fisik berupa penyediaan infrastruktur yang baik terutama di daerah perdesaan. Dengan demikian peningkatan tenaga kerja berpendidikan tinggi di perdesaan dapat terserap di daerah perdesaan dan menghindari terjadinya urbanisasi.

Untuk penelitian lebih lanjut, sebaiknya mengarah pada perbaikan sistem kebijakan subsidi pendidikan dengan beberapa alternatif kebijakan dengan memanfaatkan dekomposisi matrik multiplier SAM dengan menggunakan model CGE (*Computable General Equilibrium*) dan SPA. Dengan model CGE tersebut dapat meminimumkan gap pendapatan dan meningkatkan jenjang pendidikan melalui besarnya pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abramovits, M., (1956), *Resources and Output Trends in the United States since 1870*, American Economic Review 46, pp. 5-23
- Alesina, A. dan Rodrick, D., (1994), *Distributive Policies and Economic Growth*, Quarterly Journal of Economics 109, pp. 465-90.
- Anggawijaya, A.H.P., (1997), *Pengaruh Distribusi Pendapatan Tidak Merata terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Thesis Program Pascasarjana FEUI, Jakarta
- Azis, I.J. dan Yuri Mansury, (2003), *Measuring Economy-wide Impacts of a Financial Shock*, Asean Economic Bulletin Vol 20 No. 2, pp. 112-27
- Badan Pusat Statistik, (2002), *Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2000*, Jakarta.
- _____, (2004), *Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2003*, Jakarta.
- _____, (2006), *Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2005*, Jakarta.
- _____, (2007), *Tabel Input Output Indonesia 2005*, Jakarta.
- Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, (2008), *Financial Social Accounting Matrix Indonesia 2005*, Jakarta.
- Bank Indonesia, (beberapa terbitan), *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Jakarta.
- Booth, A., (2000), *Poverty and Inequality in the Soeharto Era: An Assessment*, Invited paper for a special issue of the Bulletin of Indonesian Economic Studies in honour of Thee Kian Wie, Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol 36(1), pp. 73-104
- Barro, R.J., (1999), *Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Studies*, The MIT Press, Massachusetts.
- Barro, R.J. and X. Sala-i-Martin, (1991), *Convergence Across States and Regions*, *Brooking Papers on Economic Activities*, 1991(1), pp. 107-57.
- Barro, R.J. and X. Sala-i-Martin, (2004), *Economic Growth, Second Edition*, The MIT Press, Massachusetts.
- Boserup, E., (1965), *The Conditions of Agricultural Growth*, Aldine, Chicago.
- Bourguignon, F. (1979), *Decomposable Income Inequality Measures*, *Econometrica*, 47(4), pp. 901-920

- Cohen, S.I. (1989), Multiplier Analysis in Social Accounting and Input-Output Framework: Eviden for Several Countries dalam Miller, R.E., K.R. Polenske and A. Rose (eds.), *Frontier of Input-Output Analysis*. Oxford University Press: 78-99.
- Coto, A., (2006), *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi Output Sektor Industri, Upah Minimum, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kesenjangan Pendapatan di Indonesia*, Thesis Program Pascasarjana FEUI, Jakarta
- Defourny, J. And E. Thorbecke. (1984). *Structural Path Analysis and Multiplier Decomposition with A Social Accounting Matrix Framework*. The Economic Journal, 94(3): 111-136.
- Deininger, K., dan Lyn Squire, (1998), *New Ways of Looking at Old Issues: Inequality and Growth*, Journal of Development Economics 57 (2), pp 259-287.
- Departemen Pendidikan Nasional (2004), *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta.
- Djoyohadikusumo, S., (1991), *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Domar, E. (1946), *Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment*, Econometrica 14, pp137-47.
- Easterly, W., (1999), *Life During Growth*, Journal of Economic Growth 4 (3), pp 239-276.
- _____, (2001), The effect of International Monetary Fund and World Bank programs on poverty, Policy Research Working Paper 2517, The World Bank.
- Forbes, K.J., (2000), *Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth*, American Economic Review 90 (4), pp. 869-887.
- Harris, J.R., and Todaro, M.P., (1970), *Migration, Employment and Development" A Two Sectors Analysis*, American Economic Review 60, pp. 126-42.
- Harrold, R.F., (1948), *Toward a Dynamic Economics: Some Recent Developments of Economic Theory and Their Applications to Policy*, McMillan, London.
- Hidayat, T. (1988). *A Social Accounting Matrix Framework for Planning in Indonesia*. Unpublished Thesis, Cornell University, New York.
- Islam, N., (1995), *Growth Empirics: A Panel Data Approach*, Quarterly Journal of Economics, 110 pp. 1127-70.
- Keuning, S.J. and Willem de Ruijter, (1990), The Sosial Accounting Framework: Outline of Construction Stages and Organization of Work dalam J. Alarcon, J.v. Heemst, S. Keuning, W.de Ruijter and R. Vos (eds.), *The Social Accounting Framework for Development: Concepts, Construction and Applications*. Avebury: 191-221.

- Khan, H. And Willem de Ruijter, (1990), *Macroeconomic Effect of Technology Choice: Multiplier and Structural Path Analysis within a SAM Framework*. Journal of Policy Modeling, 11(1): 131-156.
- King, B.B., (1998), What is a SAM? dalam G. Pyatt and J.I. Round (eds.), *Social Accounting Matrices: A Basic for Planning*, The World Bank, Washington, D.C.
- Kremer, M., (2003), *Randomized Evaluations of Educational Programs in Developing Countries: Some Lessons*, American Economic Reviews 93 (2), pp 102-106.
- Lynn, Stuart R., (2003), *Economic Development: Theory and Practice for a Divided World*, Prentice Hall, pp 180-86
- Mankiw, N.G., D. Romer, and D. Weil, (1992), *A Contribution to the Empirics of Economic Growth*, Quarterly Journal of Economics, 107, 407-37.
- Novita, M., (2005), *Pengaruh Karakteristik Rumah Tangga dalam Fungsi Permintaan*, Tesis Program Pascasarjana FEUI, Jakarta
- Pritchett (2003), *Who is not Poor? Proposing a Higher International Standard for Poverty*, Working Paper 33, Center for Global Development.
- Psacharopoulos, G, (1994), *Return to Investment in Education: A Global Update*, World Development 22(9), pp 1325-43.
- Puspita, K.W., (2006), *Pengaruh Distribusi Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi di Indonesia 1993-2002*, Thesis Program Pascasarjana FEUI, Jakarta
- Pyatt, G., (1988), *A SAM Approach to Modelling*, Journal of Policy Modelling, 10(3): 327-335.
- Ray, D., (1998), *Development Economics*, Princetown University Press, New York.
- Republik Indonesia, (2003), *Undang-Undang Nomor 23 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta.
- Resosudarmo, B.P. and Y. Vidyattama, (2006), *Regional Income Disparity in Indonesia: A Panel Data Analysis*, ASEAN Economic Bulletin, 23(1), pp.31-44.
- Sala-i-Martin, X., (1996), *The Classical Approach to Convergence Analysis*, The Economic Journal, 106, pp.1019-36.
- Schumpeter, J.A., (1934), *The Theory of Economic Development*, Harvard University Press., Cambridge.
- Serageldin, I., (1996), *Sustainability and the Wealth of Nations*, Environmentally Sustainable Development Studies and Monograph Series No. 5, the World Bank, Washington DC

- Shorrocks, A.F. (1980), *The Class of Additively Decomposable Inequality Measures*, *Econometrica*, 48(3), pp. 613-25.
- Smith, A., (1937; publikasi asli 1776), *An Inquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nations*, ed. E. Cannan, 6ed, Modern Library, New York.
- Streeten, P.P., (1994), *Human Development: Means and Ends*, *American Economic Review* 84, pp. 232-237.
- Thorbecke, E., (1988), The Accounting Matrix and Consistency-Type dalam G. Pyatt and J.I. Round (eds.), *Social Accounting matrices: A Basic for Planning*, The World Bank, Washington, D.C.
- Thorbecke, E. (1997). *Social Accounting Matrices and Social Accounting Analysis*. dalam Walter Isard (ed.), *Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science*, New York.
- Thunen, Johann Heinrich Von (1875), *1783-1850 Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationaloekonomie* [microform] Berlin, Wiegandt, Hempel & Parey, 1875 [University of Washington: Microfilm A856 1 microfilm reel].
- Todaro, M., (2000), *Economic Development*. Seven Edition. Addison-Wesley Longman, Inc, London.
- Toyamah, N., dan Syaikh Usman, (2004), *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar*, Laporan Lapangan, Smeru, Jakarta.
- Soenandar, E.S., (2005), *Government Policy in Solving Uneven Regional Development between West and East Indonesia: Case Study on KAPET*, *Economic Journal of Hokkaido University*, 34, pp. 171-92
- Solow, R., (1956), *A Contribution to the Theory of Economic Growth*, *Quarterly Journal of Economics* 70, pp. 65-94.
- Varina, H., (2000), *Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 1998: Pengaruh Pengeluaran Investasi Pemerintah terhadap Distribusi Pendapatan*, Thesis Program Pascasarjana FEUI, Jakarta
- Williamson, J.G., (1965), *Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns*, *Economic Development and Cultural Change*, 13(4), pp. 3-45.
- World Bank, (1980), *World Development Report 1980*. The World Bank, Washington, D.C.
- _____, (2003), *World Development Indicators 2003*. The World Bank, Washington, D.C.

Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia, 2005 (13 x 13) (Milyar Rupiah)

Neraca	I. Faktor Produksi		II. Neraca Institusi				III. Neraca Sektor				IV. Neraca Lainnya				Jumlah
	Tenaga Kerja	Bulan Tenaga Kerja	Rumah tangga	Perusahaan	Pemerintah	Sektor Produs	Kerajinan Perdagangan	Domestik	Impor	Neraca Kapital	Pajak Tak Langsung	Subsidi	Neraca Luar Negeri		
														1	
I. Faktor Produksi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Tenaga Kerja	1,487,378					1,486,179								1,487,378	
Bulan Tenaga Kerja		435,954	10,356	63,335	140,391	1,344,475								1,487,378	
Rumah tangga	1,484,024	747,906	46,290	106,496	43,495									1,979	
Perusahaan		71,142	67,199	313,112	59,297									57,259	
Pemerintah														19,533	
Sektor														1,281	
Magnin perdagangan														726,460	
Domestik														5,523,491	
Impor														592,153	
Neraca Kapital														631,692	
Pajak tak langsung														103,201	
Subsidi														42,210	
Neraca Luar negeri														(71,942)	
Jumlah	1,487,378	1,346,434	2,191,309	963,721	726,460	5,591,418	620,989	6,166,809	974,177	734,893	174,427	108,136	986,386	986,386	

Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia 2006 (13 x 13) (Milyar Rupiah)

Neraca	I. Faktor Produksi		II. Institusi			III. Neraca Sektor			IV. Neraca Lainnya				Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Tenaga Kerja	Bukan Tenaga Kerja	Rumah tangga	Perusahaan	Pemerintah	Sektor Produksi	Marginal Perdagangan & Perdagangan	Domestik	Impor	Neraca Kapital	Pajak Tak Langsung	Subsidi	Neraca Luar Negeri
I. Faktor Produksi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tenaga Kerja						1,713,547							
Bukan Tenaga Kerja						1,349,260							
Rumah tangga	1,710,064	502,357	11,636	73,003	161,775								
Perusahaan	861,824	51,968	322,717	50,120									
Pemerintah	81,978		75,443	360,804	202,832								
Sektor								6,367,111			200,995		1,476
Marginal perdagangan								518,020	177,556				
Domestik			1,856,886		284,936	2,481,322	715,576			684,381			1,030,779
Impor			235,770		23,144	699,950				111,891		48,639	
Neraca Kapital			279,943	500,013	67,202								
Pajak tak langsung								129,249	71,747				
Subsidi													
Neraca Luar negeri	3,865	105,381	13,136	52,599	24,913				470,091	50,387			
Jumlah	3,713,929	1,551,341	2,524,773	1,109,119	921,530	6,443,079	715,576	7,034,380	1,119,393	847,159	200,995	124,607	1,124,372

Klasifikasi Sektor SAM Indonesia 2006

Neraca			Kode Sektor
F. Produksi	Tenagakerja	SD Kebawah	1
		Sekolah Menengah	2
		Akademi/Diploma	3
		S1 Keatas	4
		Bukan tenaga kerja	5
Institusi	Rumah tangga	Golongan I	6
		Golongan II	7
		Golongan III	8
		Golongan IV	9
		Golongan V	10
		Golongan VI	11
		Golongan VII	12
		Golongan VIII	13
		Golongan IX	14
		Golongan X	15
		Perusahaan	16
Pemerintahan	17		
Sektor Produksi	Pertanian Tanaman Pangan	18	
	Pertanian Tanaman Lainnya	19	
	Peternakan dan Hasil-hasilnya	20	
	Kehutanan dan Perburuan	21	
	Perikanan	22	
	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	23	
	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau	24	
	Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian dan Kulit	25	
	Industri Kayu & Barang Dari Kayu	26	
	Industri Kertas, Percetakan, Alat Angkutan dan Barang Dari Logam dan Industri	27	
	Industri Kimia, Pupuk, Hasil Dari Tanah Liat, Semen	28	
	Listrik, Gas Dan Air Minum	29	
	Konstruksi	30	
	Perdagangan Besar, Eceran	31	
	Restoran	32	
	Perhotelan	33	
	Angkutan Darat	34	
	Angkutan Udara, Air dan Komunikasi	35	
	Bank dan Asuransi	36	
	Real Estate dan Jasa Perusahaan	37	
Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, Film dan Jasa Sosial Lainnya	38		
Jasa Perseorangan, Rumah tangga dan Jasa Lainnya	39		
Komoditi Impor	40		
Neraca Kapital	41		
Pajak Tidak Langsung neto	42		
Neraca Luar Negeri	43		

Tabel SAM Indonesia Tahun 2006 (43 x 43) (Milyar Rupiah)

Kode Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	9,940	10,751	1,164	2,203	7,290	1	3	3	4
7	19,751	21,362	2,312	4,378	6,395	2	5	4	6
8	23,471	25,385	2,748	5,202	9,411	4	8	7	11
9	33,303	36,020	3,899	7,382	14,855	4	9	8	13
10	37,309	40,352	4,368	8,269	17,611	9	19	17	27
11	47,757	51,653	5,591	10,585	24,661	8	16	14	22
12	62,967	68,103	7,372	13,956	33,356	12	25	22	35
13	72,501	78,415	8,488	16,070	42,865	18	37	33	52
14	93,547	101,178	10,952	20,734	90,665	9	19	17	27
15	307,034	332,080	35,944	65,570	255,250	32	66	59	92
16	-	-	-	-	861,824	452	924	829	1,293
17	-	-	-	-	81,978	701	1,006	1,834	2,784
18	-	-	-	-	-	2,795	4,783	6,248	7,036
19	-	-	-	-	-	179	296	397	392
20	-	-	-	-	-	949	1,572	2,112	2,087
21	-	-	-	-	-	40	88	127	146
22	-	-	-	-	-	1,424	2,358	3,167	3,129
23	-	-	-	-	-	0	1	1	1
24	-	-	-	-	-	6,827	9,441	13,910	17,539
25	-	-	-	-	-	2,158	2,778	3,688	4,306
26	-	-	-	-	-	283	365	484	565
27	-	-	-	-	-	1,897	3,345	4,724	6,707
28	-	-	-	-	-	727	1,324	1,959	2,792
29	-	-	-	-	-	271	511	729	1,065
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	2,935	4,209	4,695	6,114
32	-	-	-	-	-	96	189	316	2,938
33	-	-	-	-	-	263	364	536	676
34	-	-	-	-	-	2,283	2,355	3,112	3,499
35	-	-	-	-	-	1,871	2,757	3,285	3,873
36	-	-	-	-	-	1,473	2,079	2,785	3,404
37	-	-	-	-	-	1,480	2,088	2,809	3,461
38	-	-	-	-	-	9	26	19	25
39	-	-	-	-	-	1,037	1,343	1,813	2,126
40	-	-	-	-	-	4,085	7,665	7,895	10,501
41	-	-	-	-	-	699	9,550	9,856	26,031
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	707,579	765,299	82,836	158,214	1,551,541	35,090	61,692	77,622	113,405

Lanjutan Lampiran 4

Tabel SAM Indonesia Tahun 2006 (43 x 43) (Milyar Rupiah)

Kode Sektor	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	36,386
2	-	-	-	-	-	-	-	-	71,349
3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,036
4	-	-	-	-	-	-	-	-	11,036
5	-	-	-	-	-	-	-	-	90,627
6	11	16	14	20	35	56	662	2,227	-
7	18	24	22	32	54	87	707	4,183	-
8	32	44	40	57	98	157	1,710	5,681	-
9	36	49	44	64	110	175	3,541	9,061	-
10	75	103	93	133	229	366	2,618	9,807	-
11	61	85	76	110	188	301	6,224	15,279	-
12	98	135	122	175	300	480	10,747	20,725	-
13	146	201	182	260	447	715	3,688	26,958	-
14	76	105	95	136	234	373	12,269	38,608	-
15	258	355	321	460	791	1,264	30,839	29,246	-
16	3,622	4,990	4,511	6,466	11,118	17,763	122,717	50,120	-
17	1,951	8,936	3,546	9,479	19,388	25,817	360,804	202,832	-
18	8,673	12,072	14,380	17,421	21,682	38,155	-	-	-
19	510	713	940	936	1,113	1,846	-	-	89
20	2,710	3,791	4,999	4,976	5,920	9,819	-	-	-
21	195	272	348	419	559	1,143	-	-	-
22	4,064	5,685	7,497	7,462	8,878	14,724	-	-	-
23	1	1	2	2	3	5	-	-	-
24	17,623	27,746	37,578	43,009	63,293	147,292	-	-	-
25	5,102	6,845	9,117	9,955	12,205	26,918	-	-	-
26	670	898	1,197	1,307	1,602	3,533	-	-	-
27	8,120	14,042	17,534	23,143	34,766	92,008	-	-	1,132
28	3,276	6,075	8,359	11,353	18,110	68,599	-	-	305
29	1,293	2,299	2,853	3,832	5,845	15,641	-	-	10,895
30	-	-	-	-	-	-	-	-	1
31	6,540	9,351	13,244	13,421	41,974	100,912	-	-	999
32	2,413	5,150	3,263	6,378	18,855	152,018	-	-	3,941
33	679	1,069	1,448	1,658	2,439	5,677	-	-	126
34	3,961	5,225	7,182	7,293	9,622	18,027	-	-	9
35	4,801	7,208	8,743	10,527	14,260	43,347	-	-	1,031
36	4,351	6,401	7,705	8,290	10,475	20,113	-	-	85
37	4,544	6,698	8,264	9,260	12,175	25,005	-	-	1,130
38	26	61	51	55	127	2,732	-	-	5,671
39	2,781	3,840	5,064	5,781	8,167	23,216	-	-	0
40	11,154	13,399	22,999	26,393	31,599	100,080	-	-	825
41	26,298	14,117	32,750	27,545	22,300	110,799	-	-	27,522
42	-	-	-	-	-	-	500,013	67,202	-
43	650	682	1,408	1,724	1,745	6,071	52,599	28,913	1,829
JUMLAH	126,818	168,684	225,989	259,532	380,708	1,075,232	1,109,139	798,923	267,022

Lanjutan Lampiran 4

Tabel SAM Indonesia Tahun 2006 (43 x 43) (Milyar Rupiah)

Kode Sektor	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	28,278	3,884	8,728	29,957	46,023	9,229	4,989	5,497	33,677
2	20,583	5,564	8,754	31,948	48,683	45,122	24,391	14,242	79,782
3	2,314	482	863	1,799	4,943	5,004	2,705	928	3,325
4	3,490	2,135	997	5,095	9,551	5,414	2,877	1,139	7,231
5	16,616	13,223	6,255	4,953	36,168	25,027	20,484	2,987	61,337
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	15,316	1,624	5,498	-	157	-	-	-	0
19	3,353	8,273	664	1,402	4,765	-	-	122,100	43,988
20	4,069	2,573	23,351	-	43	-	-	43,988	1,484
21	2	26	6	185	41	6	42	12,976	1,484
22	-	6	-	-	5,454	-	-	144	3,855
23	-	-	3	-	-	13,107	-	26,944	158
24	-	0	0	-	-	-	156	2,332	6,576
25	-	415	27,947	-	3,636	-	-	81	55
26	17	48	1	16	60	-	-	100,252	5,453
27	405	33	797	547	4,132	85	17	208	105,504
28	6,465	518	543	2,683	3,827	859	2,515	2,697	116,011
29	20	156	26	104	3,827	7,394	23,988	6,530	31,759
30	2,594	29	489	208	200	1,598	6,650	1,335	6,137
31	2,032	6,967	182	2,014	2,892	181	582	50	642
32	65	3	34	135	463	58,800	11,501	4,075	27,836
33	10	1	7	1	218	1,023	1,292	675	1,579
34	531	78	164	24	52	191	290	17	304
35	97	19	133	59	1,008	2,104	2,256	2,102	5,150
36	3,021	160	231	347	1,115	2,076	2,096	1,574	3,995
37	668	262	548	131	1,087	6,901	4,830	2,149	5,971
38	83	1	1	-	1,584	2,227	1,872	935	8,566
39	1,033	139	375	35	3	2	1	0	194
40	13,017	20,625	840	21,479	2,459	5,263	1,848	1,708	5,213
41	-	-	-	-	87,273	69,337	113,688	5,564	63,579
42	1,376	1,086	1,019	348	456	759	1,235	355	4,670
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	125,455	68,330	88,458	103,471	266,292	261,709	230,304	363,585	598,538

Lanjutan Lampiran 4

Tabel SAM Indonesia Tahun 2006 (43 x 43) (Milyar Rupiah)

Kode Sektor	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	41,128	3,402	59,401	149,330	24,718	4,462	17,129	10,021	18,867
2	68,849	7,931	17,401	85,620	36,146	6,524	25,049	35,383	81,225
3	3,374	295	4,043	13,098	1,810	327	1,254	4,181	4,551
4	7,614	735	9,578	24,077	5,210	940	3,610	5,811	4,637
5	24,331	1,772	1,740	715,497	5,050	1,524	12,636	207,225	168,187
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	157	-	-	110	7,506	973	-	-	-
19	13,870	-	-	12	610	11	0	19	0
20	35	-	-	-	8,537	1,244	3	1	-
21	326	0	-	17	49	13	2	6	-
22	8	-	-	-	3,398	378	-	0	-
23	129,297	6,349	38,934	22	0	11	13	11	-
24	1,224	-	-	385	30,071	4,929	29	897	157
25	1,767	8	504	4,904	1,407	146	113	272	48
26	148	-	27,022	2,163	5	1	5	23	3
27	4,426	1,039	52,607	20,433	138	147	1,434	7,181	4,484
28	61,911	12,819	95,169	28,717	856	251	15,770	14,575	1,794
29	5,753	8,565	294	20,374	542	213	467	3,235	1,803
30	719	514	700	19,046	43	46	473	6,181	1,688
31	11,208	668	87,042	5,544	13,992	2,171	884	1,377	1,254
32	1,626	32	4,986	13,534	54	376	233	1,409	939
33	289	17	806	3,170	25	28	69	309	463
34	2,272	95	2,230	31,374	44	42	676	497	1,362
35	3,290	93	3,811	27,887	133	297	1,644	17,051	5,276
36	4,907	545	7,566	44,388	722	161	1,725	5,047	56,964
37	2,566	1,080	21,825	85,266	1,058	379	1,695	7,309	9,039
38	43	254	57	116	87	131	45	633	2,286
39	4,308	106	3,620	21,792	173	169	15,678	4,180	3,213
40	45,749	5,066	41,940	56,820	25,253	1,025	26,022	14,402	7,466
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1,059	532	43	10,038	341	495	982	24,424	12,616
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	442,253	51,916	493,808	1,383,737	167,978	27,416	127,638	371,661	388,322

Lanjutan Lampiran 4
Tabel SAM Indonesia Tahun 2006 (43 x 43) (Milyar Rupiah)

Kode Sektor	37	38	39	40	41	42	43	JUMLAH
1	22,324	141,146	9,005	-	-	-	-	707,579
2	7,793	35,341	7,619	-	-	-	-	765,299
3	2,479	20,444	2,581	-	-	-	-	82,836
4	4,247	36,694	4,714	-	-	-	1,382	158,214
5	86,831	14,656	32,136	-	-	-	2,281	1,551,541
6	-	-	-	-	-	-	690	35,090
7	-	-	-	-	-	-	2,351	61,692
8	-	-	-	-	-	-	3,555	77,622
9	-	-	-	-	-	-	4,832	113,405
10	-	-	-	-	-	-	5,413	126,818
11	-	-	-	-	-	-	6,055	168,684
12	-	-	-	-	-	-	7,362	225,989
13	-	-	-	-	-	-	8,457	259,532
14	-	-	-	-	-	-	11,663	380,708
15	-	-	-	-	-	-	15,570	1,075,232
16	-	-	-	-	-	-	22,509	1,109,139
17	-	-	-	-	-	76,389	1,476	798,923
18	73	3	4,332	-	(26,048)	-	1,957	267,022
19	0	73	4,011	-	21,462	-	7,055	125,455
20	95	-	58	-	(26,834)	-	1,753	68,330
21	6	5	831	-	11,991	-	55,083	88,458
22	37	-	3	-	(6,631)	-	15,319	103,471
23	-	341	505	-	(33,028)	-	101,814	266,292
24	373	-	153	-	(183,418)	-	22,357	261,709
25	247	1,075	6,041	-	(54,991)	-	47,988	230,304
26	2	90	347	-	33,150	-	182,634	363,585
27	3,944	12,328	17,741	-	(24,378)	-	162,427	598,538
28	1,406	8,186	16,670	-	(124,409)	-	91,362	442,253
29	771	2,883	2,797	-	(46,976)	-	626	51,916
30	9,262	12,083	259	-	434,128	-	-	493,808
31	597	2,750	6,030	-	697,717	-	231,300	1,383,737
32	726	11,044	507	-	(67,231)	-	2,978	167,978
33	193	2,124	336	-	(2,018)	-	5,915	127,416
34	678	3,962	319	-	2,692	-	4,388	127,638
35	2,525	8,002	976	-	160,489	-	28,270	371,661
36	4,196	5,108	1,587	-	151,957	-	10,545	388,322
37	3,652	5,341	4,109	-	(83,768)	-	8,866	166,564
38	1,218	3,737	1,708	-	77,924	-	23,903	355,169
39	4,650	12,370	2,086	-	(45,396)	-	24,239	169,742
40	3,451	11,116	38,718	-	(69,612)	-	-	870,091
41	-	-	-	-	-	-	-	847,159
42	4,889	4,268	3,567	-	-	-	-	76,389
43	-	-	-	870,091	50,387	-	-	1,124,372
JUMLAH	166,664	355,169	169,742	870,091	847,159	76,389	1,124,372	

Lampiran 5

Matrik Multiplier dari SAM Indonesia Tahun 2006

Kode Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.23425	0.23425	0.23425	0.22839	0.17720	0.24722	0.20822	0.22330
2	0.32949	1.32949	0.32949	0.32128	0.19787	0.35197	0.29577	0.31920
3	0.03028	0.03028	1.03028	0.02953	0.02364	0.03279	0.02725	0.02944
4	0.05748	0.05748	0.05748	1.05606	0.04426	0.06171	0.05182	0.05574
5	0.47424	0.47424	0.47424	0.46259	1.27610	0.53426	0.44633	0.47136
6	0.02649	0.02649	0.02649	0.02606	0.01420	1.01334	0.01122	0.01201
7	0.04984	0.04984	0.04984	0.04905	0.02091	0.02338	1.01967	0.02111
8	0.06042	0.06042	0.06042	0.05945	0.02752	0.02906	0.02445	1.02622
9	0.08677	0.08677	0.08677	0.08538	0.04172	0.04239	0.03566	0.03824
10	0.09733	0.09733	0.09733	0.09576	0.04647	0.04754	0.04003	0.04287
11	0.12670	0.12670	0.12670	0.12464	0.06497	0.06322	0.05319	0.05700
12	0.16850	0.16850	0.16850	0.16575	0.08878	0.08488	0.07144	0.07651
13	0.19394	0.19394	0.19394	0.19078	0.10134	0.09758	0.08213	0.08798
14	0.26355	0.26355	0.26355	0.25915	0.16740	0.14101	0.11851	0.12690
15	0.81592	0.81592	0.81592	0.78696	0.44508	0.41081	0.34524	0.36952
16	0.35829	0.35829	0.35829	0.34957	0.85630	0.38938	0.33030	0.34380
17	0.26465	0.26465	0.26465	0.25829	0.50494	0.27244	0.22948	0.24921
18	0.13222	0.13222	0.13222	0.12919	0.07252	0.16065	0.14608	0.15416
19	0.03292	0.03292	0.03292	0.03212	0.01918	0.03619	0.03161	0.03408
20	0.04428	0.04428	0.04428	0.04325	0.02417	0.05394	0.04844	0.05193
21	0.00528	0.00528	0.00528	0.00516	0.00315	0.00518	0.00487	0.00535
22	0.05275	0.05275	0.05275	0.05158	0.02841	0.07023	0.06324	0.06769
23	0.08857	0.08857	0.08857	0.08631	0.05162	0.08600	0.07273	0.07959
24	0.31861	0.31861	0.31861	0.31082	0.17296	0.35939	0.29164	0.32787
25	0.08862	0.08862	0.08862	0.08656	0.04959	0.11929	0.09393	0.10010
26	0.05142	0.05142	0.05142	0.05016	0.02979	0.05185	0.04446	0.04808
27	0.23116	0.23116	0.23116	0.22539	0.13472	0.20899	0.18549	0.20197
28	0.20990	0.20990	0.20990	0.20449	0.12306	0.19585	0.16691	0.18155
29	0.05334	0.05334	0.05334	0.05200	0.03106	0.04937	0.04324	0.04692
30	0.01865	0.01865	0.01865	0.01820	0.01431	0.02073	0.01727	0.01831
31	0.27678	0.27678	0.27678	0.26968	0.15498	0.29287	0.24224	0.25053
32	0.15475	0.15475	0.15475	0.14992	0.08866	0.08714	0.07386	0.07987
33	0.01345	0.01345	0.01345	0.01313	0.00801	0.01568	0.01274	0.01423
34	0.06355	0.06355	0.06355	0.06211	0.03562	0.10667	0.07295	0.07730
35	0.09932	0.09932	0.09932	0.09687	0.05670	0.11809	0.09867	0.09986
36	0.09918	0.09918	0.09918	0.09687	0.05624	0.12308	0.10088	0.10793
37	0.09942	0.09942	0.09942	0.09707	0.05686	0.11733	0.09662	0.10292
38	0.08561	0.08561	0.08561	0.08353	0.15629	0.08750	0.07381	0.07988
39	0.09053	0.09053	0.09053	0.08833	0.07385	0.10761	0.08506	0.09142
40	0.50976	0.50976	0.50976	0.49718	0.29244	0.57428	0.50308	0.51182

Lanjutan Lampiran 5

Matrik Multiplier dari SAM Indonesia Tahun 2006

Kode Sektor	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0.19567	0.20136	0.24323	0.21606	0.22840	0.25183	0.24287	0.14672
2	0.27963	0.28669	0.34070	0.30958	0.32467	0.34741	0.34036	0.13334
3	0.02581	0.02627	0.03185	0.02840	0.02999	0.03275	0.03089	0.02005
4	0.04872	0.04998	0.06035	0.05354	0.05666	0.06175	0.05896	0.03717
5	0.40795	0.42192	0.49364	0.45289	0.46678	0.51701	0.47794	0.17998
6	0.01052	0.01087	0.01306	0.01163	0.01228	0.01345	0.01274	0.00807
7	0.01851	0.01908	0.02301	0.02044	0.02164	0.02364	0.02249	0.01418
8	0.02298	0.02377	0.02864	0.02541	0.02691	0.02944	0.02790	0.01865
9	1.03352	0.03462	0.04176	0.03703	0.03923	0.04294	0.04064	0.02866
10	0.03760	1.03898	0.04696	0.04160	0.04410	0.04828	0.04562	0.03050
11	0.04997	0.05167	1.06238	0.05521	0.05854	0.06416	0.06051	0.04457
12	0.06708	0.06948	0.08385	1.07416	0.07866	0.08625	0.08121	0.06233
13	0.07717	0.07992	0.09661	0.08527	1.09055	0.09934	0.09341	0.06460
14	0.11114	0.11466	0.13849	0.12264	0.12989	1.14268	0.13398	0.09870
15	0.32318	0.33387	0.39900	0.35783	0.37634	0.41113	1.39139	0.23411
16	0.30070	0.32946	0.38511	0.34107	0.35914	0.40039	0.35626	1.29344
17	0.22291	0.22516	0.31118	0.23499	0.27366	0.31785	0.25767	0.60127
18	0.12746	0.13612	0.15323	0.13642	0.14455	0.14136	0.11894	0.04527
19	0.02843	0.03033	0.03566	0.03297	0.03387	0.03475	0.03239	0.01263
20	0.04098	0.04448	0.05050	0.04665	0.04543	0.04498	0.04152	0.01494
21	0.00457	0.00497	0.00577	0.00529	0.00561	0.00577	0.00512	0.00213
22	0.05167	0.05681	0.06370	0.05977	0.05716	0.05464	0.04522	0.01761
23	0.07060	0.07211	0.08796	0.08192	0.08766	0.09410	0.09429	0.03329
24	0.28883	0.27609	0.33070	0.31211	0.32139	0.34068	0.31878	0.10344
25	0.08435	0.08848	0.09867	0.09254	0.09390	0.09216	0.08220	0.03159
26	0.04280	0.04504	0.05439	0.04983	0.05357	0.05598	0.05179	0.01928
27	0.18377	0.19370	0.24034	0.21865	0.23962	0.25454	0.23875	0.08713
28	0.16095	0.16688	0.20432	0.19053	0.20559	0.22123	0.22823	0.07954
29	0.04252	0.04436	0.05471	0.04993	0.05422	0.05858	0.05556	0.02003
30	0.01593	0.01659	0.01990	0.01776	0.01859	0.02060	0.01866	0.01201
31	0.22194	0.22015	0.25781	0.24282	0.24485	0.31920	0.29784	0.09389
32	0.09227	0.08742	0.11272	0.08782	0.10196	0.13458	0.22170	0.05202
33	0.01238	0.01196	0.01431	0.01350	0.01388	0.01470	0.01304	0.00541
34	0.06351	0.06468	0.07107	0.06795	0.06608	0.06761	0.05647	0.02290
35	0.08444	0.08968	0.10480	0.09441	0.09912	0.10187	0.10092	0.03626
36	0.09292	0.09910	0.11482	0.10385	0.10425	0.10620	0.09158	0.03633
37	0.08899	0.09585	0.11116	0.10127	0.10324	0.10804	0.09459	0.03677
38	0.07135	0.07219	0.09911	0.07544	0.08731	0.10111	0.08478	0.18438
39	0.07816	0.08252	0.09713	0.08728	0.09136	0.09770	0.08984	0.06471
40	0.45014	0.45309	0.51230	0.49747	0.51471	0.52373	0.51800	0.18813

Lanjutan Lampiran 5

Matrik Multiplier dari SAM Indonesia Tahun 2006

Kode Sektor	17	18	19	20	21	22	23	24
1	0.35354	0.33572	0.45758	0.24578	0.31483	0.48071	0.33647	0.23375
2	0.29766	0.52422	0.48036	0.30434	0.40984	0.57057	0.39974	0.41625
3	0.04865	0.03320	0.04640	0.02926	0.03875	0.04165	0.03905	0.04363
4	0.08995	0.08976	0.08454	0.07403	0.06977	0.09529	0.07494	0.06680
5	0.39571	0.71287	0.58308	0.54783	0.52384	0.42541	0.43612	0.54228
6	0.01769	0.01842	0.01885	0.01270	0.01512	0.01958	0.01482	0.01419
7	0.03236	0.03248	0.03406	0.02207	0.02700	0.03640	0.02691	0.02507
8	0.04071	0.04018	0.04181	0.02744	0.03327	0.04428	0.03298	0.03100
9	0.06046	0.05854	0.06058	0.04010	0.04833	0.06376	0.04774	0.04514
10	0.06708	0.06554	0.06787	0.04487	0.05413	0.07149	0.05349	0.05054
11	0.09258	0.08699	0.08942	0.05982	0.07157	0.09339	0.07038	0.06705
12	0.12445	0.11658	0.11950	0.08030	0.09578	0.12438	0.09399	0.08985
13	0.14779	0.13387	0.13734	0.09215	0.11003	0.14310	0.10805	0.10317
14	0.20913	0.19305	0.19377	0.13454	0.15687	0.19664	0.15179	0.14858
15	0.47698	0.56952	0.58166	0.39291	0.46701	0.60260	0.45705	0.43884
16	0.38925	0.49815	0.41459	0.38007	0.36904	0.31347	0.31145	0.37928
17	1.58990	0.32011	0.27554	0.24071	0.24097	0.22216	0.20871	0.24417
18	0.09707	1.09506	0.22372	0.10596	0.15254	0.10065	0.07963	0.07454
19	0.02785	0.02679	1.05980	0.14785	0.06522	0.04026	0.03994	0.02274
20	0.03188	0.03144	0.06707	1.06533	0.30194	0.03401	0.02629	0.02483
21	0.00475	0.00405	0.00468	0.00329	1.00386	0.00589	0.00376	0.00344
22	0.03745	0.03749	0.03845	0.02584	0.03110	1.03937	0.05064	0.03019
23	0.07301	0.07934	0.08989	0.05343	0.07450	0.07655	1.06034	0.11721
24	0.21807	0.22269	0.22775	0.15385	0.18354	0.23590	0.17895	1.17314
25	0.06843	0.06481	0.06662	0.05140	0.37188	0.06730	0.06622	0.05272
26	0.04226	0.04214	0.04143	0.02796	0.03516	0.04007	0.03439	0.03245
27	0.19112	0.17003	0.17946	0.12074	0.15727	0.18021	0.15531	0.14440
28	0.17478	0.20261	0.23190	0.13237	0.19030	0.19050	0.14800	0.16959
29	0.04390	0.03968	0.04153	0.03240	0.04619	0.04203	0.03308	0.04324
30	0.02905	0.02041	0.03821	0.01638	0.02199	0.01725	0.02358	0.01834
31	0.20022	0.21322	0.22895	0.24763	0.21406	0.22722	0.16434	0.38254
32	0.11086	0.11077	0.11313	0.07753	0.09313	0.11644	0.08891	0.09151
33	0.01204	0.00983	0.01012	0.00708	0.00865	0.01011	0.00800	0.00894
34	0.04977	0.04970	0.05224	0.03595	0.04465	0.04827	0.04067	0.04909
35	0.07904	0.07227	0.07498	0.05248	0.06513	0.07530	0.06183	0.06987
36	0.07918	0.07781	0.10504	0.06109	0.07544	0.07967	0.06378	0.09720
37	0.08033	0.09466	0.08539	0.06305	0.07576	0.07743	0.06511	0.08172
38	0.48664	0.10122	0.08861	0.07607	0.07673	0.07146	0.06663	0.07790
39	0.15853	0.07809	0.08305	0.05827	0.06991	0.07048	0.06640	0.08444
40	0.41117	0.48283	0.52789	0.60386	0.58770	0.59953	0.64678	0.60192

Lanjutan Lampiran 5

Matrik Multiplier dari SAM Indonesia Tahun 2006

Kode Sektor	25	26	27	28	29	30	31	32
1	0.15910	0.31034	0.30455	0.36035	0.34325	0.40335	0.32083	0.36347
2	0.29041	0.45952	0.48112	0.49960	0.53204	0.40376	0.32639	0.52048
3	0.02849	0.03612	0.03549	0.03946	0.03808	0.04157	0.03701	0.03977
4	0.04451	0.07466	0.07049	0.07807	0.07722	0.08360	0.06920	0.08542
5	0.35029	0.54281	0.56845	0.48516	0.47062	0.55888	0.92024	0.49291
6	0.00962	0.01591	0.01623	0.01694	0.01704	0.01675	0.01643	0.01744
7	0.01708	0.02847	0.02895	0.03083	0.03111	0.03004	0.02735	0.03178
8	0.02108	0.03506	0.03569	0.03776	0.03806	0.03696	0.03449	0.03890
9	0.03066	0.05091	0.05185	0.05462	0.05502	0.05364	0.05088	0.05626
10	0.03433	0.05702	0.05807	0.06121	0.06166	0.06008	0.05687	0.06305
11	0.04547	0.07536	0.07681	0.08048	0.08099	0.07935	0.07677	0.08287
12	0.06089	0.10082	0.10280	0.10745	0.10810	0.10613	0.10355	0.11063
13	0.06994	0.11583	0.11809	0.12353	0.12428	0.12194	0.11867	0.12719
14	0.10021	0.16489	0.16855	0.17315	0.17370	0.17323	0.17945	0.17808
15	0.29716	0.49145	0.50141	0.52242	0.52531	0.51706	0.51034	0.53768
16	0.24584	0.38287	0.40014	0.34733	0.33807	0.39489	0.62919	0.35331
17	0.15934	0.25059	0.26085	0.23382	0.22901	0.25932	0.38657	0.23839
18	0.05154	0.43625	0.16437	0.09412	0.09168	0.11857	0.08756	0.13603
19	0.01913	0.15629	0.07404	0.06820	0.04037	0.04773	0.02545	0.03454
20	0.01728	0.06931	0.04328	0.03118	0.03030	0.04086	0.02923	0.08293
21	0.00265	0.00435	0.01192	0.00488	0.00461	0.03040	0.00433	0.00413
22	0.02066	0.10721	0.05036	0.04155	0.04000	0.04321	0.03404	0.05559
23	0.08040	0.09224	0.10814	0.40891	0.31393	0.21828	0.07588	0.07770
24	0.11876	0.19365	0.19765	0.20860	0.20709	0.20606	0.20201	0.38983
25	1.03626	0.33380	0.13263	0.06987	0.06658	0.09543	0.06410	0.06954
26	0.02362	1.03810	0.25425	0.03933	0.04292	0.11594	0.04118	0.03656
27	0.10828	0.16370	1.39845	0.17775	0.19676	0.30088	0.17941	0.16252
28	0.22102	0.22574	0.24763	1.32513	0.50151	0.39978	0.18358	0.16757
29	0.05892	0.05037	0.05667	0.05572	1.24054	0.04792	0.05545	0.04471
30	0.01357	0.02035	0.01990	0.02153	0.03145	1.02491	0.03345	0.01751
31	0.16077	0.21345	0.24709	0.21662	0.21261	0.37903	1.19008	0.31772
32	0.06437	0.09936	0.10223	0.10550	0.10389	0.11396	0.11057	1.10565
33	0.00667	0.00901	0.00963	0.00983	0.00976	0.01137	0.01148	0.00971
34	0.03611	0.05137	0.05575	0.05022	0.04805	0.05479	0.06489	0.04781
35	0.05012	0.07114	0.07649	0.07709	0.07323	0.08282	0.08837	0.07243
36	0.06781	0.08520	0.08850	0.08624	0.08971	0.10100	0.10682	0.08421
37	0.05311	0.08047	0.09202	0.07915	0.09921	0.13115	0.13268	0.08570
38	0.05103	0.07995	0.08367	0.07512	0.07952	0.08340	0.12201	0.07683
39	0.05120	0.07507	0.08219	0.08097	0.07462	0.08541	0.09484	0.07348
40	0.73426	0.58157	0.56154	0.59906	0.59431	0.56606	0.40894	0.59052

Lanjutan Lampiran 5

Matrik Multiplier dari SAM Indonesia Tahun 2006

Kode Sektor	33	34	35	36	37	38	39	40
1	0.40309	0.33646	0.21875	0.25827	0.34719	0.64411	0.25708	-
2	0.57422	0.46783	0.33260	0.49366	0.30703	0.43339	0.31431	-
3	0.04425	0.03600	0.03634	0.04005	0.04247	0.08894	0.04018	-
4	0.09468	0.07807	0.06271	0.06359	0.07746	0.16324	0.07577	-
5	0.56509	0.48585	0.91219	0.87589	0.90579	0.52182	0.55750	-
6	0.01941	0.01610	0.01491	0.01761	0.01663	0.02218	0.01324	-
7	0.03528	0.02916	0.02438	0.02995	0.02784	0.04102	0.02310	-
8	0.04323	0.03577	0.03093	0.03750	0.03504	0.04999	0.02868	-
9	0.06255	0.05180	0.04581	0.05506	0.05163	0.07206	0.04188	-
10	0.07009	0.05804	0.05118	0.06158	0.05772	0.08079	0.04687	-
11	0.09220	0.07642	0.06945	0.08262	0.07780	0.10571	0.06242	-
12	0.12312	0.10209	0.09386	0.11118	0.10489	0.14088	0.08375	-
13	0.14154	0.11734	0.10750	0.12751	0.12022	0.16205	0.09614	-
14	0.19866	0.16520	0.16483	0.18956	0.18103	0.22384	0.13995	-
15	0.59867	0.49666	0.46374	0.54643	0.51640	0.68228	0.40965	-
16	0.40395	0.34620	0.62108	0.60260	0.62018	0.38104	0.38738	-
17	0.27119	0.23102	0.37820	0.37512	0.38218	0.26583	0.24612	-
18	0.13759	0.08824	0.07917	0.09111	0.09021	0.11886	0.10740	-
19	0.03390	0.03166	0.02383	0.02466	0.02633	0.03416	0.05380	-
20	0.08143	0.02842	0.02628	0.03037	0.03034	0.04047	0.02744	-
21	0.00484	0.00449	0.00402	0.00411	0.00553	0.00607	0.00898	-
22	0.05357	0.03382	0.03091	0.03571	0.03479	0.04634	0.02975	-
23	0.08847	0.10788	0.07469	0.06790	0.07558	0.09760	0.09839	-
24	0.41710	0.19572	0.18453	0.21457	0.20518	0.27415	0.16285	-
25	0.07416	0.06412	0.05573	0.06251	0.06440	0.08453	0.09388	-
26	0.04195	0.03911	0.03740	0.03978	0.04500	0.05603	0.05413	-
27	0.18789	0.17993	0.16980	0.18159	0.19691	0.25274	0.26016	-
28	0.19187	0.30151	0.18761	0.16157	0.17537	0.23209	0.25848	-
29	0.05477	0.04430	0.04501	0.04488	0.04376	0.05891	0.05514	-
30	0.02133	0.01941	0.03315	0.02256	0.07328	0.05371	0.01801	-
31	0.33697	0.19075	0.17337	0.19618	0.19893	0.25914	0.19521	-
32	0.13109	0.09873	0.09567	0.10964	0.10669	0.16311	0.08473	-
33	1.01168	0.00943	0.00919	0.01097	0.01051	0.01779	0.00954	-
34	0.05407	1.04689	0.03966	0.04813	0.04698	0.06699	0.03907	-
35	0.09098	0.07865	1.10845	0.08610	0.08355	0.11067	0.06246	-
36	0.09440	0.08394	0.07826	1.24236	0.09905	0.10657	0.07245	-
37	0.10166	0.08311	0.08353	0.09854	1.09472	0.10718	0.08645	-
38	0.09171	0.07548	0.12026	0.12492	0.12770	1.09669	0.08844	-
39	0.08727	0.18956	0.08195	0.08661	0.10457	0.11983	1.07347	-
40	0.52059	0.60072	0.37108	0.38853	0.39235	0.51492	0.58690	1.00000

Simulasi Dampak Pertumbuhan Ekonomi

Kode Sektor	1 persen		6,7 persen		7,2 persen		7,6 persen	
	Injeksi	Dampak	Injeksi	Dampak	Injeksi	Dampak	Injeksi	Dampak
1	-	13,645	-	91,422	-	98,245	-	103,703
2	-	15,533	-	104,070	-	111,837	-	118,050
3	-	1,751	-	11,731	-	12,607	-	13,307
4	-	3,232	-	21,652	-	23,268	-	24,560
5	-	33,103	-	221,789	-	238,340	-	251,581
6	-	692	-	4,634	-	4,980	-	5,256
7	-	1,183	-	7,929	-	8,521	-	8,994
8	-	1,479	-	9,907	-	10,646	-	11,237
9	-	2,168	-	14,527	-	15,611	-	16,478
10	-	2,425	-	16,250	-	17,463	-	18,433
11	-	3,248	-	21,762	-	23,386	-	24,685
12	-	4,368	-	29,264	-	31,448	-	33,195
13	-	5,010	-	33,568	-	36,073	-	38,077
14	-	7,410	-	49,649	-	53,354	-	56,318
15	-	21,435	-	143,615	-	154,333	-	162,907
16	-	22,823	-	152,913	-	164,325	-	173,454
17	-	14,271	-	95,613	-	102,749	-	108,457
18	1,479	5,400	9,906	36,178	10,645	38,878	11,237	41,038
19	376	1,637	2,520	10,971	2,708	11,790	2,858	12,445
20	228	1,554	1,531	10,415	1,645	11,192	1,736	11,814
21	128	328	860	2,197	924	2,361	975	2,492
22	117	1,601	786	10,728	845	11,528	892	12,169
23	656	4,130	4,396	27,668	4,724	29,733	4,987	31,385
24	630	9,166	4,224	61,414	4,539	65,997	4,791	69,663
25	521	3,361	3,488	22,520	3,748	24,200	3,956	25,545
26	68	2,096	458	14,045	492	15,094	519	15,932
27	1,406	9,362	9,419	62,726	10,122	67,407	10,685	71,152
28	535	8,538	3,584	57,204	3,851	61,473	4,065	64,888
29	48	2,168	321	14,525	345	15,609	364	16,476
30	60	1,434	401	9,610	431	10,327	455	10,901
31	17,856	26,220	119,634	175,674	128,562	188,784	135,705	199,272
32	196	4,766	1,311	31,932	1,409	34,315	1,487	36,221
33	49	513	326	3,436	350	3,693	370	3,898
34	476	2,780	3,189	18,628	3,427	20,018	3,617	21,130
35	5,040	8,700	33,767	58,293	36,287	62,643	38,303	66,123
36	4,564	9,217	30,579	61,754	32,861	66,362	34,686	70,049
37	1,799	6,297	12,054	42,190	12,953	45,339	13,673	47,857
38	3,964	8,584	26,559	57,512	28,541	61,804	30,126	65,237
39	978	4,797	6,553	32,139	7,042	34,538	7,433	36,457
40	-	18,287	-	122,526	-	131,670	-	138,985

Simulasi Dampak Subsidi Pendidikan Secara Merata Terhadap Rumah Tangga

Kode Sektor	Rp 138,7 Triliun (2007)		Rp 163,2 Triliun (2008)		Rp 183,4 Triliun (2009)	
	Injeksi	Dampak	Injeksi	Dampak	Injeksi	Dampak
1	-	31.32	-	36.85	-	41.42
2	-	44.33	-	52.16	-	58.61
3	-	4.10	-	4.82	-	5.42
4	-	7.76	-	9.13	-	10.26
5	-	65.05	-	76.54	-	86.02
6	13.87	15.55	16.32	18.30	18.34	20.56
7	13.87	16.82	16.32	19.80	18.34	22.25
8	13.87	17.54	16.32	20.64	18.34	23.20
9	13.87	19.22	16.32	22.62	18.34	25.42
10	13.87	19.88	16.32	23.40	18.34	26.29
11	13.87	21.86	16.32	25.72	18.34	28.90
12	13.87	24.60	16.32	28.94	18.34	32.53
13	13.87	26.21	16.32	30.84	18.34	34.66
14	13.87	31.62	16.32	37.21	18.34	41.81
15	13.87	65.44	16.32	77.00	18.34	86.53
16	-	49.04	-	57.70	-	64.84
17	-	35.99	-	42.34	-	47.58
18	-	19.68	-	23.16	-	26.02
19	-	4.58	-	5.39	-	6.06
20	-	6.50	-	7.65	-	8.60
21	-	0.73	-	0.86	-	0.96
22	-	8.19	-	9.63	-	10.82
23	-	11.47	-	13.50	-	15.17
24	-	43.93	-	51.69	-	58.09
25	-	13.12	-	15.43	-	17.34
26	-	6.90	-	8.12	-	9.13
27	-	30.04	-	35.35	-	39.72
28	-	26.66	-	31.37	-	35.25
29	-	6.93	-	8.15	-	9.16
30	-	2.56	-	3.01	-	3.38
31	-	35.93	-	42.27	-	47.51
32	-	14.97	-	17.62	-	19.80
33	-	1.89	-	2.23	-	2.50
34	-	9.91	-	11.66	-	13.10
35	-	13.76	-	16.19	-	18.19
36	-	14.49	-	17.05	-	19.16
37	-	14.15	-	16.65	-	18.71
38	-	11.55	-	13.59	-	15.27
39	-	12.60	-	14.82	-	16.65
40	-	70.16	-	82.56	-	93

Simulasi Dampak Subsidi Pendidikan Untuk Rumah Tangga Golongan Bawah

Kode Sektor	Rp 138,7 Triliun (2007)		Rp 163,2 Triliun (2008)		Rp 183,4 Triliun (2009)	
	Injeksi	Dampak	Injeksi	Dampak	Injeksi	Dampak
1	-	30.32	-	35.68	-	40.09
2	-	43.22	-	50.86	-	57.16
3	-	4.00	-	4.70	-	5.29
4	-	7.56	-	8.89	-	9.99
5	-	64.49	-	75.88	-	85.28
6	34.68	36.31	40.80	42.72	45.85	48.01
7	34.68	37.54	40.80	44.17	45.85	49.64
8	34.68	38.24	40.80	44.99	45.85	50.56
9	34.68	39.87	40.80	46.91	45.85	52.72
10	-	5.83	-	6.86	-	7.70
11	-	7.75	-	9.11	-	10.24
12	-	10.40	-	12.24	-	13.75
13	-	11.96	-	14.07	-	15.81
14	-	17.25	-	20.30	-	22.81
15	-	50.24	-	59.11	-	66.42
16	-	47.30	-	55.66	-	62.55
17	-	33.77	-	39.74	-	44.66
18	-	20.40	-	24.00	-	26.98
19	-	4.52	-	5.32	-	5.98
20	-	6.77	-	7.97	-	8.95
21	-	0.69	-	0.81	-	0.92
22	-	8.77	-	10.32	-	11.59
23	-	10.71	-	12.60	-	14.16
24	-	43.96	-	51.72	-	58.13
25	-	13.79	-	16.22	-	18.23
26	-	6.49	-	7.64	-	8.58
27	-	27.05	-	31.83	-	35.77
28	-	24.45	-	28.77	-	32.34
29	-	6.31	-	7.43	-	8.35
30	-	2.50	-	2.95	-	3.31
31	-	34.94	-	41.11	-	46.20
32	-	11.55	-	13.59	-	15.27
33	-	1.91	-	2.25	-	2.52
34	-	11.11	-	13.07	-	14.69
35	-	13.91	-	16.36	-	18.39
36	-	14.73	-	17.33	-	19.48
37	-	14.07	-	16.56	-	18.61
38	-	10.84	-	12.75	-	14.33
39	-	12.56	-	14.78	-	16.61
40	-	71	-	83	-	94

**Simulasi Dampak Kebutuhan Tenaga Kerja Akibat Kenaikan
Pertumbuhan Ekonomi**

Klasifikasi Tenaga Kerja	1 Persen (%)	6,7 Persen (%)	7,2 Persen (%)	7,6 Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD Kebawah	0.24	1.62	1.74	1.83
Sekolah Menengah	0.61	4.08	4.38	4.63
Akademi/Diploma	2.33	15.58	16.74	17.67
S1 Keatas	4.12	27.61	29.67	31.32
Total	0.73	4.89	5.26	5.55

**Jalur Utama Pengaruh Subsidi Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah
Tangga Hasil Pengolahan SPA**

Structure Path	Global Effect	Direct Effect	Path Mult	Total Effect	% of Global	Cum %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6, 18, 4, 7	0.007	0.000	1.113	0.000	2.4	2.4
6, 18, 5, 7		0.000	1.177	0.000	3.1	5.5
6, 24, 4, 7		0.000	1.137	0.000	2.8	8.3
6, 24, 5, 7		0.000	1.200	0.000	2.2	10.5
6, 8	0.009	0.000	1.014	0.000	2.6	2.6
6, 18, 5, 8		0.000	1.178	0.000	3.5	6.1
6, 24, 4, 8		0.000	1.138	0.000	2.3	8.4
6, 24, 5, 8		0.000	1.200	0.000	2.5	10.9
6, 18, 5, 9	0.014	0.000	1.179	0.001	3.8	3.8
6, 24, 3, 9		0.000	1.121	0.000	2.4	6.2
6, 24, 4, 9		0.000	1.139	0.000	2.3	8.5
6, 24, 5, 9		0.000	1.201	0.000	2.7	11.2
6, 10	0.016	0.001	1.020	0.001	3.6	3.6
6, 18, 5, 10		0.001	1.181	0.001	3.9	7.5
6, 24, 3, 10		0.000	1.124	0.000	2.3	9.8
6, 24, 5, 10		0.000	1.203	0.000	2.7	12.5
6, 11	0.021	0.000	1.025	0.000	2.3	2.3
6, 18, 5, 11		0.001	1.184	0.001	4.1	6.4
6, 24, 3, 11		0.000	1.128	0.001	2.6	9.0
6, 24, 5, 11		0.001	1.205	0.001	2.9	11.9
6, 12	0.029	0.001	1.030	0.001	2.7	2.7
6, 18, 5, 12		0.001	1.186	0.001	4.1	6.8
6, 24, 3, 12		0.001	1.131	0.001	2.3	9.1
6, 24, 5, 12		0.001	1.207	0.001	2.9	12.0

**Jalur Utama Pengaruh Subsidi Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah
Tangga Hasil Pengolahan SPA**

Structure Path	Global Effect	Direct Effect	Path Mult	Total Effect	% of Global	Cum %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6, 13	0.033	0.001	1.034	0.001	3.5	3.5
6, 18, 5, 13		0.001	1.188	0.002	4.6	8.1
6, 24, 3, 13		0.001	1.134	0.001	2.7	10.8
6, 24, 5, 13		0.001	1.209	0.001	3.2	14.0
6, 18, 5, 14	0.044	0.002	1.194	0.002	4.9	4.9
6, 24, 3, 14		0.001	1.143	0.001	2.7	7.6
6, 24, 5, 14		0.001	1.214	0.002	3.4	11.0
6, 37, 5, 14		0.001	1.249	0.001	2.4	13.4
6, 18, 5, 15	0.169	0.009	1.239	0.011	6.3	6.3
6, 24, 5, 15		0.006	1.251	0.007	4.3	10.6
6, 31, 5, 15		0.004	1.298	0.005	2.8	13.4
6, 37, 5, 15		0.004	1.295	0.005	3.1	16.5
7, 6	0.005	0.000	1.012	0.000	2.4	2.4
7, 18, 5, 6		0.000	1.177	0.000	5.9	8.3
7, 24, 5, 6		0.000	1.200	0.000	3.3	11.6
7, 8	0.009	0.000	1.017	0.000	3.6	3.6
7, 18, 4, 8		0.000	1.116	0.000	2.3	5.9
7, 18, 5, 8		0.000	1.180	0.000	4.1	10.0
7, 24, 5, 8		0.000	1.202	0.000	2.3	12.3
7, 9	0.014	0.000	1.019	0.000	2.8	2.8
7, 18, 5, 9		0.001	1.181	0.001	4.4	7.2
7, 24, 3, 9		0.000	1.123	0.000	2.3	9.5
7, 24, 5, 9		0.000	1.203	0.000	2.5	12.0

**Jalur Utama Pengaruh Subsidi Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah
Tangga Hasil Pengolahan SPA**

Structure Path	Global Effect	Direct Effect	Path Mult	Total Effect	% of Global	Cum %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7, 10	0.016	0.001	1.022	0.001	5.0	5.0
7, 18, 4, 10		0.000	1.119	0.000	2.2	7.2
7, 18, 5, 10		0.001	1.183	0.001	4.5	11.7
7, 24, 5, 10		0.000	1.205	0.000	2.5	14.2
7, 11	0.021	0.001	1.027	0.001	3.1	3.1
7, 18, 5, 11		0.001	1.186	0.001	4.8	7.9
7, 24, 3, 11		0.000	1.129	0.001	2.4	10.3
7, 24, 5, 11		0.000	1.207	0.001	2.7	13.0
7, 12	0.029	0.001	1.032	0.001	3.7	3.7
7, 18, 4, 12		0.001	1.127	0.001	2.2	5.9
7, 18, 5, 12		0.001	1.188	0.001	4.7	10.6
7, 24, 5, 12		0.001	1.209	0.001	2.7	13.3
7, 13	0.033	0.002	1.036	0.002	4.8	4.8
7, 18, 5, 13		0.001	1.190	0.002	5.3	10.1
7, 24, 3, 13		0.001	1.135	0.001	2.5	12.6
7, 24, 5, 13		0.001	1.211	0.001	3.0	15.6
7, 18, 5, 14	0.044	0.002	1.196	0.003	5.7	5.7
7, 24, 3, 14		0.001	1.144	0.001	2.5	8.2
7, 24, 5, 14		0.001	1.216	0.001	3.2	11.4
7, 37, 5, 14		0.001	1.252	0.001	2.3	13.7
7, 18, 5, 15	0.168	0.010	1.241	0.012	7.3	7.3
7, 24, 5, 15		0.005	1.253	0.007	4.1	11.4
7, 31, 5, 15		0.004	1.300	0.005	2.7	14.1
7, 37, 5, 15		0.004	1.297	0.005	3.0	17.1

**Jalur Utama Pengaruh Subsidi Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah
Tangga Hasil Pengolahan SPA**

Structure Path	Global Effect	Direct Effect	Path Mult	Total Effect	% of Global	Cum %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8, 18, 5, 6	0.005	0.000	1.178	0.000	5.8	5.8
8, 24, 5, 6		0.000	1.200	0.000	3.7	9.5
8, 37, 5, 6		0.000	1.233	0.000	2.5	12.0
8, 18, 4, 7	0.007	0.000	1.116	0.000	2.8	2.8
8, 18, 5, 7		0.000	1.180	0.000	3.6	6.4
8, 24, 4, 7		0.000	1.139	0.000	2.9	9.3
8, 24, 5, 7		0.000	1.202	0.000	2.3	11.6
8, 18, 5, 9	0.014	0.001	1.182	0.001	4.3	4.3
8, 24, 3, 9		0.000	1.124	0.000	2.5	6.8
8, 24, 4, 9		0.000	1.141	0.000	2.4	9.2
8, 24, 5, 9		0.000	1.204	0.000	2.8	12.0
8, 10	0.016	0.001	1.024	0.001	3.4	3.4
8, 18, 5, 10		0.001	1.184	0.001	4.5	7.9
8, 24, 3, 10		0.000	1.127	0.000	2.4	10.3
8, 24, 5, 10		0.000	1.206	0.000	2.8	13.1
8, 18, 5, 11	0.021	0.001	1.187	0.001	4.7	4.7
8, 24, 3, 11		0.001	1.130	0.001	2.7	7.4
8, 24, 4, 11		0.000	1.147	0.000	2.1	9.5
8, 24, 5, 11		0.001	1.208	0.001	3.0	12.5
8, 12	0.029	0.001	1.035	0.001	2.5	2.5
8, 18, 5, 12		0.001	1.189	0.001	4.7	7.2
8, 24, 3, 12		0.001	1.134	0.001	2.4	9.6
8, 24, 5, 12		0.001	1.210	0.001	3.0	12.6

**Jalur Utama Pengaruh Subsidi Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah
Tangga Hasil Pengolahan SPA**

Structure Path	Global Effect	Direct Effect	Path Mult	Total Effect	% of Global	Cum %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8, 13	0.033	0.001	1.039	0.001	3.3	3.3
8, 18, 5, 13		0.001	1.191	0.002	5.3	8.6
8, 24, 3, 13		0.001	1.136	0.001	2.8	11.4
8, 24, 5, 13		0.001	1.212	0.001	3.4	14.8
8, 18, 5, 14	0.044	0.002	1.197	0.002	5.6	5.6
8, 24, 3, 14		0.001	1.146	0.001	2.8	8.4
8, 24, 5, 14		0.001	1.217	0.002	3.5	11.9
8, 37, 5, 14		0.001	1.253	0.001	2.4	14.3
8, 18, 5, 15	0.168	0.010	1.242	0.012	7.1	7.1
8, 24, 3, 15		0.004	1.219	0.005	2.8	9.9
8, 24, 5, 15		0.006	1.254	0.008	4.5	14.4
8, 37, 5, 15		0.004	1.298	0.005	3.0	17.4
9, 18, 5, 6	0.004	0.000	1.179	0.000	5.2	5.2
9, 24, 5, 6		0.000	1.201	0.000	3.7	8.9
9, 18, 4, 7	0.006	0.000	1.117	0.000	2.5	2.5
9, 18, 5, 7		0.000	1.181	0.000	3.2	5.7
9, 24, 4, 7		0.000	1.140	0.000	2.8	8.5
9, 24, 5, 7		0.000	1.203	0.000	2.3	10.8
9, 8	0.008	0.000	1.021	0.000	3.0	3.0
9, 18, 5, 8		0.000	1.182	0.000	3.5	6.5
9, 24, 4, 8		0.000	1.141	0.000	2.4	8.9
9, 24, 5, 8		0.000	1.204	0.000	2.5	11.4

**Jalur Utama Pengaruh Subsidi Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah
Tangga Hasil Pengolahan SPA**

Structure Path	Global Effect	Direct Effect	Path Mult	Total Effect	% of Global	Cum %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9, 10	0.013	0.001	1.026	0.001	4.2	4.2
9, 18, 5, 10		0.000	1.185	0.001	3.9	8.1
9, 24, 3, 10		0.000	1.128	0.000	2.4	10.5
9, 24, 5, 10		0.000	1.207	0.000	2.8	13.3
9, 11	0.018	0.000	1.032	0.000	2.6	2.6
9, 18, 5, 11		0.001	1.188	0.001	4.2	6.8
9, 24, 3, 11		0.000	1.131	0.000	2.7	9.5
9, 24, 5, 11		0.000	1.209	0.001	3.0	12.5
9, 12	0.024	0.001	1.037	0.001	3.1	3.1
9, 18, 5, 12		0.001	1.190	0.001	4.2	7.3
9, 24, 3, 12		0.000	1.135	0.001	2.3	9.6
9, 24, 5, 12		0.001	1.210	0.001	3.0	12.6
9, 13	0.028	0.001	1.041	0.001	4.0	4.0
9, 18, 5, 13		0.001	1.192	0.001	4.7	8.7
9, 24, 3, 13		0.001	1.137	0.001	2.8	11.5
9, 24, 5, 13		0.001	1.213	0.001	3.3	14.8
9, 18, 5, 14	0.037	0.002	1.198	0.002	5.0	5.0
9, 24, 3, 14		0.001	1.147	0.001	2.8	7.8
9, 24, 5, 14		0.001	1.217	0.001	3.5	11.3
9, 37, 5, 14		0.001	1.254	0.001	2.3	13.6
9, 18, 5, 15	0.140	0.007	1.243	0.009	6.4	6.4
9, 24, 3, 15		0.003	1.220	0.004	2.8	9.2
9, 24, 5, 15		0.005	1.254	0.006	4.5	13.7
9, 37, 5, 15		0.003	1.299	0.004	3.0	16.7

**Jalur Utama Pengaruh Subsidi Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah
Tangga Hasil Pengolahan SPA**

Structure Path	Global Effect	Direct Effect	Path Mult	Total Effect	% of Global	Cum %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10 ,6	0.004	0.000	1.020	0.000	4.7	4.7
10 ,18 ,5 ,6		0.000	1.181	0.000	5.3	10.0
10 ,24 ,5 ,6		0.000	1.203	0.000	3.1	13.1
10 ,7	0.006	0.000	1.022	0.000	5.2	5.2
10 ,18 ,4 ,7		0.000	1.119	0.000	2.5	7.7
10 ,18 ,5 ,7		0.000	1.183	0.000	3.3	11.0
10 ,24 ,4 ,7		0.000	1.143	0.000	2.4	13.4
10 ,8	0.008	0.001	1.024	0.001	7.0	7.0
10 ,18 ,4 ,8		0.000	1.121	0.000	2.1	9.1
10 ,18 ,5 ,8		0.000	1.184	0.000	3.6	12.7
10 ,24 ,5 ,8		0.000	1.206	0.000	2.1	14.8
10 ,9	0.012	0.001	1.026	0.001	5.4	5.4
10 ,18 ,5 ,9		0.000	1.185	0.000	4.0	9.4
10 ,24 ,3 ,9		0.000	1.128	0.000	2.1	11.5
10 ,24 ,5 ,9		0.000	1.207	0.000	2.3	13.8
10 ,11	0.019	0.001	1.035	0.001	6.1	6.1
10 ,18 ,5 ,11		0.001	1.190	0.001	4.3	10.4
10 ,24 ,3 ,11		0.000	1.134	0.000	2.3	12.7
10 ,24 ,5 ,11		0.000	1.211	0.000	2.5	15.2
10 ,12	0.026	0.002	1.040	0.002	7.1	7.1
10 ,18 ,5 ,12		0.001	1.192	0.001	4.2	11.3
10 ,24 ,5 ,12		0.001	1.213	0.001	2.5	13.8
10 ,37 ,5 ,12		0.000	1.248	0.001	2.1	15.9

**Jalur Utama Pengaruh Subsidi Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah
Tangga Hasil Pengolahan SPA**

Structure Path	Global Effect	Direct Effect	Path Mult	Total Effect	% of Global	Cum %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10 ,13	0.03	0.003	1.044	0.003	9.2	9.2
10 ,18 ,5 ,13		0.001	1.195	0.001	4.7	13.9
10 ,24 ,5 ,13		0.001	1.215	0.001	2.7	16.6
10 ,37 ,5 ,13		0.001	1.250	0.001	2.3	18.9
10 ,14	0.039	0.001	1.058	0.001	3.7	3.7
10 ,18 ,5 ,14		0.002	1.200	0.002	5.2	8.9
10 ,24 ,5 ,14		0.001	1.220	0.001	3.0	11.9
10 ,37 ,5 ,14		0.001	1.256	0.001	2.6	14.5
10 ,15	0.148	0.005	1.168	0.005	3.7	3.7
10 ,18 ,5 ,15		0.008	1.245	0.010	6.6	10.3
10 ,24 ,5 ,15		0.004	1.257	0.006	3.8	14.1
10 ,37 ,5 ,15		0.004	1.301	0.005	3.3	17.4
11 ,6	0.005	0.000	1.025	0.000	4.3	4.3
11 ,18 ,5 ,6		0.000	1.184	0.000	4.9	9.2
11 ,24 ,5 ,6		0.000	1.205	0.000	3.2	12.4
11 ,7	0.007	0.000	1.027	0.000	4.7	4.7
11 ,18 ,4 ,7		0.000	1.123	0.000	2.3	7.0
11 ,18 ,5 ,7		0.000	1.186	0.000	3.0	10.0
11 ,24 ,4 ,7		0.000	1.146	0.000	2.5	12.5
11 ,8	0.009	0.001	1.030	0.001	6.4	6.4
11 ,18 ,5 ,8		0.000	1.187	0.000	3.3	9.7
11 ,24 ,4 ,8		0.000	1.147	0.000	2.1	11.8
11 ,24 ,5 ,8		0.000	1.208	0.000	2.2	14.0

**Jalur Utama Pengaruh Subsidi Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah
Tangga Hasil Pengolahan SPA**

Structure Path	Global Effect	Direct Effect	Path Mult	Total Effect	% of Global	Cum %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 ,9	0.013	0.001	1.032	0.001	4.9	4.9
11 ,18 ,5 ,9		0.000	1.188	0.000	3.6	8.5
11 ,24 ,3 ,9		0.000	1.131	0.000	2.2	10.7
11 ,24 ,5 ,9		0.000	1.209	0.000	2.4	13.1
11 ,10	0.016	0.001	1.035	0.001	8.8	8.8
11 ,18 ,5 ,10		0.000	1.190	0.001	3.7	12.5
11 ,24 ,3 ,10		0.000	1.134	0.000	2.0	14.5
11 ,24 ,5 ,10		0.000	1.211	0.000	2.4	16.9
11 ,12	0.028	0.002	1.046	0.002	6.5	6.5
11 ,18 ,5 ,12		0.001	1.194	0.001	3.9	10.4
11 ,24 ,5 ,12		0.001	1.215	0.001	2.6	13.0
11 ,37 ,5 ,12		0.000	1.250	0.001	2.1	15.1
11 ,13	0.032	0.003	1.050	0.003	8.4	8.4
11 ,18 ,5 ,13		0.001	1.197	0.001	4.3	12.7
11 ,24 ,3 ,13		0.001	1.144	0.001	2.4	15.1
11 ,24 ,5 ,13		0.001	1.217	0.001	2.8	17.9
11 ,14	0.042	0.001	1.064	0.001	3.4	3.4
11 ,18 ,5 ,14		0.002	1.203	0.002	4.7	8.1
11 ,24 ,5 ,14		0.001	1.221	0.001	3.1	11.2
11 ,37 ,5 ,14		0.001	1.258	0.001	2.5	13.7
11 ,15	0.159	0.005	1.174	0.005	3.4	3.4
11 ,18 ,5 ,15		0.008	1.247	0.010	6.1	9.5
11 ,24 ,5 ,15		0.005	1.258	0.006	4.0	13.5
11 ,37 ,5 ,15		0.004	1.304	0.005	3.2	16.7

**Jalur Utama Pengaruh Subsidi Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah
Tangga Hasil Pengolahan SPA**

Structure Path	Global Effect	Direct Effect	Path Mult	Total Effect	% of Global	Cum %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12 ,6	0.004	0.000	1.030	0.000	3.1	3.1
12 ,18 ,5 ,6		0.000	1.186	0.000	4.7	7.8
12 ,24 ,5 ,6		0.000	1.207	0.000	3.5	11.3
12 ,7	0.006	0.000	1.032	0.000	3.4	3.4
12 ,18 ,5 ,7		0.000	1.188	0.000	2.9	6.3
12 ,24 ,4 ,7		0.000	1.149	0.000	2.7	9.0
12 ,24 ,5 ,7		0.000	1.209	0.000	2.2	11.2
12 ,8	0.008	0.000	1.035	0.000	4.7	4.7
12 ,18 ,5 ,8		0.000	1.189	0.000	3.2	7.9
12 ,24 ,4 ,8		0.000	1.150	0.000	2.3	10.2
12 ,24 ,5 ,8		0.000	1.210	0.000	2.4	12.6
12 ,9	0.012	0.000	1.037	0.000	3.6	3.6
12 ,18 ,5 ,9		0.000	1.190	0.000	3.5	7.1
12 ,24 ,3 ,9		0.000	1.135	0.000	2.4	9.5
12 ,24 ,5 ,9		0.000	1.210	0.000	2.6	12.1
12 ,10	0.014	0.001	1.040	0.001	6.5	6.5
12 ,18 ,5 ,10		0.000	1.192	0.001	3.6	10.1
12 ,24 ,3 ,10		0.000	1.138	0.000	2.3	12.4
12 ,24 ,5 ,10		0.000	1.213	0.000	2.7	15.1
12 ,11	0.018	0.001	1.046	0.001	4.1	4.1
12 ,18 ,5 ,11		0.001	1.194	0.001	3.8	7.9
12 ,24 ,3 ,11		0.000	1.141	0.000	2.6	10.5
12 ,24 ,5 ,11		0.000	1.215	0.001	2.8	13.3

**Jalur Utama Pengaruh Subsidi Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah
Tangga Hasil Pengolahan SPA**

Structure Path	Global Effect	Direct Effect	Path Mult	Total Effect	% of Global	Cum %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12 ,13	0.029	0.002	1.055	0.002	6.2	6.2
12 ,18 ,5 ,13		0.001	1.199	0.001	4.2	10.4
12 ,24 ,3 ,13		0.001	1.147	0.001	2.6	13.0
12 ,24 ,5 ,13		0.001	1.219	0.001	3.1	16.1
12 ,18 ,5 ,14	0.039	0.001	1.205	0.002	4.5	4.5
12 ,24 ,3 ,14		0.001	1.157	0.001	2.7	7.2
12 ,24 ,5 ,14		0.001	1.223	0.001	3.4	10.6
12 ,37 ,5 ,14		0.001	1.261	0.001	2.5	13.1
12 ,18 ,5 ,15	0.146	0.007	1.250	0.009	5.8	5.8
12 ,24 ,3 ,15		0.003	1.230	0.004	2.7	8.5
12 ,24 ,5 ,15		0.005	1.260	0.006	4.3	12.8
12 ,37 ,5 ,15		0.004	1.306	0.005	3.2	16.0
13 ,6	0.004	0.000	1.034	0.000	3.8	3.8
13 ,18 ,5 ,6		0.000	1.188	0.000	4.8	8.6
13 ,24 ,5 ,6		0.000	1.209	0.000	3.4	12.0
13 ,7	0.006	0.000	1.036	0.000	4.2	4.2
13 ,18 ,4 ,7		0.000	1.129	0.000	2.3	6.5
13 ,18 ,5 ,7		0.000	1.190	0.000	3.0	9.5
13 ,24 ,4 ,7		0.000	1.151	0.000	2.7	12.2
13 ,8	0.008	0.000	1.039	0.000	5.7	5.7
13 ,18 ,5 ,8		0.000	1.191	0.000	3.3	9.0
13 ,24 ,4 ,8		0.000	1.153	0.000	2.2	11.2
13 ,24 ,5 ,8		0.000	1.212	0.000	2.3	13.5

**Jalur Utama Pengaruh Subsidi Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah
Tangga Hasil Pengolahan SPA**

Structure Path	Global Effect	Direct Effect	Path Mult	Total Effect	% of Global	Cum %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13 ,9	0.012	0.001	1.041	0.001	4.4	4.4
13 ,18 ,5 ,9		0.000	1.192	0.000	3.6	8.0
13 ,24 ,3 ,9		0.000	1.137	0.000	2.3	10.3
13 ,24 ,5 ,9		0.000	1.213	0.000	2.5	12.8
13 ,10	0.014	0.001	1.044	0.001	7.9	7.9
13 ,18 ,5 ,10		0.000	1.195	0.001	3.6	11.5
13 ,24 ,3 ,10		0.000	1.140	0.000	2.2	13.7
13 ,24 ,5 ,10		0.000	1.215	0.000	2.6	16.3
13 ,11	0.018	0.001	1.050	0.001	5.0	5.0
13 ,18 ,5 ,11		0.001	1.197	0.001	3.9	8.9
13 ,24 ,3 ,11		0.000	1.144	0.000	2.5	11.4
13 ,24 ,5 ,11		0.000	1.217	0.001	2.8	14.2
13 ,12	0.025	0.001	1.055	0.001	5.8	5.8
13 ,18 ,5 ,12		0.001	1.199	0.001	3.9	9.7
13 ,24 ,3 ,12		0.000	1.147	0.001	2.2	11.9
13 ,24 ,5 ,12		0.001	1.219	0.001	2.7	14.6
13 ,14	0.038	0.001	1.073	0.001	3.0	3.0
13 ,18 ,5 ,14		0.001	1.208	0.002	4.7	7.7
13 ,24 ,3 ,14		0.001	1.159	0.001	2.6	10.3
13 ,24 ,5 ,14		0.001	1.226	0.001	3.3	13.6
13 ,15	0.146	0.004	1.183	0.004	3.0	3.0
13 ,18 ,5 ,15		0.007	1.252	0.009	6.0	9.0
13 ,24 ,5 ,15		0.005	1.263	0.006	4.2	13.2
13 ,37 ,5 ,15		0.003	1.309	0.004	3.0	16.2

**Jalur Utama Pengaruh Subsidi Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah
Tangga Hasil Pengolahan SPA**

Structure Path	Global Effect	Direct Effect	Path Mult	Total Effect	% of Global	Cum %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14 ,6	0.005	0.000	1.049	0.000	4.2	4.2
14 ,18 ,5 ,6		0.000	1.194	0.000	3.8	8.0
14 ,24 ,5 ,6		0.000	1.214	0.000	3.2	11.2
14 ,31 ,5 ,6		0.000	1.262	0.000	3.2	14.4
14 ,7	0.007	0.000	1.051	0.000	4.6	4.6
14 ,18 ,5 ,7		0.000	1.196	0.000	2.3	6.9
14 ,24 ,4 ,7		0.000	1.160	0.000	2.5	9.4
14 ,31 ,4 ,7		0.000	1.209	0.000	3.0	12.4
14 ,8	0.009	0.001	1.053	0.001	6.2	6.2
14 ,18 ,5 ,8		0.000	1.197	0.000	2.6	8.8
14 ,24 ,5 ,8		0.000	1.217	0.000	2.2	11.0
14 ,31 ,4 ,8		0.000	1.211	0.000	2.5	13.5
14 ,9	0.014	0.001	1.055	0.001	4.8	4.8
14 ,18 ,5 ,9		0.000	1.198	0.000	2.8	7.6
14 ,24 ,5 ,9		0.000	1.217	0.000	2.4	10.0
14 ,31 ,4 ,9		0.000	1.212	0.000	2.5	12.5
14 ,10	0.016	0.001	1.058	0.001	8.6	8.6
14 ,18 ,5 ,10		0.000	1.200	0.000	2.8	11.4
14 ,24 ,5 ,10		0.000	1.220	0.000	2.4	13.8
14 ,31 ,5 ,10		0.000	1.268	0.000	2.4	16.2
14 ,11	0.021	0.001	1.064	0.001	5.4	5.4
14 ,18 ,5 ,11		0.001	1.203	0.001	3.1	8.5
14 ,24 ,5 ,11		0.000	1.221	0.001	2.6	11.1
14 ,31 ,5 ,11		0.000	1.270	0.001	2.5	13.6

**Jalur Utama Pengaruh Subsidi Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah
Tangga Hasil Pengolahan SPA**

Structure Path	Global Effect	Direct Effect	Path Mult	Total Effect	% of Global	Cum %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14 , 12	0.029	0.002	1.069	0.002	6.4	6.4
14 , 18 , 5 , 12		0.001	1.205	0.001	3.0	9.4
14 , 24 , 5 , 12		0.001	1.223	0.001	2.5	11.9
14 , 31 , 5 , 12		0.001	1.272	0.001	2.5	14.4
14 , 13	0.034	0.003	1.073	0.003	8.2	8.2
14 , 18 , 5 , 13		0.001	1.208	0.001	3.4	11.6
14 , 24 , 5 , 13		0.001	1.226	0.001	2.8	14.4
14 , 31 , 5 , 13		0.001	1.275	0.001	2.8	17.2
14 , 15	0.166	0.005	1.197	0.005	3.3	3.3
14 , 18 , 5 , 15		0.006	1.258	0.008	4.7	8.0
14 , 24 , 5 , 15		0.005	1.267	0.006	3.9	11.9
14 , 31 , 5 , 15		0.005	1.314	0.006	3.9	15.8
15 , 6	0.005	0.000	1.158	0.000	2.7	2.7
15 , 24 , 5 , 6		0.000	1.251	0.000	2.8	5.5
15 , 31 , 5 , 6		0.000	1.298	0.000	2.9	8.4
15 , 7	0.007	0.000	1.160	0.000	3.0	3.0
15 , 31 , 4 , 7		0.000	1.275	0.000	2.8	5.8
15 , 32 , 2 , 7		0.000	1.192	0.000	2.5	8.3
15 , 32 , 4 , 7		0.000	1.212	0.000	4.0	12.3
15 , 8	0.009	0.000	1.163	0.000	4.1	4.1
15 , 31 , 4 , 8		0.000	1.277	0.000	2.3	6.4
15 , 32 , 2 , 8		0.000	1.193	0.000	2.5	8.9
15 , 32 , 4 , 8		0.000	1.214	0.000	3.3	12.2

**Jalur Utama Pengaruh Subsidi Pendidikan Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah
Tangga Hasil Pengolahan SPA**

Structure Path	Global Effect	Direct Effect	Path Mult	Total Effect	% of Global	Cum %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15 ,9	0.013	0.000	1.165	0.000	3.1	3.1
15 ,31 ,4 ,9		0.000	1.278	0.000	2.3	5.4
15 ,31 ,5 ,9		0.000	1.302	0.000	2.1	7.5
15 ,32 ,4 ,9		0.000	1.215	0.000	3.3	10.8
15 ,10	0.015	0.001	1.168	0.001	5.7	5.7
15 ,31 ,4 ,10		0.000	1.281	0.000	2.2	7.9
15 ,31 ,5 ,10		0.000	1.304	0.000	2.2	10.1
15 ,32 ,4 ,10		0.000	1.218	0.000	3.2	13.3
15 ,11	0.019	0.001	1.174	0.001	3.6	3.6
15 ,24 ,5 ,11		0.000	1.258	0.000	2.3	5.9
15 ,31 ,5 ,11		0.000	1.306	0.000	2.3	8.2
15 ,32 ,4 ,11		0.000	1.222	0.001	3.0	11.2
15 ,12	0.026	0.001	1.179	0.001	4.2	4.2
15 ,31 ,4 ,12		0.000	1.287	0.001	2.2	6.4
15 ,31 ,5 ,12		0.000	1.308	0.001	2.3	8.7
15 ,32 ,4 ,12		0.001	1.226	0.001	3.1	11.8
15 ,13	0.03	0.001	1.183	0.002	5.4	5.4
15 ,24 ,5 ,13		0.001	1.263	0.001	2.5	7.9
15 ,31 ,5 ,13		0.001	1.311	0.001	2.6	10.5
15 ,32 ,4 ,13		0.001	1.229	0.001	3.1	13.6
15 ,18 ,5 ,14	0.04	0.001	1.258	0.001	2.5	2.5
15 ,24 ,5 ,14		0.001	1.267	0.001	2.7	5.2
15 ,31 ,5 ,14		0.001	1.314	0.001	2.8	8.0
15 ,32 ,4 ,14		0.001	1.239	0.001	3.1	11.1